



LAPORAN KINERJA 2020

**PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BITUNG**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi serta target kinerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tahun 2020. Sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan bagian dari perwujudan transparansi dan akuntabilitas Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kaitan dengan terselenggaranya *good governance* di lingkup UPT Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Laporan Kinerja (LKj) memberikan gambaran terhadap capaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung pada tahun 2020. Dalam Laporan Kinerja ini juga menjabarkan langkah-langkah tindaklanjut dalam rangka perbaikan capaian ke depan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan RKT tahun 2020.

Saran dan masukan yang membangun dalam rangka perbaikan laporan ke depan sangat kami harapkan, dan tidak lupa disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan aktif, sehingga laporan kinerja ini dapat disusun dan diterbitkan.

Bitung, 14 Januari 2021
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Bitung



Donny Muhamad Falsal
Donny Muhamad Falsal

RINGKASAN EKSEKUTIF

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Instansi Pemerintah, maka disusun Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2020. Laporan Kinerja ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan RKT tahun 2020.

Pada tahun 2020, terdapat 14 Sasaran dan 25 Indikator Kinerja yang harus dilaksanakan oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung. Dalam pelaksanaannya 24 Indikator Kinerja tercapai dengan skor 90 – 120 (BAIK-HIJAU) dan 1 Indikator Kinerja tidak tercapai dengan skor 70 - <90 (CUKUP-KUNING). Indikator yang tidak tercapai tersebut adalah “Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung” dari target 82% hanya tercapai 72,5% dengan persentase capaian 88,41%. Tidak tercapainya target ini disebabkan oleh rendahnya tingkat keaktifan level 3 Pangkalan PSDKP Bitung pada aplikasi Bitrix KKP. Dalam rangka perbaikan capaian Indikator Kinerja ini, diharapkan pada tahun 2021 dilakukan pemantauan secara berkala terhadap tingkat keaktifan setiap level yang ada di Pangkalan PSDKP Bitung.

Hasil pengukuran capaian Indikator Kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2020, nilai capaian kinerja IKU adalah 107,15 sedangkan nilai total capaian Indikator Kinerja (IKU + IK) adalah 106,90. Pencapaian kinerja tahun 2020 akan menjadi masukan dalam penyusunan perencanaan dan penetapan kegiatan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung di tahun 2021.

Pencapaian kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2020 dilaksanakan melalui 5 Kegiatan Program Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yaitu: Pemantauan dan Operasi Armada (2350), Penyelesaian Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (2351), Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (2352), Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (2353), dan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP (2355). Pagu alokasi anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2020 sebesar Rp39.322.745.000 dengan realisasi anggaran Rp37.518.818.294 atau 95,41%.

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung ini diharapkan mampu menggambarkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung selama tahun 2020 beserta capaiannya baik kinerja maupun anggaran serta permasalahan yang dihadapi sebagai masukan dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2021.

DAFTAR ISI

COVER.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	1
1.3. Isu Strategis	1
1.4. Tugas dan Fungsi.....	2
1.5. Sistematika Penyajian.....	5
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....	6
2.1. Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024	6
2.3. Rencana Kerja Tahunan Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020	9
2.4. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020.....	10
2.5. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020	16
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	17
3.1. Capaian Kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Tahun 2020	17
3.2. Analisis Capaian Kinerja	22
3.3. Akuntabilitas Anggaran	86
BAB 4 PENUTUP.....	88
4.1. Kesimpulan.....	88
4.2. Rekomendasi	88
LAMPIRAN	89
1. Rencana Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung	
2. Perjanjian Kinerja Kepala Pangkalan PSDKP Bitung (Revisi November 2020)	
3. Data Dukung	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sasaran Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2020-2024	7
Tabel 2.	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020 – 2024	8
Tabel 3.	Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020	10
Tabel 4.	Perubahan Target Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020	12
Tabel 5.	Penambahan Indikator Kinerja baru pada Perjanjian Kinerja September 2020	13
Tabel 6.	Pengurangan Indikator Kinerja bulan November 2020.....	13
Tabel 7.	Rincian Perubahan Indikator Kinerja selama Tahun 2020	14
Tabel 8.	Capaian Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020.....	17
Tabel 9.	Sandingan Target Rencana Strategis 2020-2024 dan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020	21
Tabel 10.	Capaian Kegiatan Pendukung IK2 - Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020.....	25
Tabel 11.	Capaian Jumlah Pelaku Usaha Pengelolaan Produk dan Jasa Kelautan.....	33
Tabel 12.	Capaian Jumlah Pelaku Usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil...38	
Tabel 13.	Capaian Jumlah Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut Nasional.....	41
Tabel 14.	Kegiatan Pencemarann Perairan di Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020	42
Tabel 15.	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Yang Diperiksa Dari Kegiatan <i>Destructive Fishing</i>	44
Tabel 16.	Capaian Kegiatan Pendukung Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020.....	45
Tabel 17.	Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020.....	46
Tabel 18.	Perbandingan Hasil Pemeriksaan Kapal Perikanan.....	46
Tabel 19.	Hasil Pengawasan Unit Pengolahan Hasil Perikanan di Lingkup PSDKP Bitung	48
Tabel 20.	Perbandingan Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perikanan Yang Diperiksa	48
Tabel 21.	Hasil Pengawasan Unit Pembudidayaan Ikan di Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung .	49
Tabel 22.	Jumlah Usaha Budidaya Ikan Yang Diperiksa.....	50
Tabel 23.	Hasil Pengawasan unit usaha distribusi hasil perikanan di Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	51
Tabel 24.	Jumlah Unit Usaha Distribusi Hasil Perikanan Yang Diperiksa	51
Tabel 25.	Persentase Cakupan WPPNRI Kapal Pengawas Tahun 2020.....	52

Tabel 26. Persentase Cakupan WPPNRI <i>Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat</i> Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020	54
Tabel 27. Peralatan/Perlengkapan untuk mendukung kesiapan sistem Pemantauan SPKP di Pangkalan PSDKP Bitung	56
Tabel 28. Sebaran Lokasi <i>Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat</i> lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020.....	60
Tabel 29. Capaian Hari Operasi Kapal Pengawas	62
Tabel 30. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa Menggunakan <i>Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat</i> Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020.....	63
Tabel 31. Capaian Hari Operasi Speedboat Pengawas/RIB/Rubber Boat	64
Tabel 32. Perbandingan Capaian Hari Operasi 2019-2020.....	65
Tabel 33. Data Barang Bukti Kapal Pelaku TPKP Tahun 2020	75
Tabel 34. Jumlah Awak Kapal yang Selesai Ditangani Tahun 2020.....	78
Tabel 35. Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan SLO Tahun 2020	79
Tabel 36. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020.	82
Tabel 37. Capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020	84
Tabel 38. Penerapan MP Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020.....	84
Tabel 39. Nilai Penerapan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di Pangkalan PSDK Bitung Tahun 2019 – 2020.....	85
Tabel 40. IKPA lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020	85
Tabel 41. Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2020.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung	4
Gambar 2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung.....	5
Gambar 3. Rincian Capaian Kinerja per triwulan Tahun 2020	17
Gambar 4. Capaian Indikator Kinerja Level 2 dan 4 Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020	20
Gambar 5. Perbandingan Capaian Kinerja Per Unit Kerja	20
Gambar 6. Peta Taman Wisata Perairan (TWP) Kapoposang.....	28
Gambar 7. Persentase Jenis Kasus TPKP di Pangkalan PSKP Bitung Tahun 2020	67
Gambar 8. Alokasi Anggaran Tahun 2020 Per Jenis Belanja	86

1.1. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2020 merupakan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu diseminasi informasi capaian kinerja dalam satu tahun anggaran berdasarkan komitmen yang telah ditetapkan sebelumnya. LKj ini menginformasikan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus Pangkalan Pengawas SDKP Bitung untuk mencapai target kinerja yang telah disusun dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana aturan tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis yang ditetapkan dalam rangka menuju perwujudan “*good governance*”.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini adalah untuk mengkomunikasikan pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2020 kepada para stakeholders guna mewujudkan akuntabilitas kepada pihak-pihak yang memberi mandat atau amanah.

Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan dari penerapan manajemen kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dari tahun sebelumnya dan memperbaiki kinerja kearah yang lebih baik dimasa datang, yang dimulai dari proses perencanaan secara benar, pelaksanaan dan evaluasinya.

1.3. Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan khususnya terkait pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, yaitu:

1. Isu strategis bidang perikanan tangkap, meliputi
 - a. Maraknya pencurian ikan oleh Kapal Perikanan Asing (KIA) dengan berbagai modus operandi.
 - b. Isu pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh Kapal Ikan Indonesia (KII), antara lain: penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan, penggunaan ABK asing, dan kelengkapan ijin operasi.

2. Isu strategis bidang perikanan budidaya, meliputi:
 - a. Ekstensifikasi budidaya perikanan yang merusak mangrove.
 - b. Limbah kegiatan budidaya ikan yang menyebabkan pencemaran kawasan pesisir dan laut.
 - c. Penggunaan Obat Ikan, Kimia dan Bahan biologi (OIKB) dalam pembudidayaan ikan.
3. Isu strategis bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, meliputi:
 - a. Pelaksanaan ekspor hasil perikanan Indonesia harus sesuai dengan ketentuan internasional dan regional.
 - b. Penggunaan bahan berbahaya pada kegiatan pengolahan unit usaha pengolah ikan skala kecil seperti formalin, borax dan bahan berbahaya lainnya dalam produk hasil perikanan.
4. Isu strategis bidang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:
 - a. Kerusakan terumbu karang akibat penambangan karang dan penggunaan alat tangkap yang merusak habitat ikan, seperti: bom, racun, dan setrum.
 - b. Eksploitasi mangrove, seperti alih fungsi lahan dan pemanfaatan kayu sebagai bahan bakar.
 - c. Penambangan pasir besi dan pasir laut yang menyebabkan rusaknya ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - d. Kegiatan perikanan yang menyebabkan pencemaran perairan pesisir dan laut.

Selain isu strategis pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di atas, SDM juga menjadi isu strategis yang menjadi perhatian bagi Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam rangka pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Dengan rentang kendali yang luas meliputi seluruh Pulau Sulawesi, dukungan Pengawas Perikanan yang terbatas menyebabkan tidak optimalnya pelaksanaan kegiatan pengawasan di lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung. Penguatan SDM dan serta mekanisme pendistribusian SDM Pengawas Perikanan di Satwas dan Wilker lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan SDKP di tahun 2021.

1.4. Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu:

- a. Penyusunan rencana, program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan;
- b. Pelaksanaan operasional pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan bimbingan kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS);
- d. Pelaksanaan penyiapan logistik dan pemeliharaan Kapal Pengawas Perikanan;

- e. Pelaksanaan penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. Pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengawasan; dan
- g. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

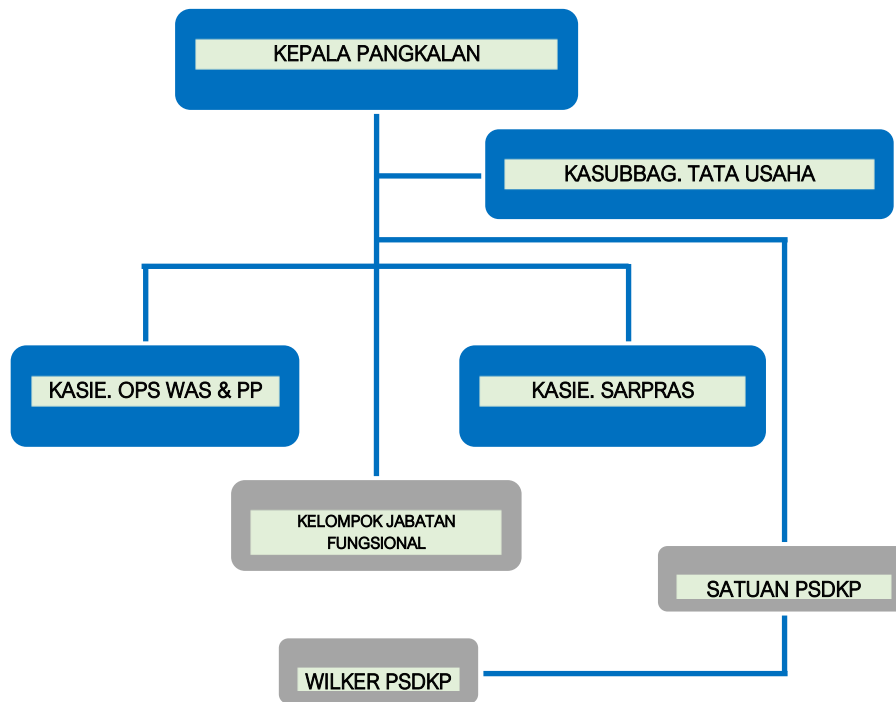
Untuk melaksanakan tugas dan fungsi (TUSI) organisasi yang telah ditetapkan, perlu dilakukan pembagian tugas dan kewenangan yang digambarkan dalam struktur organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit pelaksana Teknis Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, maka dalam menjalankan tugasnya Kepala Pangkalan membawahi Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran, dan Kepala Seksi Sarana dan Prasarana serta membawahi Kelompok Jabatan Fungsional, dimana masing-masing mempunyai tugas dan kewenangan seperti diuraikan dibawah ini:

- a. Kepala Pangkalan
Merumuskan kebijakan operasional, mengkoordinasikan, mengarahkan dan melaksanakan manajerial dibidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta melakukan pembinaan kepada bawahan di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung untuk mencapai kelancaran pelaksanaan tugas.
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha
Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pengelolaan urusan administrasi keuangan, barang kekayaan milik negara, kepegawaian, dan jabatan fungsional, persuratan, kearsipan, perlengkapan, dan rumah tangga.
- c. Kepala Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran
Melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS), serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan.
- d. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
Melakukan pelaksanaan operasional dan penyiapan logistik kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengawasan, dan perencanaan dan pengembangan pengawasan kapal pengawas.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional
Fungsional pengawas melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan serta kegiatan lain sesuai dengan tugas jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan untuk fungsional lainnya disesuaikan dengan bidang tugas fungsional yang diembannya berdasarkan SK fungsional yang telah ditetapkan.

Kepala Pangkalan menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan mengenai hasil pelaksanaan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan, dan dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT PSDKP maupun dalam hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

Di lingkungan UPT PSDKP dibentuk Satuan Pengawasan yang merupakan unit organisasi nonstruktural di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan analisis beban kerja dan dipimpin oleh seorang Koordinator. Satuan Pengawasan SDKP Melaksanakan kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, pembinaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) serta evaluasi, dokumentasi, informasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan penanganan pelanggaran sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah kerja masing-masing.

Gambar 1. Struktur Organisasi Pangkalan PSDKP Bitung



Berdasarkan SK Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2017 tanggal 7 April 2017, untuk mendukung terlaksananya kegiatan pengawasan SDKP secara efektif, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung dibantu oleh 6 Satuan Pengawasan SDKP 31 Wilayah Kerja PSDKP, dengan rincian :

- a. **Pangkalan PSDKP Bitung**, meliputi: Wilker PSDKP Amurang, Wilker PSDKP Belang, Wilker PSDKP Labuan Uki, Wilker PSDKP Kema, Wilker PSDKP Tumumpa, dan Wilker PSDKP Sitaro.
- b. **Satwas SDKP Gorontalo**, meliputi: Wilker PSDKP Molibago, Wilker PSDKP Parigi Moutong, Wilker PSDKP Tojo Una-una, Wilker PSDKP Boalemo, dan Wilker PSDKP Pohuwato.
- c. **Satwas SDKP Kendari**, meliputi: Wilker PSDKP Banggai, Wilker PSDKP Banggai Kep. dan Banggai Laut, Wilker PSDKP Bau-bau, Wilker PSDKP Ereke, Wilker PSDKP Kolaka, Wilker PSDKP Pasar Wajo, Wilker PSDKP Torobulu, dan Wilker PSDKP Wakatobi.
- d. **Satwas SDKP Gorontalo Utara**, meliputi: Wilker PSDKP Toli-toli.
- e. **Satwas SDKP Makassar**, meliputi: Wilker PSDKP Bone, Wilker PSDKP Palopo, dan Wilker PSDKP Pangkajene Kepulauan.

- f. **Satwas SDKP Takalar**, meliputi: Wilker PSDKP Bulukumba, Wilker PSDKP Jeneponto, Wilker PSDKP Selayar, dan Wilker PSDKP Sinjai.
- g. **Satwas SDKP Mamuju**, meliputi: Wilker PSDKP Donggala, Wilker PSDKP Majene, Wilker PSDKP Mamuju Utara, dan Wilker PSDKP Polewali Mandar.

Gambar 2. Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Bitung



1.5. Sistematika Penyajian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja (LKj) tahun 2020 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung di susun sebagai berikut:

1. Bab 1 Pendahuluan, pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan LKj, tugas dan fungsi organisasi serta isu strategis organisasi Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung;
2. Bab 2 Perencanaan Kinerja, pada bab ini menjelaskan tentang rencana strategis Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung untuk periode 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja tahun 2020;
3. Bab 3 Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran, pada bab ini berisi uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, serta akuntabilitas keuangan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2020; dan
4. Bab 4 Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja (LKj) Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2020 dan rekomendasi perbaikan kinerja ke depan.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya agar efektif, efisien dan akuntabel, Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan 2020-2024; Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen. PSDKP) 2020-2024; dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah disempurnakan dengan pendekatan sistem pengelolaan kinerja berbasis *Balance Score Cards* (BSC).

2.1. Rencana Strategis Ditjen PSDKP 2020-2024

Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai tugas dan fungsi yang diamanatkan. Renstra tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan strategis KKP sebagaimana tertuang dalam Renstra KKP 2020-2024.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi KKP 2020-2024 maka telah ditetapkan visi dan misi Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024, yaitu: visi Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024 adalah: "Pengawasan SDKP yang tangguh dan efektif untuk mewujudkan pemanfaatan SDKP yang tertib dan bertanggung jawab menuju terwujudnya visi Kementerian Kelautan dan Perikanan". Misi Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024 adalah: (1) Meningkatkan kualitas SDM pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pengokohan budaya kerja dan pengembangan inovasi; (2) Mendukung peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional melalui upaya peningkatan kepatuhan para pemangku kepentingan kelautan dan perikanan; (3) Mendukung peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan dengan memastikan setiap kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan dilakukan secara bertanggung jawab; dan (4) Meningkatkan tata kelola pemerintahan pada lingkup Ditjen PSDKP.

Sebagai penjabaran dari visi dan misi Direktorat Jenderal PSDKP maka dirumuskan beberapa tujuan Ditjen PSDKP 2020-2024, yaitu:

1. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan melalui meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM kelautan dan perikanan terutama berkaitan dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.
2. Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional melalui meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan.

3. Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan melalui optimalnya pengelolaan kawasan konservasi perairan dan optimalnya pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
4. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP melalui peningkatan tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP.

Berdasarkan tujuan tersebut, maka disusunlah Sasaran Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024 yang dirumuskan dari Sasaran Strategis KKP 2020-2024, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 1. Sasaran Direktorat Jenderal PSDKP Tahun 2020-2024

No	Sasaran Strategis KKP (Akibat)	Sasaran Program Ditjen PSDKP (Sebab)	Keterangan
SS-6	Tatakelola SDKP bertanggungjawab	Partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP meningkat	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengawasan SDKP ikut berkontribusi menciptakan tata Kelola SDKP yang bertanggung jawab
		Kepatuhan pemangku kepentingan KP meningkat	Meningkatnya kepatuhan pemangku kepentingan KP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola SDKP yang bertanggungjawab
SS-8	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang Integratif	Pemantauan dan Operasi Armada efektif	Efektifnya pemantauan dan operasi armada ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
		Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan tuntas	Tuntasnya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan ikut berkontribusi menciptakan pengawasan SDKP yang integratif
SS-9	Tata Kelola pemerintahan yang baik	Tata Kelola pemerintahan yang baik lingkup Ditjen PSDKP	Baiknya Tata kelola pemerintahan lingkup Ditjen PSDKP ikut berkontribusi menciptakan tatakelola pemerintahan yang baik pada lingkup KKP

Berdasarkan rumusan Sasaran Program tersebut serta berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan No. S-375/MK.02/2020 dan B.308/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Restrukturisasi Program Kementerian/Lembaga maka Ditjen PSDKP 2020-2024 ikut berkontribusi pada 2 (dua) program KKP, yaitu: (1) Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan, dan (2) Program Dukungan Manajemen.

2.2. Rencana Strategis Pangkalan PSDKP Bitung 2020-2024

Penyusunan Rencana Strategis Pangkalan PSDKP Bitung 2020-2024 berpedoman pada Visi, Misi, Tujuan Renstra Direktorat Jenderal PSDKP 2020-2024. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sepenuhnya diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran program Direktorat Jenderal PSDKP tahun 2020-2024.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020-2024, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020 – 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1.	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat	Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)
2.	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan	Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (pelaku usaha)
3.	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan	Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)
4.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)
		Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)
		Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)
5.	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (unit)
		Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (unit)
6.	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)
		Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat (unit)
		Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (hari operasi)
		Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (hari operasi)
		Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (orang)
7.	Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)
		Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)
		Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)
8.	Tata kelola pemerintahan yang baik	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Indeks)
		Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)
		Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)
		Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)
		Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
		Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)
		Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (unit kerja)
		Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)
		Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)
		Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan (Indeks)
		Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
		Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Pangkalan PSDKP Bitung dibandingkan Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung (%)

2.3. Rencana Kerja Tahunan Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan proses perencanaan yang setiap tahun dilaksanakan sebagai proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Ditjen PSDKP 2020-2024, dan Rencana Strategis (Renstra) Pangkalan PSDKP Bitung 2020-2024. Rencana Kerja Tahunan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2020 menggambarkan kinerja tahunan yang ingin diwujudkan disesuaikan dengan dokumen perencanaan yang akan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020.

Berdasarkan Rencana Kerja (Renja) tahun 2020 Ditjen PSDKP, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung melaksanakan Kegiatan dan Output yang meliputi:

1. Pemantauan dan Operasi Armada
 - a. Operasional Kapal Pengawas
 - b. Awak Kapal Pengawas yang Mumpuni dan Memenuhi Kualifikasi
 - c. Armada Pengawasan dan Sistem Pemantauan yang siap operasi
 - d. Perangkat Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi
 - e. Operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat
 - f. Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang aktif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan
 - g. Bangunan/Pos Pengawasan yang dibangun
2. Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan
 - a. Perkara tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik secara akuntabel
 - b. Barang bukti dan awak kapal tindak pidana kelautan dan perikanan yang ditangani secara akuntabel
3. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
 - a. Kawasan konservasi yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. Jenis ikan yang dilindungi yang diawasi sesuai peraturan perundang-undangan
 - c. Pelaku usaha pengelolaan jasa kelautan yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan

- d. Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
 - e. Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut Nasional yang Patuh terhadap Peraturan Perundang-Undangan
 - f. Pelaku Usaha Perikanan yang Bebas dari Kegiatan Destructive Fishing
4. Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
- a. Kapal Perikanan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-undangan
 - b. Unit Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-undangan
 - c. Unit Usaha Budidaya Ikan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-undangan
 - d. Usaha Distribusi Hasil Perikanan yang Patuh Terhadap Peraturan Perundang-undangan
5. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PSDKP
- a. Layanan Sarana dan Prasarana Internal
 - b. Layanan Dukungan Manajemen Satker
 - c. Layanan Perkantoran

2.4. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu, dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja adalah untuk: meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Pengelolaan kinerja di Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung merupakan pemenuhan amanat kebijakan pengelolaan kinerja yang telah ditetapkan oleh Ditjen PSDKP, juga ditujukan untuk: menterjemahkan strategi organisasi ke dalam rencana operasional dengan baik, sehingga manajemen kinerja organisasi akan selaras dengan strategi organisasi; membangun organisasi yang terus menerus melakukan perbaikan (*countinuous improvement*); dan Membangun keselarasan antar unit kerja dan meningkatkan efektifitas dan efisiensi organisasi. Target kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2020 sebagaimana tabel Perjanjian Kinerja dibawah ini:

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1. Terselenggaranya tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas	1. Persentase tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	70
2. Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	2. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (pelaku usaha)	55
3. Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	3. Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
4. Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan kapal pengawas	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	1,06
5. Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	0,204
6. Terselenggaranya Pemantauan SDKP melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)	6. Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)	70
7. Terselenggaranya perawatan kapal pengawas	7. Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (unit)	2
8. Terselenggaranya perawatan speedboat pengawas	8. Jumlah speedboat pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (unit)	16
9. Terselenggaranya Operasi Kapal Pengawas	9. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	178
	10. Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU fishing dan merusak SDKP di WPP-NRI Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (hari operasi)	100
10. Terselenggaranya Operasi speedboat Pengawas	11. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat pengawas (unit)	360
	12. Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (hari operasi)	25
11. Tersedianya awak kapal pengawas perikanan yang memenuhi kualifikasi kesehatan	13. Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (orang)	40
12. Terselenggaranya Penyidikan TPKP	14. Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
13. Terselenggaranya Penanganan Barbuk dan Awak Kapal	15. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93
	16. Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93
14. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	17. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Indeks)	80
	18. Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
	19. Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100

Sasaran	Indikator Kinerja	Target
	20. Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
	21. Nilai WBK Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	75
	22. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Indeks)	72
	23. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Nilai)	90
	24. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	82
	25. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Indeks)	88

Dalam pelaksanaan kegiatan Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung, terjadi beberapa kali perubahan atau revisi Perjanjian Kinerja tahun 2020, yaitu:

1. Revisi Perjanjian Kinerja bulan Mei 2020, disebabkan perubahan alokasi anggaran Pangkalan PSDKP Bitung sebelumnya Rp54.435.595.000 menjadi Rp39.322.745.000, dengan rincian:
 - untuk mendukung pengembangan perikanan budidaya, maka dilakukan pergeseran anggaran Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp7.191.758.000 sebagaimana surat Sekretaris Ditjen PSDKP Nomor 05462/PSDKP.0.1.1/RC.200/II/2020 tanggal 28 Februari 2020 hal Relokasi Anggaran untuk Mendukung Kegiatan Prioritas Ditjen Perikanan Budidaya.
 - penghematan anggaran Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp7.558.093.000 sebagaimana surat Sekretaris Ditjen PSDKP Nomor 07888/PSDKP.0.1.1/RC.420/IV/2020 tanggal 9 April 2020 hal Revisi Anggaran dalam Rangka Perubahan Poster Anggaran KKP Tahun 2020.
 - penghematan anggaran Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp363.000.000 sebagaimana surat Sekretaris Ditjen PSDKP Nomor 08294//PSDKP.0.1.1/RC.420/IV/2020 tanggal 17 April 2020 hal Penghematan Anggaran Tahun 2020
2. Revisi Perjanjian Kinerja bulan September 2020, disebabkan perubahan target dan penambahan Indikator Kinerja baru pada PK UPT, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. Perubahan Target Indikator Kinerja Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020

Indikator Kinerja	Target 2020		Keterangan
	Semula	Menjadi	
Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	1,26%	0,75%	penghematan anggaran

Indikator Kinerja	Target 2020		Keterangan
	Semula	Menjadi	
Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	0,51%	0,204%	penghematan anggaran
Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	4 Unit	2 Unit	sebagaimana surat Direktur POA Nomor 02509/PSDKP.1/TU.210/I/2020 tanggal 29 Januari 2020 maka menindaklanjuti laporan hasil evaluasi kelaikan kapal pengawas, KP. Padaido dan KP. Todak 01 dinilai tidak laik untuk melakukan operasi pengawasan di laut
Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas	300 Unit	178 Unit	penghematan anggaran
Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	150 Hari Ops	100 Hari Ops	penghematan anggaran
Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	50 Hari Ops	26 Hari Ops	penghematan anggaran

Penambahan Indikator Kinerja baru pada Perjanjian Kinerja September 2020, semula 25 Indikator Kinerja menjadi 28 Indikator kinerja, yaitu:

Tabel 5. Penambahan Indikator Kinerja baru pada Perjanjian Kinerja September 2020

No	Indikator Kinerja	Target
1.	Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	100%
2.	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	100%
3.	Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	100%

3. Revisi Perjanjian Kinerja bulan November 2020, disebabkan penambahan Sasaran semula 8 Sasaran menjadi 14 Sasaran, dan pengurangan Indikator Kinerja dari 28 Indikator Kinerja menjadi 25 Indikator Kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 6. Pengurangan Indikator Kinerja bulan November 2020

Sasaran	
Sebelum	Menjadi
Terselenggaranya tindak lanjut atas laporan pengaduan POKMASWAS	Terselenggaranya tindak lanjut atas laporan pengaduan POKMASWAS
Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan

Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan
Terselenggaranya Pemantauan SDKP	Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan kapal pengawas
	Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat
	Terselenggaranya Pemantauan SDKP melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)
Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP	Terselenggaranya perawatan kapal pengawas
	Terselenggaranya perawatan speedboat pengawas
Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP	Terselenggaranya Operasi Kapal Pengawas
	Terselenggaranya Operasi speedboat Pengawas
	Tersedianya awak kapal pengawas perikanan yang memenuhi kualifikasi kesehatan
Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan	Terselenggaranya Penyidikan TPKP
	Terselenggaranya Penanganan Barbuk dan Awak Kapal
Tata kelola pemerintahan yang baik	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

Rincian pengurangan Indikator Kinerja tahun 2020, sebagai berikut:

Tabel 7. Rincian Perubahan Indikator Kinerja selama Tahun 2020

Indikator Kinerja	
Semula	Menjadi
Persentase tindak lanjut atas laporan pengaduan POKMASWAS lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Persentase tindak lanjut atas laporan pengaduan POKMASWAS lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP	Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP
Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

Jumlah <i>speedboat</i> yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Jumlah speedboat pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas
Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU fishing dan merusak SDKP di WPP-NRI Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan <i>speedboat</i>	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat pengawas
Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK	Nilai WBK Pangkalan PSDKP Bitung
Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
	Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung
Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	

Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	
Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	
Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Pangkalan PSDKP Bitung dibandingkan Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung TA. 2019	

2.5. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2020

Berpedoman pada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, dalam melakukan pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berjenjang dengan tahapan:

1. Melakukan perhitungan data mentah (*Raw Data*)
Perhitungan data mentah perhitungan atas objek yang diukur untuk memperoleh data realisasi IKU sesuai formula dalam manual IKU.
2. Menghitung realisasi IKU, Realisasi IKU merupakan hasil perhitungan data mentah berdasarkan formula dalam manual IKU, dengan memperhitungkan periode perhitungan IKU, dan pola perhitungan capaian.
3. Memasukan data realisasi IKU dan dokumen pendukungnya pada Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (*kinerjaku.kkp.go.id*).
4. Melakukan validasi data untuk memastikan bahwa data yang diinput valid, reliable, dan obyektif.
5. Menghitung capaian Nilai Kinerja Perspektif (NKP) dan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS).
6. Menyesuaikan maksimum pencapaian. Nilai maksimum pencapaian adalah 120% (untuk menghindari KPI *gaming*).
7. Mengarsipkan data dan dokumen pendukung capaian kinerja.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala melalui penyusunan laporan kinerja yang didukung dengan implementasi *Aplikasi Kinerjaku* yang merupakan *aplikasi* berbasis informasi teknologi.

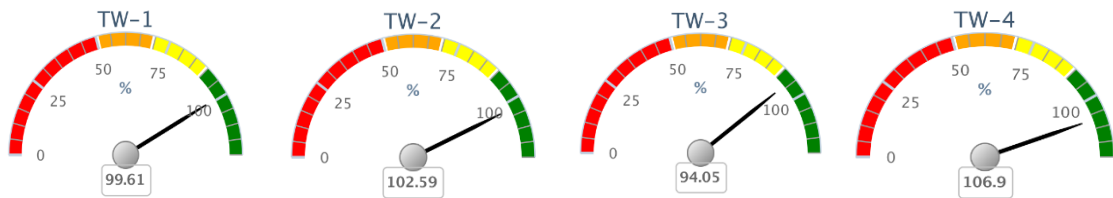
BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA DAN ANGGARAN

3.1. Capaian Kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung Tahun 2020

Hasil pengukuran kinerja Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020 berdasarkan Sistem Aplikasi Pengelola Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (kinerjaku.kkp.go.id) adalah 106,90 dengan rincian capaian per triwulan sebagai berikut:

Gambar 3. Rincian Capaian Kinerja per triwulan Tahun 2020



Capaian kinerja tahun 2019 sebesar 109,58% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja di tahun 2020 maka terdapat penurunan sebesar -2,68%. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja UPT sejenis maka berdasarkan paparan Sesditjen PSDKP, capaian kinerja Pangkalan PSDKP Bitung berada di urutan ke 5 (lima) dari 6 (enam) UPT Pangkalan lingkup Ditjen PSDKP, dengan urutan sebagai berikut: Pangkalan PSDKP Jakarta (110,31), Pangkalan PSDKP Tual (109,68), Pangkalan PSDKP Lampulo (108,37), Pangkalan PSDKP Batam (108,29), Pangkalan PSDKP Bitung (106,90), dan Pangkalan PSDKP Benoa (103,93).

Capaian Indikator Kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%
1. Terselenggaranya tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas	1. Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	70	100	120
2. Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	2. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Pelaku Usaha	55	92	120
3. Terselenggaranya pengawasan kepatuhan	3. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	%	100	100	100

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%
pemangku kepentingan perikanan	lingkup Pangkalan PSDKP Bitung				
4. Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan kapal pengawas	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	1,06	1,26	118,87
5. Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	0,2	0,51	120
6. Terselenggaranya Pemantauan SDKP melalui Sistem Pemantuan Kapal Perikanan (SPKP)	6. Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP	%	70	70	100
7. Terselenggaranya perawatan kapal pengawas	7. Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Unit	2	2	100
8. Terselenggaranya perawatan speedboat pengawas	8. Jumlah speedboat pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Unit	16	16	100
9. Terselenggaranya Operasi Kapal Pengawas	9. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas	Unit	178	197	110,67
	10. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Hari Operasi	100	100	100
	11. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat	Unit	360	759	120
10. Terselenggaranya Operasi speedboat Pengawas	12. Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Hari Operasi	25	28	112
11. Tersedianya awak kapal pengawas perikanan yang memenuhi kualifikasi kesehatan	13. Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Orang	40	40	100
12. Terselenggaranya Penyidikan TPKP	14. Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	100	90,63	90,63

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Capaian	%
13. Terselenggaranya Penanganan Barbuk dan Awak Kapal	15. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	93	94,44	101,55
	16. Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	93	95,45	102,63
14. Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	17. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan	Indeks	80	92,5	115,63
	18. Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	100	100	100
	19. Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	100	100	100
	20. Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	100	100	100
	21. Nilai WBK Pangkalan PSDKP Bitung	Nilai	75	80,4	107,2
	22. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Indeks	72	75,4	104,72
	23. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Nilai	90	92,54	102,82
	24. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	%	82	72,5	88,41
	25. Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	Indeks	88	94,33	107,19

(kinerjaku.kkp.go.id tanggal 15 Januari 2021)

Keterangan:



Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020, terdapat 1 (satu) indikator kinerja Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung yang tidak tercapai, yaitu IK24 24. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung dari target 82% hanya tercapai 72,5% (88,41%). Tidak tercapainya target indikator

kinerja ini disebabkan rendahnya tingkat keaktifan di level 3 Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung.

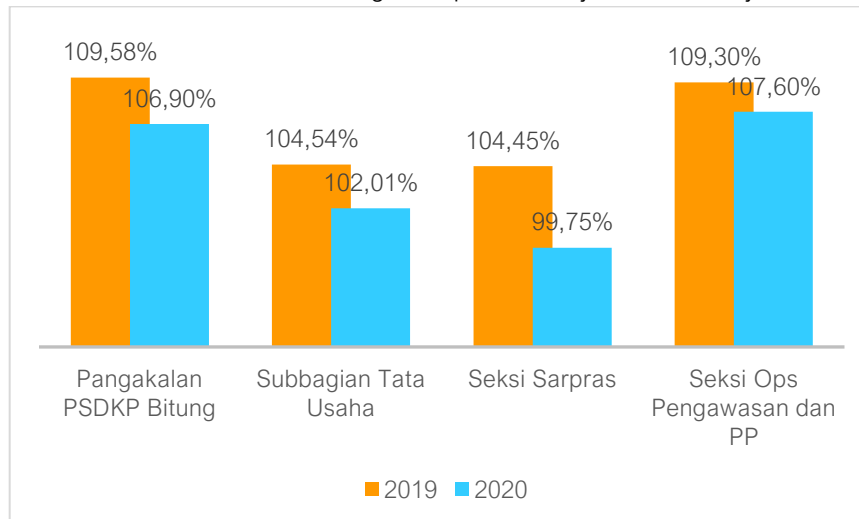
Capaian Indikator Kinerja Level 2 dan 4 Pangkalan PSDKP Bitung per triwulan tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Gambar 4. Capaian Indikator Kinerja Level 2 dan 4 Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020

TW-1	TW-2	TW-3	TW-4
PANGKALAN PSDKP BITUNG (PANGKALAN PSDKP BITUNG)			
99.61% 📈🟢	102.59% 📈🟢	94.05% 📈🟡	106.90% 📈🟢
SUBBAGIAN TATA USAHA (SUBBAGIAN TATA USAHA)			
99.99% 📈🟢	102.40% 📈🟢	102.25% 📈🟢	102.01% 📈🟢
SEKSI SARANA DAN PRASARANA (SEKSI SARANA DAN PRASARANA)			
98.08% 📈🟢	92.86% 📈🟢	80.00% 📈🟡	99.75% 📈🟢
SEKSI OPERASIONAL PENGAWASAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN (SEKSI OPERASIONAL PENGAWASAN DAN PENANGANAN PELANGGARAN)			
100.00% 📈🟢	106.04% 📈🟢	109.00% 📈🟢	107.60% 📈🟢

Jika dibandingkan dengan capaian Indikator Kinerja tahun 2019, maka capaian tahun 2020 cenderung mengalami penurunan. Capaian kinerja Kepala Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2019 adalah 109,58 pada tahun 2020 turun menjadi 106,90% (-2,68%), capaian kinerja Subbagian Tata Usaha tahun 2019 adalah 104,54% pada tahun 2020 turun menjadi 102,01 (-2,53%), capaian kinerja Seksi Sarana Prasarana tahun 2019 adalah 104,45% pada tahun 2020 turun menjadi 99,75% (-4,7%), dan capaian kinerja Seksi Operasional Pengawasan dan Penanganan Pelanggaran pada tahun 2019 adalah 109,30% pada tahun 2020 turun menjadi 107,60% (-1,7%).

Gambar 5. Perbandingan Capaian Kinerja Per Unit Kerja



Perbandingan capaian Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 9. Sandingan Target Rencana Strategis 2020-2024 dan Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Target Renstra	Capaian PK	%	Keterangan
1.	Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	70	70	100	Tercapai
2.	Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (pelaku usaha)	55	55	100	Tercapai
3.	Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100	100	100	Tercapai
4.	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	0,75	1,06	141,33	Melebihi target Renstra
5.	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	0,204	0,204	100	Tercapai
6.	Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)	70	70	100	Tercapai
7.	Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (unit)	2	2	100	Tercapai
8.	Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (unit)	16	16	100	Tercapai
9.	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	178	178	100	Tercapai
10.	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat (unit)	360	360	100	Tercapai
11.	Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (hari operasi)	150	100	66,67	revisi realokasi anggaran mendukung kegiatan prioritas
12.	Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (hari operasi)	50	25	50	revisi realokasi anggaran mendukung kegiatan prioritas
13.	Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (orang)	40	40	100	Tercapai
14.	Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100	100	100	Tercapai

No	Indikator Kinerja	Target Renstra	Capaian PK	%	Keterangan
15.	Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93	93	100	Tercapai
16.	Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93	93	100	Tercapai
17.	Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Indeks)	72	72	100	Tercapai
18.	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	82	82	100	Tercapai
19.	Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100	-		IK pada PK per November 2020 dihapus
20.	Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100	100	100	Tercapai
21.	Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100	100	100	Tercapai
22.	Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100	100	100	Tercapai
23.	Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (unit kerja)	1	75		IK pada PK per November 2020 dihapus
24.	Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100	-		IK dihapus
25.	Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100	-		IK dihapus
26.	Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan (Indeks)	80	80	100	Tercapai
27.	Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	88	88	100	Satuan IK pada PK semula nilai menjadi indeks
28.	Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Pangkalan PSDKP Bitung dibandingkan Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung (%)	1	-		IK pada PK per November 2020 dihapus

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis terhadap pencapaian kinerja di Pangkalan PSDKP Bitung dilakukan pada setiap Sasaran Strategis di masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU), bertujuan untuk menjelaskan secara rinci jenis kegiatan yang mendukung tercapainya atau tidak tercapainya suatu kegiatan, disertai dengan kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka pencapaian target kinerja, sekaligus mencoba membandingkan capaian kinerja tahun ini

dengan tahun sebelumnya. Analisis capaian kinerja tahun 2020 Pangkalan PSDKP Bitung diuraikan sebagai berikut:

Sasaran Strategis (SS1) :

Terselenggaranya tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas

SS1 di dukung dengan satu indikator kinerja yaitu IK1 - Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Target SS1 pada tahun 2020 adalah 70%, tercapai 100% dengan persentase capaian sebesar 120%.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya SS1 adalah Rp12.600.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp12.200.000 atau 96,83%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SS1 sebesar 99,03% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SS1 tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SS1 telah terlaksana menggunakan seluruh alokasi anggaran.

IK1 - Persentase tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

Realisasi capaian kinerja IK1- Persentase tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada tahun 2020 sebesar 100% dari target 70% yang diperoleh dari laporan pengaduan POKMASWAS yang telah ditindaklanjuti. Perhitungan Laporan pengaduan Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung selama tahun 2020 yang telah ditindaklanjuti, yaitu:

1. Laporan masyarakat pada tanggal 07 Agustus 2020 oleh Tommy Sumual dan tanggal 08 Agustus 2020 oleh Anes Tamburian terkait Kapal Tongkang Pengangkut Batu Bara yang kandas di Perairan Pantai Mobongo, Kelurahan Kawangkoan Bawah, Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan yang menyebabkan terjadinya kerusakan terumbu karang. Laporan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Polsus PW3K Pangkalan PSDKP Bitung Bersama BPSPL Makassar Wilker Manado pada tanggal 10 Agustus 2020 dengan melakukan Pulbaket di lokasi kejadian dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
 - Kejadian terdamparnya kapal Tongkang Malayka 3002 pada hari Jumat, 7 Agustus 2020 pukul 14:00 WITA yang berada pada koordinat: 1°12'19" LU dan 124°32'56" BT
 - Jenis muatan Kapal Tongkang Malayka 3002 berisi batubara yang berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur
 - Kondisi dasar perairan sekitar terdamparnya Kapal Tongkang Malayka 3002 bersubstrat karang dengan kedalaman ± 3 meter dan kondisi keruh
 - Berdasarkan informasi masyarakat selaku Kepala Jaga IV (Bapak Tommy Sumual) bahwa kapal tongkang tersebut terdampar pada tanggal 7 Agustus 2020 pukul 14:00 Wita akibat arus surut
 - Berdasarkan informasi saksi dilapangan (Bapak Anes Tamburian), kapal tersebut awalnya sedang melakukan menunggu kegiatan bongkar muat material batubara di

Terminal Khusus (Tersus) PLTU Moinit Bulu dengan muatan 6000 ton. Namun karena arus pasang surut, Kapal Tongkang Malayka 3002 ditarik kembali ke arah laut padahal kondisi arus surut.

- Dapat dilihat kerusakan terumbu karang di lokasi, namun masih perlu penelusuran lebih lanjut untuk menentukan arah tindak lanjut dengan berkoordinasi dengan instansi terkait.
2. Laporan dari Dinas Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah terkait adanya kegiatan *destructive fishing* menggunakan bom ikan di Perairan Desa Umbele Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali. Telah ditindaklanjuti oleh Satwas SDKP Kendari dengan melakukan Pulbaket dengan hasil sebagai berikut:
- Telah diamankan satu orang yang diduga melakukan kegiatan *destructive fishing* menggunakan bom ikan.
 - Posisi penangkapan berada di titik koordinat 03°02'27,3784"S 122°31'4,59401"E yaitu di Perairan Paninbawang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali dan laut sekitarnya.
 - Pelaku dan barang bukti diamankan di Desa Umbele kemudian di bawa ke Dinas Perikanan Kabupaten Morowali untuk di proses lebih lanjut.

Indikator Kinerja Persentase tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung merupakan IKU baru yang ditambahkan pada tahun 2020 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IK1 adalah Rp12.600.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp12.200.000 atau 96,83%.

Sasaran Strategis (SS2) :

Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan

SS2 di dukung dengan satu indikator kinerja yaitu IK2 - Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Target SS2 pada tahun 2020 adalah 55 pelaku usaha, tercapai 92 pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya dengan persentase capaian sebesar 120%.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya SS2 adalah Rp585.840.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp 565.238.400 atau 96,48%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SS2 sebesar 99,42% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SS2 tercapai sesuai target.

IK2 - Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

Capaian kinerja IK2 - Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung adalah agregasi (penjumlahan) dari hasil capaian 7 (tujuh) kegiatan pengawasan sumber daya kelautan, meliputi:

1. Pengawasan pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung;

2. Pengawasan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung;
3. Pengawasan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung;
4. Pengawasan Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung;
5. Pengawasan Pelaku usaha pengelolaan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung;
6. Pengawasan Pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; dan
7. Pengawasan pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan Destructive Fishing lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

Tabel 10. Capaian Kegiatan Pendukung IK2 - Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020

No	Nama Kegiatan	Target 2020	Capaian 2020	% Capaian
1.	Pengawasan pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional	2	2	100
2.	Pengawasan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites	3	3	100
3.	Pengawasan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan	13	17	120
4.	Pengawasan pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	6	8	120
5.	Pengawasan pelaku usaha pengelolaan ruang laut	2	4	120
6.	Pengawasan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya	14	24	120
7.	Pengawasan pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan Destructive Fishing	15	34	120
TOTAL		55	92	120

Target pelaku usaha tahun 2020 sebanyak 55 pelaku usaha terealisasi sebanyak 92 pelaku usaha dengan persentase capaian 120%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebesar 113,48% maka terjadi kenaikan persentase capaian kinerja sebesar 6,52%.

Berdasarkan hasil sinkronisasi data capaian kinerja dengan Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan terdapat koreksi hasil capaian IKU ini yang semula 92 pelaku usaha menjadi 84 pelaku usaha, dikarenakan perbaikan hasil capaian pada 3 kegiatan pengawasan sumber daya kelautan, meliputi: Pengawasan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan; Pengawasan Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan Pengawasan Pelaku usaha perikanan dan non

perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya. Adapun rincian hasil sinkronisasi data capaian kinerja IKU ini dengan Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan, adalah sebagai berikut:

- Capaian pengawasan pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional sebanyak 2 pelaku usaha;
- Capaian pengawasan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites sebanyak 3 pelaku usaha;
- Capaian pengawasan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan semula 17 pelaku usaha menjadi 13 pelaku usaha;
- Capaian pengawasan Pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil semula 8 pelaku usaha menjadi 7 pelaku usaha;
- Capaian pengawasan Pelaku usaha pengelolaan ruang laut sebanyak 4 pelaku usaha;
- Capaian pengawasan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya semula 24 pelaku usaha menjadi 21 pelaku usaha; dan
- Capaian pengawasan pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan Destructive Fishing sebanyak 34 pelaku usaha.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IK2 - Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung adalah Rp585.840.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp565.238.400 atau dengan persentase penyerapan anggaran 96,48%.

Rincian capaian kegiatan pendukung kinerja IK2 - Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020, adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya

Kawasan Konservasi Perairan atau sering disingkat dengan KKP menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan.

Penetapan KKP sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan didasarkan kepada tiga kriteria utama yaitu: 1) ekologi, meliputi keanekaragaman hayati, kealamiahannya, keterkaitan ekologis, keterwakilan, keunikan, produktivitas, daerah ruaya, habitat ikan langka, daerah pemijahan ikan, dan daerah pengasuhan; 2) sosial dan budaya, meliputi tingkat dukungan masyarakat, potensi konflik kepentingan, potensi ancaman, kearifan lokal serta adat istiadat; dan 3) ekonomi, meliputi nilai penting perikanan, potensi rekreasi dan pariwisata, estetika, dan kemudahan mencapai kawasan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa ditetapkannya suatu kawasan sebagai KKP tidak serta-merta melarang aktifitas mata pencaharian masyarakat yang misalnya bergantung kepada sumber daya laut, konsep konservasi dalam KKP lebih menekankan aspek pengelolaan yang berkelanjutan.

Konsep KKP yaitu melindungi suatu kawasan perairan yang memiliki karakteristik tertentu dengan menggunakan sistem zonasi. Idealnya pembagian zonasi dalam sebuah kawasan konservasi perairan terbagi menjadi 4 zona yaitu zona inti, zona perikanan berkelanjutan, zona pemanfaatan, dan zona lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2007 Pasal 17 ayat 4 dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 17 tahun 2008 Pasal 32, suatu kawasan konservasi perairan dapat didistribusikan peruntukan (pemanfaatan) ruangnya ke dalam 4 (empat) zona, meliputi:

- a. Zona Inti, merupakan area yang memiliki fungsi lindung serta wajib dimiliki oleh setiap kawasan konservasi; Pada area ini tidak diperkenankan adanya kegiatan pemanfaatan secara langsung/membawa keluar setiap sumber daya hayati dan lingkungannya yang ada kecuali kegiatan penelitian dan pengembangan serta pendidikan untuk kepentingan konservasi;
- b. Zona Perikanan Berkelanjutan, merupakan area yang memiliki fungsi budidaya (pemanfaatan) untuk kegiatan perikanan; Pada area ini diperkenankan adanya kegiatan perikanan tangkap yang mengutamakan perlindungan kondisi habitat sumber daya ikan dan siklus pengembangbiakan jenis ikan atau berdasarkan pada adat istiadat yang mengedepankan kearifan lokal. Pada area ini juga diperkenankan pembudidayaan ikan yang mempertimbangkan daya dukung dan kondisi lingkungan sumber daya ikan terhadap pemilihan jenis ikan yang dibudidayakan, manajemen pakan, teknologi dan skala usaha;
- c. Zona Pemanfaatan, merupakan area yang memiliki fungsi budidaya (pemanfaatan) diluar kegiatan perikanan mencakup kegiatan penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pariwisata bahari yang mengutamakan perlindungan kondisi habitat sumber daya ikan dan siklus pengembangbiakan jenis ikan;
- d. Zona Lainnya, merupakan area yang memiliki fungsi budidaya (pemanfaatan) terbatas sesuai dengan potensi yang ada dan diluar kegiatan-kegiatan yang telah dinyatakan sebelumnya yang mengutamakan perlindungan kondisi habitat sumber daya ikan dan siklus pengembangbiakan jenis ikan.

Indonesia mencanangkan memiliki kawasan konservasi perairan seluas 20 juta hektar pada tahun 2020. Sampai saat ini telah tercatat sekitar 15 juta Ha kawasan konservasi baik nasional maupun daerah dan terus dilakukan upaya untuk meningkatkan jumlah luas tersebut. Keberadaan kawasan konservasi perairan sangat penting untuk menjaga jenis dan stok sumber daya ikan agar tetap lestari. Untuk menjamin kelangsungan dan kelestarian sumber daya ikan di kawasan konservasi perairan tersebut sudah dibuat berbagai aturan yang membatasi kegiatan manusia di kawasan konservasi perairan. Meningkatnya berbagai aktifitas manusia secara berlebihan seringkali tidak memperhatikan aturan yang dilakukan di dalam kawasan konservasi. Oleh sebab itu, setiap bentuk pemanfaatan kawasan konservasi perairan harus dilakukan pengawasan agar dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

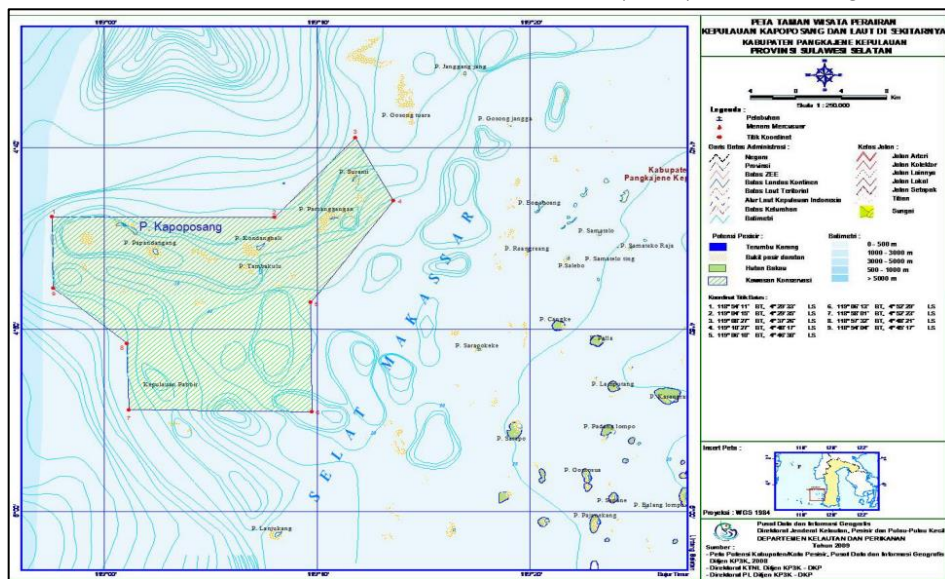
Pada tahun 2019, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan memiliki target 17 (tujuh belas) jumlah kawasan konservasi yang dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Taman Wisata Perairan Gili Matra (NTB)
2. Taman Nasional Perairan Laut Sawu (NTT)

3. Taman Wisata Perairan Kapoposang (Selawesi Selatan)
4. Taman Wisata Perairan Pulau Pieh (Sumatera Barat)
5. Taman Wisata Perairan Anambas (Kepulauan Riau)
6. SAP Raja Ampat (Papua Barat)
7. SAP Waigeo (Papua Barat)
8. SAP Aru Bagian Tenggara (Maluku)
9. Taman Wisata Perairan Padaido (Papua)
10. Taman Wisata Laut Banda (Maluku)
11. Taman Nasional Karimun Jawa
12. Taman Nasional Laut Bunaken
13. Taman Nasional Laut Wakatobi
14. Taman Nasional Laut Takabonerate
15. Taman Nasional Teluk Cendrawasih
16. Taman Nasional Laut Togean
17. Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu

Angka 1 s/d 10 merupakan kawasan konservasi yang dikelola oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan angka 11 s/d 17 merupakan kawasan konservasi yang menurut rencana akan diserahkan pengelolaannya oleh Kementerian Kehutanan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Gambar 6. Peta Taman Wisata Perairan (TWP) Kapoposang



Pengawasan kawasan konservasi perairan dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan sebagaimana Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 47 tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan. Salah satu Kawasan Konservasi Perairan yang masuk dalam wilayah kerja Pangkalan PSDKP Bitung yaitu Taman Wisata Perairan Kapoposang di Kabupaten Pangkep Provinsi Sulawesi Selatan. Tahun 2020 Pangkalan PSDKP Bitung mendapat target pengawasan 2 (dua) pelaku usaha yang memanfaatkan Kawasan Konservasi Perairan.

TWP Kapoposang terletak di Provinsi Sulawesi Selatan berada di WPP 713 dan EL 8 dengan luasan 50.000 ha, dasar hukum pengelolaan di atur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 66 tahun 2009 tanggal 3 Agustus 2009, TWP Kapoposang telah dialihkan ke KKP dengan BA Nomor: BA.01/Menhut-IV/2009 dan Nomor: BA.108/ Men.KP/III/2009. Potensi TWP Kapoposang terdiri dari: terumbu Karang, ikan hias, penyu, molusca, lumba-lumba, vegetasi pantai dan mangrove, berbagai spot penyelaman, penyu.

Hasil pelaksanaan pengawasan pelaku usaha di TWP Kapoposang tahun 2020 oleh Satwas SDKP Makassar dan Wilker PSDKP Pangkep, sebagai berikut:

1) Pengawasan di TWP Kapoposang pada tanggal 27 – 29 Juli 2020

- Mursalin merupakan pelaku usaha penangkapan ikan menggunakan kapal berukuran <5 GT yang diperiksa pada 27 Juli 2020 pukul 11:30 WITA di Pulau Kapoposang pada koordinat 4°42'6.85"S 118°57'49.04"T. Hasil pengawasan terhadap pelaku usaha tersebut yaitu kapal yang digunakan untuk kegiatan penangkapan ikan belum memiliki surat BPKP (Bukti Pencatatan Kapal Perikanan) sehingga TDKPI (Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan) yang di keluarkan oleh UPT Pengelola Kawasan Konservasi Perairan belum ada yang terbit. Alat tangkap ikan yang digunakan adalah pancing/handline dan Rumpon hanyut (untuk memanen telur Ikan terbang).
- pengawasan kegiatan penelitian di Kawasan Konservasi TWP Kapoposang bulan ini tidak ada.
- pengawasan kegiatan pendidikan di Kawasan Konservasi TWP Kapoposang bulan ini tidak ada.
- pengawasan kegiatan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi TWP Kapoposang ada beberapa karcis masuk kawasan konservasi perairan yang dikeluarkan oleh UPT Pengelola Kawasan Konservasi TWP Kapoposang, seperti Karcis Diving.
- pengawasan kegiatan Rehabilitasi di Kawasan Konservasi TWP Kapoposang berupa penanaman mangrove dan teransplantasi karang.
- pengawasan kegiatan budidaya ikan di Kawasan Konservasi TWP Kapoposang belum ada. Tetapi ada 4 unit keramba jaring apung yang belokasi di Pulau Kappoposang yang di manfaatkan nelayan sebagai tempat menampung sementara ikan hidup kerapu / sunu kemudian dijual untuk kebutuhan ekspor.
- pengawasan kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan di kawasan konservasi TWP kapoposang belum memiliki Surat izin pengusahaan pariwisata alam perairan (sippap). Hasil pengawasan di lapangan ada 3 home stay yang ada di Pulau Kapoposang, sudah tidak beroperasi.

2) Pengawasan di TWP Kapoposang pada tanggal 16 – 19 Oktober 2020

- Ambo Masse merupakan pelaku usaha penangkapan ikan menggunakan kapal berukuran <5 GT yang diperiksa pada 16 Oktober 2020 pukul 10:10 WITA di Pulau Kapoposang pada koordinat 4°42'5.72"S 118°57'54.13"T. Hasil pengawasan terhadap pelaku usaha tersebut yaitu kapal yang digunakan untuk kegiatan penangkapan ikan belum memiliki surat BPKP (Bukti Pencatatan Kapal Perikanan) sehingga TDKPI (Tanda Daftar Kegiatan Penangkapan Ikan) yang di keluarkan oleh UPT Pengelola Kawasan Konservasi Perairan belum ada yang terbit. Alat tangkap

ikan yang digunakan adalah pancing/handline dan Rumpon hanyut (untuk memanen telur Ikan terbang).

- Hasil pengawasan kegiatan penelitian di Kawasan Konservasi TWP Kapoposang saat ini tidak ada.
- Hasil pengawasan kegiatan pendidikan di Kawasan Konservasi TWP Kapoposang saat ini tidak ada.
- Hasil pengawasan kegiatan pariwisata alam perairan di Kawasan Konservasi TWP Kapoposang bulan ini tidak ada karcis hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran untuk membayar karcis masuk Kawasan Konservasi TWP Kep. Kapoposang. Selain itu masih kurangnya pengetahuan masyarakat dan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan (para pengusaha pariwisata) terkait pembayaran karcis masuk Kawasan Konservasi TWP Kep. Kapoposang.
- Hasil pengawasan kegiatan Rehabilitasi di Kawasan Konservasi TWP Kapoposang bulan ini berupa teransplantasi karang.
- Hasil pengawasan kegiatan budidaya ikan di Kawasan Konservasi TWP Kapoposang bulan ini belum ada. Tetapi ada 3 unit keramba jaring apung yang berlokasi di Pulau Kappoposang yang di manfaatkan nelayan sebagai tempat menampung sementara ikan hidup kerapu / sunu kemudian dijual untuk kebutuhan ekspor.
- Hasil pengawasan kegiatan Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan di kawasan konservasi TWP kapoposang belum memiliki Surat izin pengusahaan pariwisata alam perairan (SIPPAP). Hasil pengawasan di lapangan ada 3 home stay yang ada di Pulau Kapoposang, sudah tidak beroperasi.

Target capaian pengawasan pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya di Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020 sebanyak 2 pelaku usaha, realisasi capaian sebanyak 2 pelaku usaha sehingga persentase capaian sebesar 100%. Capaian pengawasan pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019, disebabkan perbedaan satuan pengukuran capaian yaitu tahun 2019 menggunakan satuan output Kawasan sedangkan pada tahun 2020 menggunakan satuan output adalah pelaku usaha.

Alokasi anggaran untuk mendukung pengawasan pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional tahun 2020 adalah Rp50.000.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 46.708.200 atau dengan persentase penyerapan anggaran 93,42%.

2. Pengawasan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan pengawasan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi sebagai berikut:

- 1) PT. Toloan Palu Sulawesi Tengah (Ridwan Abas) di desa Moutong Timur, Kec.Moutong, Kab.Parigi Moutong, Sulawesi Tengah yang memanfaatkan bambu laut yang merupakan jenis ikan yang dilindungi penuh berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NOMOR 8/KEPMEN-KP/2020 tentang Perlindungan Penuh Bambu Laut (*Isis spp.*) tanggal 13 Januari 2020. Pelaku usaha ini masih memiliki izin yang berlaku saat Keputusan Menteri KP tersebut terbit sehingga saat pengawasan oleh Pengawas

perikanan Wilker PSDKP Donggala masih menemukan Bambu Laut dalam 1 container 20 feet berisi 18 ton 422 karung, 1 karung > 4650 kg dalam kondisi kerang terpotong-potong. Pengawas perikanan juga memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha terkait KEPMEN KP Nomor 8 Tahun 2020 dan rekomendasi kepada Dinas Perikanan daerah untuk mencabut atau membekukan izin terkait penerbitan SIUP tersebut.

- 2) PT. Rohtadi di Manado Sulawesi Utara merupakan perusahaan pengolahan ikan (Sirip Hiu Kering), dokumen perizinan pada perusahaan ini lengkap dan sesuai. Hasil olahan merupakan jenis ikan dilindungi secara terbatas sesuai dengan kuota yang ditetapkan oleh BKSDA. Pada saat pengawasan dilakukan juga Identifikasi jenis ikan Hiu yang dimanfaatkan siripnya. Hasil identifikasi diketahui jenis hiu yang dimanfaatkan, yaitu Lanjaman 6000 kg, Hiu Putih 2000 kg, Hiu Korea (2) 6000 kg, Kiker 2000 kg dan sebagian produk masih menunggu kuota dari BKSDA.
- 3) CV. Sumber Bahari Mandiri di Kota Makassar Sulawesi Selatan merupakan unit usaha dibidang pengumpul, penampung, pengolahan dan pemasaran Teripang, Rumput Laut, Perut Ikan, Sirip Ikan Hiu, Abalone dan Kerang yang merupakan jenis ikan dilindungi secara terbatas. Perusahaan ini memiliki dokumen izin usaha perikanan (SIUP) dan saat SIPI masih dlm proses pengurusan. Pengawas Perikanan Satwas PSDKP Makassar ketika melakukan pengawasan pada perusahaan tersebut, ditemukan stok sirip hiu kering ± 300 kg, kuda laut ± 5 kg, Teripang ± 7 ton yang merupakan stock tahun 2019.

Selain kegiatan pengawasan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan yang dilindungi, UPT Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung juga melaksanakan kegiatan penanganan mamalia/ikan terdampar, sebagai berikut:

- Penanganan ikan paus terdampar di Pesisir Pantai Desa Tolotio Kecamatan Bone Pantai Kabupaten Bone Bolango Gorontalo pada tanggal 4 Januari 2020. Kegiatan penanganan ikan Paus Pilot terdampar yang dilakukan Tim Satwas PSDKP Gorontalo bersama Dinas KP Provinsi Gorontalo, Dinas KP Kab. Bone Bolango, dan Polair Gorontalo dengan cara mengubur bangkai Paus di pesisir Pantai Tolotio namun terlebih dahulu memotong bangkai Paus menjadi 4 bagian untuk memudahkan dalam pelaksanaan. Hasil identifikasi Paus Pilot berjenis kelamin jantan, dengan ukuran: Panjang keseluruhan 4,80 cm, Lebar lingkaran perut 2,40 cm, Lingkaran kepala 180 cm, Berkelamin jantan, Sirip atas lebar 40 cm, panjang 90 cm, Sirip bawah lebar 24 cm, panjang 90 cm, Berat sekitar ± 2 ton.
- Pengamatan hiu paus di Perairan Laut Desa Botu Barani Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango pada tanggal 10 Februari 2020. Dari hasil pengamatan terdapat 3 (tiga) ekor Hiu Paus yang terpantau muncul ke permukaan laut, dan dalam kondisi baik. Hasil identifikasi Paus Pilot berjenis kelamin jantan, dengan ukuran: Panjang keseluruhan 800 cm dan Lebar lingkaran perut 90 cm.
- Pelepasliaran penyu hijau di Perairan Laut Desa Tonyaman Kecamatan Binuang Kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat pada tanggal 21 Maret 2020. Polsus PWP3K Wilker PSDKP Polewali Mandar menerima informasi bahwa ada seekor penyu yang terjebak di saluran air milik warga desa pada saat air laut pasang. Langkah tindak lanjut dari Polsus PWP3K melakukan identifikasi dan pengukuran terhadap jenis penyu tersebut dan diketahui jenis penyu hijau, selanjutnya bersama dengan warga penyu tersebut dilepasliarkan ke perairan laut. Polsus PWP3K juga melakukan sosialisasi kepada warga terkait jenis ikan yang dilindungi termasuk didalamnya adalah jenis penyu hijau.

- Penanganan penyu belimbing di Pesisir Pantai Desa Kelurahan Luntio, Kabupaten Banggai Sulawesi Tengah pada tanggal 31 Maret 2020. Menindaklanjuti unggahan warga di media sosial, maka tim gabungan (Wilker PSDKP, SKIPM, dan BKSDA Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah) setelah berkoordinasi, bersama sama menuju lokasi di Kelurahan Luntio Baru dan didapati penyu masih berada tidak jauh dari pinggir pantai. Penyu secara tidak sengaja terjaring oleh nelayan bernama Ahmad Pangkatan dengan jenis alat tangkap jaring insang (*gill net*) yang ditebar sepanjang ±300 meter di perairan Selat Peling, namun saat akan mengambil hasil tangkapan ditemukan seekor penyu yang sudah terlilit pada jaring dan sangat sulit untuk dilepaskan. Melihat ukuran penyu yang besar dan ukuran perahu katinting yang kecil yang dapat membahayakan nyawa karena beroperasi seorang diri maka nelayan tersebut mengambil langkah dengan menarik penyu menuju pantai dengan waktu tempuh setengah jam yang mengakibatkan penyu tersebut mati.
- Evakuasi dugong pesisir Pantai Desa Lalos Kecamatan Galang, Kabupaten Toli Toli, Sulawesi Tengah pada tanggal 5 April 2020. Ditemukan jenis ikan Duyung (Dugong) yang merupakan jenis ikan di lindungi dalam keadaan mati di pesisir pantai Desa Lalos. Hasil identifikasi: panjang 314 cm, diameter 210 cm, berjenis kelamin jantan, kondisi tubuh Dugong terdapat 38 luka tusukan yang tidak diketahui penyebabnya namun di indikasi luka diakibatkan oleh tombak nelayan yang tidak bertanggungjawab, selanjutnya dilakukan evakuasi dengan cara di kubur.
- Evakuasi lumba-lumba di pantai Sebelah Selatan Takalar pada tanggal 10 Juni 2020. Ditemukan jenis ikan lumba-lumba di yang terdampar di pantai sebelah selatan Satwas PSDKP Takalar oleh POKMASWAS Sitallasi (Japar), dan dilaporkan ke Pengawas Perikanan Satwas PSDKP Takalar. Setelah diidentifikasi diperoleh data jenis ikan lumba-lumba 1 ekor dengan jenis gigi kasar berukuran panjang 256 cm, lebar 187 cm, dengan berat 250 Kg dalam kondisi mati. Selanjutnya lumba-lumba di evakuasi dengan cara di kuburkan.
- Pengawasan ikan hiu paus (*Rhyncodon Typus*) oleh Satwas SDKP Gorontalo tanggal 24 April 2019. Pengawasan wisata hiu paus yang di kelola oleh Masyarakat Konservasi Orcha di Desa Botu Barani Kecamatan Kabila Bone Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Melakukan pengamatan jenis ikan hiu paus (*Rhyncodon Typus*) yang muncul di permukaan perairan laut sebanyak 3 (tiga) ekor, diperkirakan panjang ikan berkisar antara 6 sampai 7 meter. Fasilitas air agak keruh, namun kondisi ikan bergerak bebas dan lincah. wisata hiu paus bersifat tidak menetap dan di kelola oleh Masyarakat Konservasi Orcha, sehingga tidak memiliki izin pengelolaan.

Target capaian pengawasan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau *Apendiks Cites* yang diperiksa kepatuhannya di Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020 sebanyak 3 pelaku usaha, realisasi capaian sebanyak 3 pelaku usaha sehingga persentase capaian sebesar 100%. Capaian pengawasan pelaku usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau *Apendiks Cites* tahun 2020 tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2019, disebabkan perbedaan satuan pengukuran capaian yaitu tahun 2019 menggunakan satuan output jenis ikan sedangkan pada tahun 2020 menggunakan satuan output adalah pelaku usaha.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini sebesar Rp45.000.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp44.072.400, dengan persentase realisasi anggaran 97,94%.

3. Pengawasan pelaku usaha pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya

Kegiatan pengawasan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020 meliputi pengawasan pelaku usaha pasir (laut, granit, timah) dan SDNH lainnya, pengawasan pelaku usaha wisata bahari, dan pengawasan pengelolaan benda berharga muatan kapal tenggelam (BMKT), dengan rincian pencapaian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 11. Capaian Jumlah Pelaku Usaha Pengelolaan Produk dan Jasa Kelautan

Kegiatan	2019		2020		
	Target Riksa (Pelaku Usaha)	Realisasi (Pelaku Usaha)	Target Riksa (Pelaku Usaha)	Realisasi (Pelaku Usaha)	% Capaian
Pengawasan Pelaku Usaha Pasir (Laut, granit, Timah) dan SDNH Lainnya	3	3	3	3	100
Pengawasan Pelaku Usaha Wisata Bahari	19	20	10	14	120

Target pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa tahun 2020 sebanyak 13 pelaku usaha terealisasi sebanyak 17 pelaku usaha dengan persentase capaian 120%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 jumlah pelaku usaha yang diperiksa sebanyak 25 pelaku usaha, hal ini menunjukkan terdapat penurunan jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya. Penurunan capaian disebabkan karena turunnya target capaian output pelaku usaha produk dan jasa kelautan yang diperiksa dan alokasi anggaran di tahun 2020. Walaupun demikian dari sisi persentase capaian mengalami kenaikan dari 104,17% pada tahun 2019 menjadi 120% pada tahun 2020.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pelaku usaha pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020 sebesar Rp119.110.000, terealisasi sebesar Rp116.704.600 atau dengan persentase penyerapan anggaran 97,98%.

Hasil kegiatan pengawasan pelaku usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya di Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, sebagai berikut:

a. Pengawasan Pelaku Usaha Pasir (Laut, granit, Timah) dan SDNH Lainnya

Target pengawasan pengelolaan pasir laut tahun 2020 sebanyak 3 pelaku usaha yang taat terhadap peraturan yang berlaku. Pengawasan terhadap perusahaan pasir laut dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PSDKP nomor: KEP.57/DJ-PSDKP/2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Perusahaan Pasir Laut, dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan usaha pertambangan pasir laut milik PT. Kulaka Jaya Perkasa oleh Wilker PSDKP Mamuju Utara yang berlokasi Desa Bambakoro Kecamatan Lariang, Kabupaten Pasangkayu pada titik koordinat 01°24'57" S 119°17'17,4" E, dengan rincian kegiatan:
 - PT. Kulaka Jaya Perkasa dalam melakukan kegiatan usaha dilengkapi dengan dokumen perizinan antara lain Izin Lokasi nomor 660/235/KPTS/BLH dan Izin Usaha nomor 058/TDP/P/20/02-a.01/III-2018/ DPMPTSP, izin usaha pertambangan 540/01.1/VII/IUP/2014/KPTSP&PMD.
 - Penambangan pasir menyebabkan abrasi di muara sungai Lariang Desa Lariang yang mengakibatkan rusaknya mangrove, pemukiman dan perkebunan masyarakat juga terancam abrasi walaupun tidak mengakibatkan kematian organisme perairan. Penambangan pasir ini juga diduga mengganggu ekosistem ikan sidat, sehingga jarang lagi ditemukan/ditangkap nelayan.
 - Perlu adanya rehabilitasi pesisir di area pertambangan pasir, Kegiatan diusahakan pada bagian tengah muara sungai dan menjaga ekologi dan lingkungan yang ada di muara sungai Lariang Desa Bambakoro Pengawasan pemanfaatan pelaku usaha pasir laut pada triwulan II tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2020 di PT. Kulaka Jaya Perkasa Desa Bambakoro Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu.
- 2) Pengawasan usaha tambang pasir sungai milik CV. Maju Bersama oleh Wilker PSDKP Mamuju Utara yang berlokasi di Sungai Dusun Kalindu Desa Bambakoro Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu pada titik koordinat 01°24'47"S 119°17'34" E, dengan rincian kegiatan:
 - CV. Maju Bersama dalam melakukan kegiatan usaha dilengkapi dengan dokumen perizinan antara lain Izin Lokasi nomor 188.4/580/SULBAR/X/2016 dan Izin Usaha nomor 503/95/SITU/P/1/02.a.01/III-2017DPMPTSP.
 - Penambangan pasir menyebabkan abrasi di muara sungai Lariang Bambakoro Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu yang mengakibatkan rusaknya mangrove, juga pemukiman dan perkebunan masyarakat terancam abrasi. Penambangan pasir ini juga diduga mengganggu ekosistem ikan sidat, sehingga jarang lagi ditemukan/ditangkap nelayan.
 - Perlu adanya rehabilitasi pesisir di area pertambangan pasir, Kegiatan diusahakan pada bagian tengah muara sungai dan menjaga ekologi dan lingkungan yang ada di muara sungai Lariang Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya. Pengawasan pemanfaatan pelaku usaha pasir laut pada triwulan II tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2020 di CV. Maju Bersama Dusun Kalindu Desa Bambakoro Kecamatan Lariang Kabupaten Pasangkayu.
- 3) Satwas SDKP Takalar melakukan pengawasan usaha garam milik CV. Kristal Garamindo di Campagaya, Desa Boronglamu Kecamatan Arungkeke, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan di titik koordinat 5°39'29.9" S 119°49'35.5" E, dengan rincian kegiatan:
 - CV. Kristal Garamindo melakukan kegiatan usaha pengolahan dan penjualan Garam konsumsi beryodium dilengkapi dengan dokumen perizinan antara lain Izin Usaha Perdagangan 0200/20-17/SIUP-CV/UM/IX/2017, Sertifikat SNI 28/BPPI/LSP Pro BBHIP/VII/2018, dan izin edar Pangan Olah (BPOM) PN.06.05.52.12.18.2016.PKPE/MD/0234.

- Dari hasil pengawasan dilapangan, kegiatan tidak menimbulkan kerusakan ekosistem perairan, tidak menimbulkan kerugian terhadap mesayarakat sekitar lokasi, dan tidak menimbulkan pencemaran perairan dan abrasi pantai.
- Menyampaikan kepada pelaku usaha untuk melaksanakan kegiatan pengolahan garam sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terkait pelaksanaan pengawasan pelaku usaha penambangan pasir, saran yang diberikan antara lain:

- Melengkapi dokumen perizinan dan dokumen pendukung lainnya serta melakukan kegiatan berdasarkan izin yang dimiliki.
- Aktivitas pengelolaan tersebut harus lebih memperhatikan dan menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungan, pemukiman yang terdapat didekat usaha eksplorasi serta hubungan sosial dengan para pelaku usaha, dengan pemerintah setempat, masyarakat setempat serta terhadap pihak-pihak lain yang terkait.
- Sesering mungkin dilakukan pengawasan terhadap aktivitas penambangan pasir tersebut oleh instansi terkait, termasuk memberikan teguran atau proses lebih lanjut jika terdapat perusahaan yang tidak taat, terdapat aturan yang berlaku dan berpotensi merusak sumber daya ikan dan lingkungannya.
- Melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait.

Target capaian pengawasan pelaku usaha pasir (laut, granit, timah) dan SDNH lainnya yang diperiksa kepatuhannya di Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020 sebanyak 3 pelaku usaha, realisasi capaian sebanyak 3 pelaku usaha sehingga persentase capaian sebesar 100%. Capaian pengawasan pelaku usaha pasir (laut, granit, timah) dan SDNH lainnya tahun 2020 memiliki persentase capaian yang tetap jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019.

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan pelaku usaha pasir (laut, granit, timah) dan SDNH lainnya pada tahun 2020 sebesar Rp27.110.000, dengan realisasi Rp26.127.700 atau 93,38%.

b. Pengawasan Pelaku Usaha Wisata Bahari

Pengawasan terhadap pelaku usaha wisata bahari dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor 3/PER.DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kegiatan Wisata Bahari di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Target capaian pengawasan pelaku usaha wisata bahari yang diperiksa kepatuhannya di Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020 sebanyak 10 pelaku usaha, realisasi capaian sebanyak 14 pelaku usaha sehingga persentase capaian sebesar 120%. Rincian hasil kegiatan tahun 2020, sebagai berikut:

- 1) Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 13 Maret 2020 di *Tasik Ria Resort* yang beralamat di Desa Mokupa Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa. Jenis usaha wisata tirta/*diving*, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
- 2) Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 13 Maret 2020 di *Murex Dive Resort* yang beralamat di Desa Kalasey Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. Jenis usaha wisata tirta, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.

- 3) Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 13 Maret 2020 di *Mapia Resort and Spa* yang beralamat di Desa Kalasey Kecamatan Mandolang Kabupaten Minahasa. Jenis usaha wisata selam, vila, penyediaan akomodasi, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
- 4) Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 08 Juli 2020 di *Pulisan Resort* yang beralamat di Desa Pulisan, Kec.Likupang Timur, Kab.Minahasa Utara. Jenis usaha *cottage*, wisata tirta, dan wisata restoran, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
- 5) Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 10 Juli 2020 di *Fly Fish Divers Resort* yang beralamat di Desa Kahuku Pulau bangka, kecataman likupang timur, kabupaten Minahasa Utara. Jenis usaha wisata tirta, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
- 6) Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 15 Juli 2020 di Paradise Hotel yang beralamat di Kawasan Pariwisata Paradise Desa Maen, Kab. Minahasa Utara. Jenis usaha Penginapan, Rumah makan, *snorkeling*, renang, *banana boat*, jet ski, wahana air, *spa*, kolam air panas alami, dan *golf*, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
- 7) Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 06 Agustus 2020 di Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 15 Juli 2020 di *La Merry Resort* yang beralamat di Tarabitan Likupang Barat, Kab.Minahasa Utara. Jenis usaha hotel dan *resort*, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar yang beralamat di Kawasan Pariwisata Paradise Desa Maen, Kab. Minahasa Utara.
- 8) Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 6 Agustus 2020 di *Nusantara Dian Centre Resort and Spa* yang beralamat di Jl. Raya Molas, Lingkugan 4, Molas, Bunaken, Kota Manado. Jenis usaha Perhotelan, *snorkeling*, *diving*, *boat tour*, olahraga pantai, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
- 9) Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 7 Agustus 2020 di Grand Luley Hotel yang beralamat di Tongkaina, Kel. Tongkaina, Kec. Bunaken, Kota Manado, Sulawesi Utara. Jenis usaha Hotel, *snorkeling*, selam, renang, konservasi, mangrove, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
- 10) Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 02 September 2020 di *Tumbak Island Cottage* yang beralamat di Desa Tumbak Kecamatan Posumaen, Kab.Minahasa Tenggara. Jenis usaha Jasa penginapan /*cottage*, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
- 11) Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 02 September 2020 di *Bentenan Beach Resort* yang beralamat di Desa Bentenan Kecamatan Posumaen, Kab.Minahasa Tenggara. Jenis usaha wisata tirta, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
- 12) Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 03 September 2020 di *Blue Bay Divers* yang beralamat di Desa Bentenan Kecamatan Posumaen, Kab.Minahasa Tenggara. Jenis usaha *cottage*, wisata tirta, dan wisata selam, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.

- 13) Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 15 September 2020 di *Lembeh Marina Resort* yang beralamat di Kelurahan Pintu Kota Kecamatan Lembeh Utara Kota Bitung. Jenis usaha penginapan, rumah makan, fotografi, konservasi terumbu karang, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.
- 14) Pengawasan pelaku usaha wisata bahari pada tanggal 18 November 2020 di *Gangga Resort* yang beralamat Pulau Gangga, Desa Gangga, kecamatan Likupang Timur, Kab. Minahasa Utara. Jenis usaha penginapan, *diving*, restoran, dokumen perizinan lengkap dan sesuai dan tidak memberikan dampak buruk bagi lingkungan sekitar.

Jumlah pelaku usaha yang diperiksa tahun 2020 adalah sebanyak 14 pelaku usaha mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebanyak 20 pelaku usaha. Penurunan capaian disebabkan karena turunnya target capaian output pelaku usaha wisata bahari yang diperiksa dan alokasi anggaran di tahun 2020. Walaupun demikian dari sisi persentase capaian mengalami kenaikan dari 105,26% pada tahun 2019 menjadi 120% pada tahun 2020.

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan pelaku usaha wisata bahari tahun 2020 sebesar Rp28.660.000, dengan realisasi Rp27.800.000 atau 96,7%.

c. Pengawasan Pengelolaan Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam (BMKT)

Kegiatan pengawasan pengelolaan benda berharga muatan kapal tenggelam (BMKT) menjadi fokus pengawasan KKP dalam 2 (dua) tahun terakhir disebabkan tingkat kerawanan yang cukup tinggi terhadap kegiatan pengangkatan BMKT secara illegal, termasuk di Kabupaten Selayar. Dasar pengawasan terhadap pengawasan pengelolaan BMKT dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PSDKP nomor KEP.56/DJ-PSDKP/2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pengelolaan Benda Berharga Asal Muatan Tenggelam. Kegiatan pengawasan pengelolaan BMKT tahun 2020 dilaksanakan oleh Wilker PSDKP Selayar, sebagai berikut:

- 1) Tanggal 08 Agustus 2020 Polsus WP3K Wilker PSDKP Selayar melakukan kegiatan penyelaman di lokasi kegiatan dilaksanakan dengan melakukan penyelaman di lokasi adanya kapal Walvis (*walvisch*) milik perusahaan hindia timur belanda atau *Vareenigde Oostindische Compagnie* (VOC) yang tenggelam pada tanggal 07 Januari 1663. Hasil penyelaman ditemukan 4 (empat) buah jangkar raksasa yang dalam kondisi ditumbuhi karang dan panjang sekitar 4 – 4,5 meter, lebar 3 – 3,7 meter, dan lingkaran batang 80 – 90 cm.
- 2) Tanggal 14 – 18 September 2019, Polsus WP3K Wilker PSDKP Selayar melakukan kegiatan pengawasan BMKT bersama dengan Tim BPSPL Makassar Direktorat Jasa Kelautan DJ-PRL, Tim DKP Kab. Kep. Selayar, Tim Cabang Dinas KP Prop.Sul-Sel, Dinas Pendidikan Kab.Selayar, dan Tim Dive Operator. Pelaksanaan kegiatan di bagi menjadi 2 Tim yaitu Tim BMKT yang bertugas melakukan tag lokasi, pengukuran objek BMKT dan pemasangan *baseline* serta dokumentasi kegiatan, dan Tim Ekologi bertugas melakukan survei tutupan terumbu karang dengan menggunakan metode PIT. Penyelaman objek BMKT berlokasi di perairan Taka Bajangan, Desa Bontolebang, Kec.Bontoharu, Kab.Kepulauan Selayar dengan objek BMKT yang di lakukan pengukuran, pemasangan dan survei tutupan terumbu karang adalah 4 buah Jangkar raksasa dan 1 buah Meriam.

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan pengelolaan Benda Berharga Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) pada tahun 2020 sebesar Rp31.060.000, dengan realisasi Rp31.043.000 atau 99,94%.

4. Pengawasan pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya

Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antar ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Yang dimaksud dengan kepatuhan adalah kesesuaian kegiatan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (WP3K) dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil kegiatan pengawasan pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya yang dilaksanakan oleh Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020 meliputi pengawasan pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pengawasan pelaku usaha pengelolaan pulau-pulau kecil, dengan rincian pencapaian kegiatan sebagai berikut:

Tabel 12. Capaian Jumlah Pelaku Usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil

Kegiatan	2019		2020		
	Target Riksa (Pelaku Usaha)	Realisasi (Pelaku Usaha)	Target Riksa (Pelaku Usaha)	Realisasi (Pelaku Usaha)	% Capaian
Pengawasan Pelaku Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir	5	9	2	4	120
Pengawasan Pelaku Usaha Pengelolaan Pulau-pulau Kecil	9	6	4	4	100

Target pelaku usaha pengelolaan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa tahun 2020 sebanyak 6 pelaku usaha terealisasi sebanyak 8 pelaku usaha dengan persentase capaian 120%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 jumlah pelaku usaha yang diperiksa sebanyak 14 pelaku usaha, hal ini menunjukkan terdapat penurunan jumlah pelaku usaha yang diperiksa kepatuhannya. Penurunan capaian disebabkan karena turunnya target capaian output pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa dan alokasi anggaran di tahun 2020.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian kegiatan pengawasan pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya tahun 2020 sebesar Rp93.480.000, terealisasi sebesar Rp87.969.500 atau dengan persentase penyerapan anggaran 94,11%.

Rincian kegiatan pengawasan pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang diperiksa kepatuhannya di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020, sebagai berikut:

a. Pengawasan Pelaku Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir

Pengawasan terhadap pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor: 12/Permen-KP/2013 Tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan petunjuk teknis pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: 4/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Sekitarnya.

Tahun 2020 dilakukan pengawasan terhadap 4 pelaku usaha pengelola wilayah pesisir yang berada di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Bitung, dengan rincian hasil pengawasan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir tanggal 16 April 2020 di PT. Pulisan, pelaku usaha resort yang berlokasi di Desa Kinunang Kec. Likupang Barat, Kab. Minahasa Utara (01°39'56.0"LU 125°09'48.4"BT). Hasil pengawasan yang diperoleh bahwa dokumen perizinan lengkap, direkomendasikan untuk tetap memperhatikan aspek lingkungan, kebersihan dan kelestarian khususnya pengendalian sampah yang ditimbulkan pada aktivitas, serta menjaga kondisi mangrove di wilayah pesisir perusahaan.
- 2) Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir tanggal 10 Agustus 2020 di *Starbright Garden Beach Resort*, pelaku usaha resort yang berlokasi di Desa Kima Bajo kecamatan Wori, kabupaten Minahasa Utara (1°60'53.4"LU 124°87'BT). Hasil pengawasan yang diperoleh bahwa dokumen perizinan lengkap, direkomendasikan untuk tetap memperhatikan aspek lingkungan, kebersihan dan kelestarian khususnya pengendalian sampah yang ditimbulkan pada aktivitas, serta menjaga kondisi mangrove di wilayah pesisir perusahaan.
- 3) Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir tanggal 10 Agustus 2020 di *Sun Moon Resort*, pelaku usaha resort yang berlokasi di Desa Kalinaun kecamatan Likupang Timur, kabupaten Minahasa Utara (1°37'59.4"LU 125°09'01,7"BT). Hasil pengawasan yang diperoleh bahwa perizinan dalam proses pengurusan direkomendasikan untuk tetap memperhatikan aspek lingkungan, kebersihan dan kelestarian khususnya pengendalian sampah yang ditimbulkan pada aktivitas, serta menjaga kondisi mangrove di wilayah pesisir perusahaan.
- 4) Pengawasan pengelolaan wilayah pesisir tanggal 6 November 2020 di *Tasik Ria Resort*, pelaku usaha resort yang berlokasi di Jl. Raya Trans Sulawesi, Tasik Ria, Mokupa, Tombariri, Mokupa, Tombariri, Manado, Sulawesi Utara (1°24'50.7"N 124°42'29.8"E). Hasil pengawasan yang diperoleh bahwa dokumen perizinan lengkap, direkomendasikan untuk tetap memperhatikan aspek lingkungan, kebersihan dan kelestarian khususnya pengendalian sampah yang ditimbulkan pada aktivitas, serta menjaga kondisi mangrove di wilayah pesisir perusahaan.

Target jumlah pelaku usaha yang diperiksa tahun 2020 sebanyak 2 pelaku usaha, tercapai 4 pelaku usaha. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebanyak 9 pelaku usaha

dengan target 5 pelaku usaha. Penurunan capaian disebabkan karena turunnya target capaian output pelaku usaha wisata bahari yang diperiksa dan alokasi anggaran di tahun 2020.

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan pelaku usaha pengelolaan wilayah pesisir pada tahun 2020 sebesar Rp33.580.000, dengan realisasi Rp31.964.800 atau 95,19%.

b. Pengawasan Pelaku Usaha Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil

Pengawasan terhadap pelaku usaha pengelolaan pulau-pulau kecil yang taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor: 12/Permen-KP/2013 Tentang Pengawasan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Sedangkan sebagai petunjuk teknis pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal PSDKP nomor: 4/PER-DJPSPDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Sekitarnya.

Pengawasan pulau-pulau kecil fokus pada pengawasan pelaku usaha pemanfaatan pulau-pulau kecil oleh orang asing dan pemanfaatan sempadan pantai, dengan parameter kepatuhan meliputi: memiliki izin lokasi; memiliki izin pengelolaan; kesesuaian dan keabsahan izin lokasi; kesesuaian dan keabsahan izin pengelolaan; kesesuaian izin lokasi dan izin pengelolaan dengan pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2020 telah dilaksanakan pengawasan terhadap 4 pelaku usaha pengelola pulau-pulau kecil, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Pengawasan pengelolaan pulau-pulau kecil tanggal 17 Juni 2020 di PT Coral Eye, berlokasi Pulau Bangka Desa Lihunu jaga VI Kec. Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara pada posisi 01°45'04.8" LU dan 125°08'01.3"BT, jenis kegiatan bidang pariwisata dan resort. Hasil pengawasan pihak PT Coral eye telah memiliki dokumen perijinan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 2) Pengawasan pengelolaan pulau-pulau kecil tanggal 13 Juli 2020, dilakukan pengawasan pelaku usaha pengelolaan pulau-pulau kecil di PT Pulo Cinta Indonesia Persada yang berlokasi di Pulau Cinta Kecamatan Botumuito Kabupaten Boalemo, jenis kegiatan bidang pariwisata dan resort. Pelaku usaha tersebut dinyatakan taat berdasarkan hasil pengawasan pelaku usaha memiliki dokumen perizinan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 3) Pengawasan pengelolaan pulau-pulau kecil tanggal 16 November 2020, dilakukan pengawasan pelaku usaha pengelolaan pulau-pulau kecil di Bastianos Bangka Dive Resort (Pulau Bangka) yang berlokasi di Busabora beach, Lihunu, Likupang Timur, Kabupaten Minahasa Utara, Sulawesi Utara (1°44'28.0"N 125°08'44.0"E), jenis kegiatan bidang pariwisata dan resort. Pelaku usaha tersebut dinyatakan taat berdasarkan hasil pengawasan pelaku usaha memiliki dokumen perizinan sesuai dengan aturan yang berlaku.
- 4) Pengawasan pengelolaan pulau-pulau kecil tanggal 17 November 2020, dilakukan pengawasan pelaku usaha pengelolaan pulau-pulau kecil di Gangga island resort & spa (pulau gangga) yang berlokasi di Pulau Gangga, Gangga Satu, West Likupang, North Minahasa Regency, North Sulawesi (1°45'36.6"N 125°03'03.1"E), jenis kegiatan bidang

pariwisata dan resort. Pelaku usaha tersebut dinyatakan taat berdasarkan hasil pengawasan pelaku usaha memiliki dokumen perizinan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kondisi lingkungan dan sekitarnya, area pantai menjadi bersih dan ekosistem perairan menjadi terawat dan terjaga kelestariannya. Namun sejak Januari tahun 2020 diakibatkan terhambat PSBB di wilayah Kabupaten Minahasa utara sehingga belum menerima pengunjung.

Target jumlah pelaku usaha yang diperiksa tahun 2020 sebanyak 4 pelaku usaha, tercapai 4 pelaku usaha. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 sebanyak 6 pelaku usaha dengan target 9 pelaku usaha. Penurunan capaian disebabkan karena turunnya target capaian output pelaku usaha wisata bahari yang diperiksa dan alokasi anggaran di tahun 2020. Walaupun demikian dari sisi persentase capaian mengalami kenaikan dari 83,33% pada tahun 2019 menjadi 100% pada tahun 2020.

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan pelaku usaha pengelolaan pulau-pulau kecil pada tahun 2020 sebesar Rp59.900.000, dengan realisasi Rp56.004.700 atau 93,49%.

5. Pengawasan pelaku usaha pengelolaan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya

Kegiatan pengawasan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut nasional meliputi pengawasan terhadap kesesuaian izin dari pelaku usaha dan kesesuaian kegiatan dengan zona yang telah ditetapkan (peraturan tentang zonasi).

Tabel 13. Capaian Jumlah Pelaku Usaha Pemanfaat Ruang Laut Nasional

Kegiatan	2019		2020		
	Realisasi (Pelaku Usaha)	% capaian	Target Riksa (Pelaku Usaha)	Realisasi (Pelaku Usaha)	% Capaian
Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Nasional	3	100	2	4	120

Target capaian pengawasan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut nasional yang diperiksa kepatuhannya di Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020 sebanyak 2 pelaku usaha, realisasi capaian sebanyak 4 pelaku usaha sehingga persentase capaian sebesar 120%. Perbandingan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 sebanyak 3 pelaku usaha terdapat kenaikan jumlah pelaku usaha yang diawasi dengan persentase kenaikan sebesar 20%.

Tahun 2020 telah dilaksanakan pengawasan terhadap 4 pelaku usaha pemanfaat ruang laut nasional, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengawasan pengelolaan ruang laut tanggal 17 Juni 2020 di PT. Horiguchi Star Insani, berlokasi desa tarabitan kecamatan likupang barat kabupaten Minahasa Utara (1045°95.0"N, 124059°34,8"E), jenis kegiatan bidang budidaya mutiara. Pelaku usaha tersebut dinyatakan taat berdasarkan hasil pengawasan.
- 2) Pengawasan pengelolaan ruang laut tanggal 6 Agustus 2020 di La Merry Resort, berlokasi Desa Talise Pulau Talise Kecamatan Likupang Timur Kabupaten Minahasa Utara (1°49'16.0"N, 125°04'01,5"E), jenis kegiatan bidang pariwisata dan resort. Pelaku usaha tersebut dinyatakan taat berdasarkan hasil pengawasan.

- 3) Pengawasan pengelolaan ruang laut tanggal 6 Agustus 2020 di Kinaari Resort, berlokasi Desa Tarabitan Kecamatan Likupang Barat Kabupaten Minahasa Utara (1°45'95.0"N, 124°59'34,8"E), jenis kegiatan bidang pariwisata dan resort. Tidak ada aktivitas usaha selama pandemik.
- 4) Pengawasan pengelolaan ruang laut tanggal 19 Agustus 2020 di PT Elnusa Petrofin, berlokasi Desa Sapa Barat Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan. Dengan luas lahan 2.773 m² pada koordinat 01°10'43.42" LU dan 124°22'54.8"BT, jenis kegiatan perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk mendukung pencapaian kegiatan pengawasan pelaku usaha pemanfaat ruang laut nasional yang diperiksa kepatuhannya di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020 sebesar Rp26.900.000, terealisasi sebesar Rp24.926.900 atau dengan persentase penyerapan anggaran 92,66%.

6. Pengawasan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya

Pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal PSDKP Nomor: KEP.59/DJ-PSDKP/2011 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Pencemaran Perairan. Kegiatan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya di Pangkalan PSDKP Bitung dilaksanakan pada unit usaha yang bergerak di bidang perikanan meliputi usaha pengolahan ikan dan usaha pembudidaya ikan serta unit usaha yang bergerak di bidang non perikanan meliputi usaha tambang, pembangkit listrik, dan industri minyak kelapa.

Parameter pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya yaitu: a) memiliki dokumen perizinan (AMDAL/UKL-UPL/Izin Lingkungan); b) memiliki IPAL; c) kesesuaian IPAL terpasang.

Tabel 14. Kegiatan Pencemaran Perairan di Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020

No	Pelaksana	Jenis Usaha (Pelaku Usaha)		
		Perikanan	Non Perikanan	Jumlah
1	Pangkalan PSDKP Bitung	19	2	21
2	Satwas SDKP	1	1	2
3	Wilker PSDKP	-	1	1
TOTAL		20	4	24

Target capaian pengawasan pelaku usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya di Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020 sebanyak 14 pelaku usaha, realisasi capaian sebanyak 24 pelaku usaha sehingga persentase capaian sebesar 120%. Perbandingan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 sebanyak 17 pelaku usaha terdapat kenaikan jumlah pelaku usaha yang diawasi dengan persentase kenaikan sebesar 20%.

Alokasi anggaran untuk mendukung kinerja kegiatan pengawasan pencemaran perairan akibat kegiatan perikanan dan non perikanan pada tahun 2019 sebesar Rp74.950.000, dengan realisasi Rp74.590.800 atau 99,52%.

7. Pengawasan pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan *Destructive Fishing*

Pengawasan *destructive fishing* dilaksanakan berdasarkan wilayah kerja Pangkalan PSDKP Bitung dilaksanakan melalui kegiatan pemeriksaan muatan kapal yang berukuran ≤ 10 GT serta menyambangi lokasi yang terindikasi terjadinya kegiatan yang patut diduga rawan sebagai pelaku *destructive fishing*.

Tahun 2020 dilakukan pemeriksaan terhadap 34 kapal perikanan yang melakukan aktivitas perikanan di wilayah kerja Pangkalan PSDKP Bitung. 29 kapal perikanan taat dan 5 kapal perikanan dinyatakan tidak taat karena dari hasil pengawasan *destructive fishing* di perairan laut TWP Kapoposang dan laut sekitarnya, diduga melakukan aktivitas penangkapan ikan dengan cara merusak ekosistem perairan (*destructive fishing*).

Hasil pengawasan pelaku usaha perikanan yang diperiksa dari kegiatan *destructive fishing* di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020, sebagai berikut:

- a. Kegiatan patroli pengawasan pelaku usaha yang bebas dari kegiatan *destructive fishing* oleh tim gabungan yang terdiri dari Polsus WP3K Pangkalan PSDKP Bitung, AKP Kapal Pengawas Hiu 02 dan Wilker PSDKP Belang di Perairan Kotabunan berhasil mengamankan 1 perahu penangkap ikan yang di duga Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. Kapal tersebut di bawa ke Pangkalan PSDKP Bitung untuk pendataan dan pemeriksaan awal. Patroli ini untuk menindaklanjuti hasil PULBAKET Polsus PWP3K Wilker PSDKP Belang, sehingga dilakukan operasi pengawasan *destructive fishing* menggunakan metode *undercover* atau menyamar sebagai nelayan dan menggunkan kapal nelayan dalam operasional pengawasan.
- b. Pengawasan pelaku usaha yang bebas dari kegiatan *destructive fishing* oleh Wilker PSDKP Mamuju Utara di Perairan Pasangkayu di Selat Makassar pada bulan Juli 2020, dilakukan pemeriksaan terhadap 3 kapal penangkap ikan dengan dokumen perizinan lengkap sehingga diizinkan untuk melanjutkan kegiatan perikanan.
- c. Pengawasan pelaku usaha yang bebas dari kegiatan *destructive fishing* oleh Satwas SDKP Gorontalo di Perairan Gorontalo/Teluk Tomini pada bulan Maret 2020, dilakukan pemeriksaan terhadap 5 kapal penangkap ikan dengan alat tangkap handline dan jaring nike dengan dokumen perizinan lengkap dan karena tidak ditemukan alat penangkap dan alat bantu penangkapan ikan yang merusak sumber daya, kapal diizinkan untuk melanjutkan kegiatan perikanan.
- d. Pengawasan pelaku usaha yang bebas dari kegiatan *destructive fishing* oleh Wilker PSDKP Mamuju Utara di Selat Makassar/Perairan Mamuju Utara pada bulan Maret 2020, dilakukan pemeriksaan terhadap 2 kapal penangkap ikan dengan dokumen perizinan lengkap sehingga diizinkan untuk melanjutkan kegiatan perikanan.
- e. Pengawasan pelaku usaha yang bebas dari kegiatan *destructive fishing* oleh Pangkalan PSDKP Bitung di WPP716/Laut Sulawesi pada bulan November 2019, dilakukan pemeriksaan terhadap 13 kapal penangkap ikan. Tidak ditemukan alat penangkap dan alat bantu penangkapan ikan yang merusak sumber daya, sehingga kapal diizinkan untuk melanjutkan kegiatan perikanan.
- f. Kegiatan patroli pengawasan pelaku usaha yang bebas dari kegiatan *destructive fishing* oleh tim gabungan yang terdiri dari Polsus WP3K Pangkalan PSDKP Bitung, AKP Kapal

Pengawas Hiu 05 dan Wilker PSDKP Banggai, Dinas Perikanan Morowali, dan POKMASWAS di Perairan Teluk Tolo, Kabupaten Morowali berhasil mengamankan 1 perahu penangkap ikan yang diduga Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. Kapal tersebut di bawa ke Pangkalan PSDKP Bitung untuk pendataan dan pemeriksaan awal.

Tabel 15. Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Yang Diperiksa Dari Kegiatan *Destructive Fishing*

Kegiatan	2019	2020		
	Realisasi (Pelaku Usaha)	Target Riksa (Pelaku Usaha)	Realisasi (Pelaku Usaha)	% Capaian
Pengawasan Pelaku Usaha Perikanan Yang Diperiksa Dari Kegiatan <i>Destructive Fishing</i>	10	15	34	120

Target capaian pengawasan pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan *destructive fishing* tahun 2020 sebanyak 34 pelaku usaha, realisasi capaian sebanyak 15 pelaku usaha sehingga persentase capaian sebesar 120%. Perbandingan capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 sebanyak 10 pelaku usaha terdapat kenaikan jumlah pelaku usaha yang diawasi dengan persentase kenaikan sebesar 126,6%. Kenaikan capaian jumlah pelaku usaha perikanan yang diperiksa dari kegiatan *destructive fishing* merupakan kegiatan prioritas dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak. Kegiatan ini telah tertuang sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 114/KEPMEN-KP/SJ/2019 Tentang Rencana Aksi Nasional pengawasan dan penanggulangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak tahun 2019-2023.

Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan pengawasan pelaku usaha perikanan yang diawasi dari kegiatan *destructive fishing* pada tahun 2020 sebesar Rp176.400.000, dengan realisasi Rp170.266.000 atau 96,52%.

Sasaran Strategis (SS3) :

Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan

Capaian SS3. Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan di dukung indikator kinerja Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, dengan capaian pada tahun 2020 adalah 100%.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya SS3 adalah Rp745.089.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp 719.833.200, atau 96,61%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SS3 sebesar 99,03% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SS3 tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SS3 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

IK3 - Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

Capaian indikator kinerja ini diperoleh dari hasil agregasi capaian 4 (empat) kegiatan pengawasan sumber daya perikanan, yaitu:

- Pengawasan kepatuhan kapal perikanan;
- Pengawasan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan;
- Pengawasan kepatuhan unit usaha pembudidayaan ikan; dan
- Pengawasan kepatuhan unit usaha distribusi hasil.

Tabel 16. Capaian Kegiatan Pendukung Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2019 (Unit Usaha)	2020		
		Target (Unit Usaha)	Realisasi (Unit Usaha)	% Capaian
Pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan	4496	3050	3211	105,28
Pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan	112	90	94	104,44
Pemeriksaan kepatuhan unit usaha pembudidayaan ikan	64	39	58	120
Pemeriksaan kepatuhan usaha distribusi hasil perikanan	49	47	51	108,51

Sumber: SIMWASKAN

Rincian realisasi capaian kegiatan pembentuk capaian IK3 – Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan, pelaksanaan pengawasan kelengkapan dan keabsahan dokumen kapal perikanan dilakukan oleh Pengawas Perikanan. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan, yang dimaksud dengan Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.

Objek pengawasan kapal perikanan meliputi: kapal penangkap ikan, kapal pengangkut ikan, kapal latih perikanan, kapal penelitian/eksplorasi perikanan dan kapal pendukung operasi pembudidaya ikan. Pelaksanaan pengawas kapal perikanan meliputi: Pemeriksaan kapal perikanan pada saat keberangkatan; Pemeriksaan kapal perikanan pada saat melakukan kegiatan perikanan; dan Pemeriksaan kapal perikanan pada saat kedatangan.

Dalam pelaksanaan pengawasan kapal perikanan pada saat keberangkatan, setiap kapal wajib melaporkan rencana keberangkatannya (kecuali untuk kapal perikanan yang berukuran ≤ 10 GT) dengan menyerahkan dokumen perizinan kapal perikanan baik persyaratan administrasi dan kelayakan teknis, yang terdiri dari: Kesesuaian SIPI/SIKPI; Kesesuaian alat penangkap ikan (jenis dan spesifikasi); Kesesuaian alat bantu penangkapan ikan; Kesesuaian fisik kapal (jenis kapal, ukuran GT, nomor seri dan merk mesin, tanda selar kapal); Kesesuaian komposisi ABK dengan *Crew List*; Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut untuk kapal pengangkut; Transmitter SPKP (untuk kapal perikanan diatas 30 GT); dan Keberadaan bahan atau alat yang berada diatas kapal terkait dengan kegiatan penangkapan ikan.

Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada tahun 2020 diperoleh dari pemenuhan beberapa indikator yaitu: (1) Surat Perintah Tugas dari pimpinan unit kerja bobot 25%; (2) Pemeriksaan persyaratan administrasi bobot 25%; (3) Pemeriksaan kelayakan teknis dengan bobot 25%; dan (4) pelaporan melalui aplikasi SIMWASKAN baik *online* dan/atau *offline* bobot 25%, sehingga diperoleh persentase sebesar 100%.

Rincian hasil penyelesaian pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020

No	Pelaksana	Perizinan		Jumlah
		Pusat	Daerah	
1	Pangkalan PSDKP Bitung	250	487	737
2	Satwas SDKP	116	1314	1430
3	Wilker PSDKP	78	966	1044
TOTAL		444	2767	3211

Berdasarkan hasil pemeriksaan kepatuhan kapal perikanan di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020, diperoleh bahwa kapal perikanan yang diperiksa 86,17% merupakan kapal izin daerah (≤ 30 GT) dan 13,83% merupakan kapal izin pusat (>30 GT).

Tabel 18. Perbandingan Hasil Pemeriksaan Kapal Perikanan

2019		2020	
Realisasi (Unit Usaha)	Target Riksa (Unit Usaha)	Realisasi (Unit Usaha)	% Capaian
4496	3050	3211	105,27

Target jumlah kapal perikanan yang diperiksa tahun 2020 sebanyak 3050 unit, realisasi sebanyak 3211 unit dengan persentase 105,27%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 4496 unit terjadi penurunan jumlah unit kapal perikanan yang diperiksa sebanyak - 28,58%. Persentase pemeriksaan kapal perikanan mengalami penurunan bukan disebabkan oleh menurunnya tingkat ketaatan dari pelaku usaha perikanan, akan tetapi karena metode perhitungan IKU yang digunakan dalam mengukur penyelesaian pemeriksaan kapal perikanan. Kendala yang dihadapi yaitu terdapat permohonan keberangkatan kapal yang tidak dapat *terinput* pada aplikasi SIMWASKAN, seperti permohonan keberangkatan kapal *light*

boat yang tidak terdapat klasifikasi jenis alat tangkap pada *Database Sharing System (DSS)* dan Surat Keterangan Pengganti SLO sehingga masih dibuat secara manual. Surat Keterangan Pengganti SLO diterbitkan karena pada saat pemeriksaan, kapal tidak sedang melakukan aktivitas perikanan karena akan *docking* atau kembali ke pelabuhan/daerah asal.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp411.862.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp 392.841.000 atau 95,38%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran kegiatan ini sebesar 99,05% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target.

2. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan

Pengawasan Unit Pengolahan Ikan (UPI) bertujuan untuk memberikan jaminan terhadap produk perikanan yang akan diolah telah memenuhi persyaratan mutu dan keamanan baik nasional maupun internasional. Pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan sesuai dengan Perdirjen PSDKP Nomor 3/PER-DJPSDKP/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Usaha Pengolahan Ikan, jenis usaha pengolahan ikan yang diawasi terdiri dari: penggaraman/pengeringan Ikan; pemindangan Ikan; pengasapan/pemanggangan Ikan; peragian/ fermentasi Ikan; pembuatan minyak Ikan; pengalengan Ikan; pengolahan rumput laut; pembekuan Ikan; pendinginan/pengesan Ikan; pengolahan berbasis lumatan daging Ikan/jelly Ikan atau surimi; dan/atau pengolahan kerupuk Ikan, keripik, peyek Ikan, dan sejenisnya.

Pemeriksaan UPI yang diperiksa terbagi atas UPI skala besar dan skala kecil, yaitu:

- 1) Pengawasan UPI skala besar, meliputi usaha milik perorangan ataupun kelompok perusahaan modal asing (PMA)/perusahaan modal dalam negeri (PMDN); terdaftar/tercatat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/ Kabupaten/Kota; dan memiliki SIUP, SKP, HACCP/PMMT, dan HC.
- 2) Pengawasan UPI skala kecil, meliputi usaha milik perorangan, UKM (Usaha Kecil Mikro)/Poklahsar (Kelompok Pengolah Pemasar); terdaftar/tercatat di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota; dan tidak menggunakan bahan tambahan berbahaya (formalin, boraks, zat warna).

Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada tahun 2020 diperoleh dari pemenuhan beberapa indikator yaitu: (1) Surat Perintah Tugas dari pimpinan unit kerja bobot 25%; (2) Pemeriksaan persyaratan administrasi bobot 25%; (3) Pemeriksaan kelayakan teknis dengan bobot 25%; dan (4) pelaporan melalui aplikasi SIMWASKAN baik *online* dan/atau *offline* bobot 25%, sehingga diperoleh persentase sebesar 100%.

Rincian hasil pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020, adalah sebagai berikut:

Tabel 19. Hasil Pengawasan Unit Pengolahan Hasil Perikanan di Lingkup PSDKP Bitung

No	Pelaksana	Skala Usaha		
		Besar	Kecil	Jumlah
1	Pangkalan PSDKP Bitung	30	5	35
2	Satwas SDKP	31	6	37
3	Wilker PSDKP	9	13	22
TOTAL		70	24	94

Berdasarkan hasil pemeriksaan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020, bahwa unit pengolah ikan yang diperiksa 74,47% UPI skala besar dan 25,53% UPI skala kecil.

Tabel 20. Perbandingan Jumlah Unit Pengolahan Hasil Perikanan Yang Diperiksa

2019	2020		
Realisasi (Unit Usaha)	Target Riksa (Unit Usaha)	Realisasi (Unit Usaha)	% Capaian
112	90	94	104,44

Target jumlah unit usaha pengolah hasil perikanan yang diperiksa tahun 2020 sebanyak 90 unit, realisasi sebanyak 94 unit dengan persentase 104,44%. Jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 112 unit terjadi penurunan jumlah unit usaha pengolah hasil perikanan yang diperiksa sebanyak 2,23%. Penurunan capaian disebabkan karena turunnya target capaian output unit usaha pengolah hasil perikanan yang diperiksa dari tahun sebelumnya sebesar 105 unit usaha. Selain itu sebagian UPI tidak aktif melakukan aktivitas pengolahan akibat dampak dari pandemi Covid19.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp105.920.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp103.654.400 atau 97,86%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran kegiatan ini sebesar 99,02% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target.

3. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pembudidayaan ikan

Berdasarkan Keputusan Dirjen PSDKP Nomor 154/DJ-PSDKP/V/2010 tentang Petunjuk Teknis Operasional Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan, yang dimaksud usaha di bidang pembudidayaan ikan adalah kegiatan yang berupa penyiapan lahan pembudidayaan ikan, pembenihan, perbesaran, pemanenan, penanganan, pengolahan, penyimpanan, pendinginan, dan/atau pengawetan serta pengumpulan, penampungan, pemuatan, pengangkutan, penyaluran, dan/atau pemasaran hasil ikan pembudidayaan. Lokasi pengawasan pembudidayaan ikan antara lain di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP-NRI), sentra-sentra pembudidayaan ikan, area pembenihan ikan, area pembudidayaan ikan, tempat-tempat pemasukan/pengeluaran ikan untuk kepentingan pembudidayaan, dan produsen, importir/eksportir, distributor, toko pakan/obat ikan.

Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha pembudidayaan ikan di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada tahun 2020 diperoleh dari pemenuhan beberapa indikator.

Apabila pemeriksaan unit usaha budidaya tersebut dapat terselesaikan maka akan diperoleh persentase sebesar 100%.yaitu:

- 1) Surat Perintah Tugas dari pimpinan unit kerja bobot 25%;
- 2) Pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis bobot 25%, jika unit usaha yang diperiksa adalah:
 - Usaha Pembudidayaan Ikan: Nomor Induk Berusaha (NIB); Kesesuaian TDPI/TPUPI bagi pembudidaya ikan kecil; dan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) untuk asal benih/ikan yang dibudidayakan.
 - Kapal Pengangkut Ikan Hidup: Kesesuaian Surat Izin Kapal Penangkut Ikan Hidup (SIKPI); Kesesuaian Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT); Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI); Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) bagai kapal asing dan kapal pengangkut ikan Indonesia tujuan ekspor; Kesesuaian SIPJI/SAJI/SATSLN untuk komoditas ikan tertentu; Kesesuaian HPK Keberangkatan; Kesesuaian SLO; dan Kesesuaian HPK Kedatangan.
 - Produsen dan Distributor Obat dan Pakan Ikan: Memiliki nomor sertifikat pendaftaran obat dan pakan ikan dari KKP; Kesesuaian Surat Keterangan Teknis untuk pakan, obat, bahan baku pakan dan obat dari Luar Negeri.
- 3) Pemeriksaan kesesuaian kegiatan usaha, sarana dan prasarana dengan bobot 25%, meliputi:
 - Usaha Pembudidayaan Ikan: Kesesuaian jenis usaha budidaya; Jenis ikan yang dibudidayakan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan; Kesesuaian sarana dan prasarana yang digunakan meliputi asal induk/benih, jenis obat dan pakan terdaftar di KKP.
 - Kapal Pengangkut Ikan Hidup: Cek kesesuaian lokasi bongkar muat; Keaktifan transmitter; Jenis ikan yang diangkut tidak melanggar ketentuan perundang-undangan.
 - Produsen/importir Obat dan Pakan Ikan: Mencantumkan pelabelan pada kemasan obat dan pakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 4) Pelaporan melalui aplikasi SIMWASKAN baik *online* dan/atau *offline* bobot 25%

Pada tahun 2020 dilakukan terhadap 58 unit usaha pembudidayaan ikan, dengan target jumlah unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa adalah 39 unit usaha dengan hasil kegiatan sebagai berikut:

Tabel 21. Hasil Pengawasan Unit Pembudidayaan Ikan di Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

No	Pelaksana	Jenis Budidaya			Jumlah
		Laut	Payau	Tawar	
1	Pangkalan PSDKP Bitung	1	2	1	4
2	Satwas SDKP	5	11	-	16
3	Wilker PSDKP	5	25	8	38
TOTAL		11	38	9	58

Unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020 terdiri atas pembudidayaan ikan di perairan umum dan air tawar serta pembudidayaan ikan di laut dan air payau. Berdasarkan hasil tersebut diperoleh unit usaha budidaya air payau

memiliki persentase tertinggi yaitu 65,51% sedangkan budidaya air laut sebesar 18,97% dan budidaya air tawar sebesar 15,52%.

Tabel 22. Jumlah Usaha Budidaya Ikan Yang Diperiksa

2019	2020		
Realisasi (Unit Usaha)	Target Riksa (Unit Usaha)	Realisasi (Unit Usaha)	% Capaian
61	39	58	120

Jumlah usaha budidaya ikan yang diperiksa tahun 2020 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2019. Pada tahun 2020 jumlah usaha budidaya yang diperiksa sebanyak 58 unit usaha, turun 4,91% jika dibandingkan dengan capaian pemeriksaan tahun 2019 sebanyak 61 unit usaha. Penurunan capaian disebabkan karena turunnya target capaian output unit unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa dari tahun sebelumnya sebesar 64 unit usaha.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp133.550.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp 131.596.400 atau 98,54%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran kegiatan ini sebesar 99,01% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target.

4. Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha distribusi hasil perikanan

Pengawasan usaha distribusi hasil perikanan dilakukan mengacu pada Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 14/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Distribusi Hasil Perikanan yang Masuk ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia dan Peraturan Dirjen PSDKP Nomor 10/PER-DJPSDKP/2014 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Pendaratan Ikan. Kategorisasi unit usaha distribusi hasil perikanan terdiri atas: Unit usaha distribusi hasil perikanan yang melakukan pemasukan/impor hasil perikanan dan Unit usaha distribusi hasil perikanan yang melakukan ekspor hasil perikanan.

Perolehan nilai persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan unit usaha distribusi hasil perikanan di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung pada tahun 2020 sebesar 100% apabila dapat memenuhi beberapa indikator yaitu:

- 1) Surat Perintah Tugas dari pimpinan unit kerja dengan bobot 25%;
- 2) Pemeriksaan persyaratan administrasi dengan bobot 25% terdiri dari:
 - Persetujuan Impor (PI)/Surat Keterangan Teknis (SKT) dan Sertifikat Pelepasan (KI-D12) untuk kegiatan pemasukan/impor hasil perikanan.
 - Laporan Hasil Verifikasi Pendaratan Ikan (LHVPI) dan Health Certificate (HC) untuk kegiatan ekspor hasil perikanan.
- 3) Pemeriksaan kelayakan teknis dengan bobot 25% terdiri dari:
 - pemasukan/impor hasil perikanan : Kesesuaian jenis, jumlah dan peruntukan produk hasil perikanan yang diimport dalam KI-D12 dengan PI atau SKT atau Rekomendasi RPHP; Kesesuaian Rekomendasi Pemasukan Obat Ikan dan Rekomendasi Pemasukan Benih dan KI-D12 dengan izin diberikan di lapangan;

- ekspor hasil perikanan: Kesesuaian produk hasil perikanan dengan dokumen HC atau LHVPI; Kesesuaian jenis, jumlah dan ukuran ikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4) Pelaporan melalui aplikasi SIMWASKAN baik *online* dan/atau *offline* bobot 25%.

Tabel 23. Hasil Pengawasan unit usaha distribusi hasil perikanan di Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

No	Pelaksana	Impor	Ekspor		Jumlah
			LVHPI	HC	
1	Pangkalan PSDKP Bitung	-	-	21	21
2	Satwas SDKP	-	-	23	23
3	Wilker PSDKP	-	-	7	7
TOTAL		0	0	51	51

Pemeriksaan unit usaha distribusi hasil perikanan di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020 hanya terhadap kegiatan ekspor hasil perikanan dengan pemeriksaan HC (*Health Certificate*) dan kesesuaian jenis, jumlah serta ukuran ikan karena kegiatan impor/pemasukan hasil perikanan tidak ditemukan selama tahun 2020. Produk hasil perikanan yang diekspor berdasarkan hasil pemeriksaan ditujukan ke beberapa negara di benua Asia, Amerika, Australia, Afrika, dan Eropa. Komoditas yang diekspor sebagian besar adalah produk Tuna baik dalam keadaan *fresh*, *frozen*, dan kaleng.

Tabel 24. Jumlah Unit Usaha Distribusi Hasil Perikanan Yang Diperiksa

2019		2020	
Realisasi (Unit Usaha)	Target Riksa (Unit Usaha)	Realisasi (Unit Usaha)	% Capaian
49	47	51	108,51

Pada tahun 2020, dilakukan pemeriksaan terhadap 51 unit yang ada di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung dengan target riksa 47 unit usaha, sehingga persentase sebesar 108,51%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019, maka terjadi peningkatan persentase unit usaha distribusi yang diperiksa sebesar 8,51%.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp93.757.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp 91.741.400, atau 97,85%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran kegiatan ini sebesar 99,02% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target.

Sasaran Strategis (SS4) :

Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan kapal pengawas

SS4 di dukung dengan satu indikator kinerja yaitu IK4 - Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Target SS4 pada tahun 2020 adalah 1,06%, realisasi sebesar 1,26% dengan persentase capaian sebesar 118,87%.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya SS4 adalah Rp7.663.693.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp7.462.315.070 atau 97,37%. Berdasarkan

analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SS3 sebesar 99,18% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SS4 tercapai sesuai target.

IK4 - Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas bertujuan mengukur luas wilayah yang dapat dijangkau oleh 2 unit Kapal Pengawas Pangkalan PSDKP Bitung dalam setiap pelaksanaan operasi pengawasan terhadap luasan WPPNRI.

Berdasarkan manual IKU tahun 2020, formula perhitungan Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, yaitu:

$$x_{kp} = \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n d_i \cdot v_i \cdot t_i \cdot f_{wpp} \cdot f_{kp}}{A} \right\} \times 100\%$$

Keterangan:

- x_{kp} = Coverage area kapal pengawas
- n = Frekuensi operasi Kapal Pengawas
- i = Periode operasi Kapal Pengawas
- d = Jangkauan pemantauan melalui radar Kapal Pengawas (nm)
- v = Kecepatan dinas (nm/jam)
- t = Lama waktu pengawasan (jam)
- f_{wpp} = Faktor koreksi aktual WPPNRI
- f_{kp} = Faktor koreksi aktual Kapal Pengawas
- A = Luas area WPPNRI = 1.928.506 nm²

Capaian persentase cakupan WPPNRI Kapal Pengawas Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020 adalah 1,26% dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 25. Persentase Cakupan WPPNRI Kapal Pengawas Tahun 2020

Keterangan	KP. Hiu 02	KP Hiu 05
Total Hari Operasi	92	108
Jam Operasi (Jam)	1154,6	1098
Kecepatan (NM/Jam)	15	15
Jangkauan Radar (NM)	9	9
Cakupan Teoritis (CT) NM ²	155.871	148.230
Aera Operasi Utama	716	716
Faktor Koreksi WPP	0,40	0,40
Faktor Koreksi Kapal Pengawas (Kelas D)	0,20	0,20
Cakupan Aktual (CA) NM ²	12.470	11.858
% Cakupan Aktual	0,65	0,61
% Total Cakupan Aktual	1,26	

Capaian indikator kinerja Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020 dari target 1,06% tercapai 1,26% dengan persentase capaian kinerja 118,87%. Indikator Kinerja Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung merupakan

IKU baru yang ditambahkan pada tahun 2020 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp7.663.693.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp7.462.315.070 atau 97,37%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran kegiatan ini sebesar 99,18% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target.

Sasaran Strategis (SS5) :

Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat

SS5 di dukung dengan satu indikator kinerja yaitu IK5 - Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Target SS5 pada tahun 2020 adalah 0,204%, realisasi sebesar 0,51% dengan persentase capaian sebesar 120%.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya SS5 adalah Rp1.845.007.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp1.569.340.631 atau 85,06%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SS5 sebesar 99,36% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SS5 tercapai sesuai target.

IK5 - Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan *Illegal Fishing* melalui operasional *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat* lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

Persentase cakupan oleh Speedboat Pengawas adalah persentase luas wilayah yang dapat dijangkau oleh 7 unit *Speedboat*, 1 unit *Rigid Inflatable Boat*, dan 8 unit *Rubber Boat* lingkup Pangkalan PSDKP Bitung dalam setiap pelaksanaan operasi pengawasan terhadap luas WPPNRI.

Berdasarkan manual IKU tahun 2020, formula perhitungan Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat* lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, yaitu:

$$x_{sb} = \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n d_i \cdot v_i \cdot t_i \cdot f_{sb}}{A} \right\} \times 100\%$$

Keterangan:

- x_{sb} = Coverage area speedboat pengawas
- n = Frekuensi operasi speedboat Pengawas
- i = Periode operasi speedboat Pengawas
- d = Jangkauan pemantauan melalui radar/penglihatan visual (nm)
- v = Kecepatan dinas (nm/jam)
- t = Lama waktu pengawasan (jam)
- f_{sb} = Faktor koreksi aktual speedboat = 0,1
- A = Luas area WPPNRI = 1.928.506 nm²

Capaian persentase cakupan WPPNRI *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat* Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020 adalah 0,51% dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

Tabel 26. Persentase Cakupan WPPNRI *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat* Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020

No	Nama SP/RIB/RB	Jarak Pandang (NM)	Kecepatan (NM/Jam)	Total Hari Operasi	Total Jam Operasi	Cakupan Wilayah (NM ²)	Cakupan Aktual (NM ²)	Luas WPP NRI (NM ²)	%Cakupan Wilayah
		d	v		h	$x^2=(d*v*h)$	$f_{ab}=(x^2*0.1)$	A	x/A
1.	SP. Albacore 01	4	10	52	247	9880	988	1.928,506	0,0512
2.	SP. Dolphin 03	4	10	10	54	2160	216	1.928,506	0,0112
3.	SP. Dolphin 19	4	10	25	133	5320	532	1.928,506	0,0276
4.	SP. Dolphin 26	4	10	25	155,5	6220	622	1.928,506	0,0323
5.	SP. Napoleon 30	4	10	35	211	8440	844	1.928,506	0,0438
6.	SP. Napoleon 31	4	10	30	231	9240	924	1.928,506	0,0479
7.	SP. Napoleon 56	4	10	10	53	2120	212	1.928,506	0,0110
8.	Sea Rider 06	4	10	55	270	10800	1080	1.928,506	0,0560
9.	RB Bone	4	10	25	129	5160	516	1.928,506	0,0268
10.	RB Kendari	4	10	25	132	5280	528	1.928,506	0,0274
11.	RB Luwuk Banggai	4	10	25	125	5000	500	1.928,506	0,0259
12.	RB Mamuju Utara	4	10	25	133,76	5350,4	535	1.928,506	0,0277
13.	RB Pangkep	4	10	25	126	5040	504	1.928,506	0,0261
14.	RB Selayar	4	10	27	141	5640	564	1.928,506	0,0292
15.	RB Takalar	4	10	25	125	5000	500	1.928,506	0,0259
16.	RB Wakatobi	4	10	25	199	7960	796	1.928,506	0,0413
TOTAL							9861		0,51

Capaian indikator kinerja Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan *Illegal Fishing* melalui operasional *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat* lingkup Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020 dari target 0,204%, realisasi sebesar 0,51% dengan persentase capaian sebesar 120%. Indikator Kinerja Persentase Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan *Illegal Fishing* melalui operasional *Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat* lingkup Pangkalan PSDKP Bitung merupakan IKU baru yang ditambahkan pada tahun 2020 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp1.845.007.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp1.569.340.631 atau 85,06%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SS5 sebesar 99,36% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target.

Sasaran Strategis (SS6) :

Terselenggaranya Pemantauan SDKP melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)

SS6 di dukung dengan satu indikator kinerja yaitu IK6 - Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP. Target SS6 pada tahun 2020 adalah 70%, realisasi sebesar 70% dengan persentase capaian sebesar 100%.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya SS6 adalah Rp102.000.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp95.077.577 atau 93,21%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SS3 sebesar 99,07% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SS6 tercapai sesuai target.

IK6 - Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP

Kegiatan pemantauan merupakan bagian tidak terpisahkan dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dengan berpedoman pada prinsip pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan melalui pendekatan *monitoring*, *control* dan *surveillance* (MCS). Komponen kegiatan sistem pemantauan SDKP meliputi kegiatan analisis pemantauan pergerakan kapal perikanan menggunakan aplikasi SPKP, kegiatan operasional SKAT *Online* (*upload* dokumen) dan kegiatan pemantauan keaktifan transmiter kapal perikanan.

Pangkalan PSDKP Bitung telah memiliki *Regional Monitoring Center (RMC)* yang digunakan untuk melakukan analisis data pemantauan aktivitas kapal perikanan yang berada di wilayah kerjanya. Kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh Pangkalan PSDKP Bitung meliputi:

1. Penerbitan Form Pemasangan
Form Pemasangan merupakan lembaran form yang diisi dan diterbitkan oleh penyedia SPKP saat pemasangan transmiter SPKP di kapal perikanan. Pengawas perikanan menjadi salah satu pihak yang menyaksikan pemasangan dan penerbitan Form Pemasangan dan memastikan bahwa pemasangan sudah sesuai prosedur yang ditentukan.
2. Penerbitan Form Pemeriksaan
Form Pemeriksaan merupakan lembaran form yang diisi dan diterbitkan oleh pengawas perikanan saat kapal berada di kapal dan akan mengurus dokumen SKAT. Peran penting form ini adalah untuk memastikan bahwa alat yang terpasang di kapal perikanan merupakan alat transmiter yang didaftarkan di SPKP. Form Pemeriksaan dapat dijadikan sebagai salah satu alat untuk validitas data identitas kapal dalam proses pelaksanaan SPKP terutama dari sisi pengguna. Dalam penerbitan Form Pemeriksaan, pengawas perikanan melakukan pengecekan terhadap dokumen kapal (SIPI/SIKPI, SKAT terakhir yang diterbitkan), transmiter yang terpasang (jenis, merk, dan nomor ID transmiter), dan keaktifan transmiter (dicek melalui aplikasi SALMON)
3. Pengajuan Permohonan SKAT
Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT) merupakan dokumen yang menyatakan bahwa transmiter SPKP pada kapal perikanan telah dipasang, diaktifkan, dan dapat dipantau pada pusat pemantauan kapal perikanan. Dokumen SKAT bukan untuk menunjukkan bahwa kapal dapat dipantau setiap saat, namun hanya menunjukkan

bahwa transmiter SPKP telah terpasang pada kapal yang ditentukan dan dapat dipantau (termasuk dipantau kapan transmiter aktif dan tidak aktif).

4. *Tracking* Kapal Perikanan Berdasarkan SLO dan HPK

SPKP merupakan salah satu instrumen untuk memantau dan mengawasi kegiatan kapal perikanan saat di laut, terutama terkait posisi dan pola gerak operasinya. Dalam melakukan analisis terhadap data SPKP, sudah diatur dalam Petunjuk teknis Analisis Data SPKP. Beberapa parameter yang dapat digunakan adalah informasi kapal perikanan (nama kapal, nama pemilik, nomor SIPI/SIKPI, Daerah Penangkapan Ikan (DPI) yang diperbolehkan, jenis alat tangkap, pelabuhan pangkal, dll), SLO dan HPK, dokumen SKAT, serta pola gerak yang dihasilkan oleh data SPKP.

Tracking kapal perikanan dapat didasarkan pada tanggal keluar kapal dari pelabuhan (didasarkan pada tanggal penerbitan SLO) dan tanggal kapal kembali ke pelabuhan (didasarkan pada tanggal penerbitan HPK-Kedatangan). Pada periode tracking tersebut, kemudian dapat dianalisis kegiatan kapal tersebut apakah sudah sesuai dengan ketentuan, antara lain:

- a) lokasi penangkapan ikan (DPI sudah sesuai atau belum);
- b) lokasi singgah saat periode tersebut (apakah pernah sandar atau masuk ke pulau atau pelabuhan lain selain pelabuhan pangkal/muat/bongkar); dan
- c) dugaan kegiatan *IUU fishing* lainnya.


Berdasarkan hasil analisis tersebut, kemudian dijadikan dasar untuk menentukan apakah selama periode tersebut kapal terpantau mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku.



5. Lain-lain

Selain tracking kapal perikanan berdasarkan SLO dan HPK, dapat pula dilakukan tracking kapal berdasarkan kebutuhan khusus. Kebutuhan khusus ini diperlukan untuk mendukung kegiatan pengawasan lainnya. Beberapa contoh kebutuhan khusus ini antara lain: a) sebaran operasi kapal perikanan; b) dukungan data posisi kapal perikanan untuk kegiatan operasi; c) tracking kapal perikanan untuk kegiatan penyelidikan atau penyidikan; dan d) permintaan dari pengguna SPKP.

Untuk mendukung kesiapan sistem pemantauan SDKP, Pangkalan PSDKP Bitung didukung dan dilengkapi dengan peralatan/perengkapan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27. Peralatan/Perlengkapan untuk mendukung kesiapan sistem Pemantauan SPKP di Pangkalan PSDKP Bitung

No	Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Kondisi	Foto
1.	Komputer Dell	2 unit	Baik	
2.	Komputer All in one	1 unit	Baik	
3.	TV monitor + Bracket + Kaki	2 unit	Baik	

No	Peralatan/Perlengkapan	Jumlah	Kondisi	Foto
4.	Rak server + CPU server	1 set	Baik	
5.	Radio unit dan stabilizer	1 set	Baik	
6.	Perangkat modem, UPS, connector dan astinet	1 set	Baik	
7.	Scanner	2 unit	Baik	
8.	Printer warna laser jet	1 unit	Rusak	
9.	Printer HP laser jet	1 unit	Rusak	
10.	Printer Canon 258	1 unit	Berfungsi terbatas	
11.	Kursi	1 buah	Baik	
12.	Meja Kerja	1 buah	Baik	
13.	AC	3 unit	1 Baik, 2 Rusak	

Capaian kinerja IKU Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP tahun 2020 dari target 70% tercapai 70% dengan persentase capaian kinerja 100%. Indikator Kinerja Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP merupakan IKU baru yang ditambahkan pada tahun 2020 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp102.000.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp95.077.577 atau 93,21%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SS6 sebesar 99,07% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target

Sasaran Strategis (SS7):

Terselenggaranya perawatan kapal pengawas

SS7 di dukung dengan satu indikator kinerja yaitu IKS.07.1 Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Target SS7 pada tahun 2020 adalah 2 unit, realisasi sebesar 2 unit dengan persentase capaian sebesar 100%.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya SS7 adalah Rp7.663.693.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp7.462.315.070 atau 97,37%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SS7 sebesar 99,18% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SS7 tercapai sesuai target.

IK7 - Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

Untuk mempersiapkan Kapal Pengawas dalam kondisi siap operasi maka diperlukan perawatan yang terencana dan berkelanjutan. Pelaksanaan kegiatan perawatan kapal harus dapat dilakukan dalam suatu sistem perawatan yang terintegrasi dengan baik, dengan tujuan:

1. Mencegah terjadinya kerusakan yang lebih berat pada komponen atau peralatan kapal dan menjaga agar tetap berfungsi dengan baik;
2. Memperbaiki atau mengembalikan kondisi peralatan kapal;
3. Memperpanjang umur pakai peralatan kapal;
4. Mempertahankan kapal selalu dalam kondisi laik laut dalam segala cuaca dan lokasi;
5. Kapal selalu dalam keadaan siap operasional dan dapat memenuhi jadwal pelayaran yang telah ditentukan tepat pada waktunya;
6. Meningkatkan efektifitas pengoperasian kapal;
7. Menjamin keselamatan awak kapal, muatan, dan peralatannya.

Usulan perawatan didasarkan pada Laporan Kondisi Teknis (Lapkonis) Kapal Pengawas yang disusun berdasarkan skala prioritas. Berdasarkan Laporan Kondisi Teknis (Lapkonis) 2 (dua) Kapal Pengawas Pangkalan PSDKP Bitung yaitu: KP. Hiu 02 dan KP Hiu 05 berada dalam kondisi siap operasi, sehingga capaian IKU ini tahun 2020 adalah 100%.

Perawatan Kapal Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020 meliputi:

1. Perawatan rutin bulanan, adalah pemeliharaan kapal yang dikerjakan di atas air, setiap bulan secara teratur.
2. Perawatan tahunan/docking, tujuannya untuk mempertahankan dan mengembalikan kondisi konstruksi dan peralatan kapal agar tetap laik laut dan dapat beroperasi Kembali.

Pada tahun 2020, dilakukan *docking* terhadap KP. Hiu 02 dan KP Hiu 05 yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus sampai dengan 17 September 2020 oleh PT. Samudera Puranabile Abadi (SPA). Kegiatan ini meliputi pengerjaan lambung kapal, ceruk Haluan (ruang alat tambat), pembersihan kamar mesin, listrik, propulsi, dan kemudi.

3. Perbaikan darurat, tujuannya untuk memperbaiki/mengembalikan kondisi peralatan kapal apabila terjadi kerusakan guna mendukung kesiapan operasional Kapal Pengawas. Kegiatan ini meliputi: konstruksi, mesin dan listrik, ventilasi dan penyejuk ruangan, perpipaan, propulsi dan kemudi, navigasi, komunikasi, tambat labuh dan jangkar, keselamatan dan akomodasi.
4. Pengadaan suku cadang dan perlengkapan, tujuannya untuk mengganti peralatan atau kelengkapan kapal yang mengalami kerusakan dan penambahan peralatan yang belum ada untuk mendukung operasional kapal pengawas.

Persentase kesiapan Kapal Pengawas tahun 2020 jika dibandingkan dengan tahun 2019 capaiannya sama yaitu 100%, namun jumlah Kapal Pengawas yang berada di bawah koordinasi Pangkalan PSDKP Bitung dari 4 unit Kapal Pengawas menjadi 2 unit Kapal Pengawas di tahun 2020. Berdasarkan surat Direktur Pemantauan Operasi Armada Nomor: 02509/PSDKP.1/TU.210//2020 tanggal 29 Januari 2020 tentang Operasional dan Penempatan AKP yang Tidak Laik Operasi, 2 Kapal Pengawas di bawah Pangkalan PSDKP Bitung yang dinyatakan tidak laik operasi, yaitu: KP Padaido dan KP Todak 01 dan telah dilaksanakan serah terima. Serah terima Kapal Pengawas tersebut berdasarkan BAST KP Padaido Nomor: 1136/Lan.5/PL.920/VIII/2020 tanggal 31 Agustus 2020 kepada BRSDM KP (Politeknik KP Bitung) dan BAST KP Todak 01 Nomor: 23816/PSDKP.04.2/PL.932 /IX/2020 tanggal 23 September 2020 kepada DKP Provinsi Sulawesi Tengah.

Wilayah operasi KP. Hiu 02 dan KP. Hiu 05 meliputi WPP-713 meliputi perairan Selat Makassar, Laut Flores, Teluk Bone dan Laut Bali; WPP-714 meliputi perairan Laut Banda dan Teluk Tolo; WPP-715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram dan Teluk Berau; dan WPP-716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah Utara Laut Halmahera.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp7.663.693.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp7.462.315.070 atau 97,37%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran kegiatan ini sebesar 97,37% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target.

Sasaran Strategis (SS8):

Terselenggaranya perawatan speedboat pengawas

SS8 di dukung dengan satu indikator kinerja yaitu IK8 - Jumlah speedboat pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Target SS8 pada tahun 2020 adalah 16 unit, realisasi sebesar 16 unit dengan persentase capaian sebesar 100%.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya SS8 adalah Rp1.845.007.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp1.569.340.631 atau 85,06%. Berdasarkan

analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SS8 sebesar 99,36% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SS8 tercapai sesuai target.

IK8 - Jumlah *speedboat* pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

Speedboat pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan memiliki daerah operasional yang terbatas, sesuai dengan kemampuan *speedboat* tersebut. Manfaat dari adanya *speedboat* pengawasan adalah untuk menjaga tertib peraturan perundang-undangan serta meminimalisir kegiatan *illegal, unregulated* dan *unreporting fishing* sehingga tercapainya kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang tertib regulasi. *Speedboat* pengawasan ini memiliki keunggulan pada kecepatan dan stabilitas, dengan kecepatan *speedboat* yang rata-rata diatas 20 knot mampu melakukan pengejaran terhadap para pelaku pelanggaran di daerah pesisir, sungai, danau maupun waduk.

Pangkalan PSDKP Bitung memiliki 7 unit *speedboat*, 1 unit *Rigid Inflatable Boat*, dan 8 unit *Rubber Boat* yang tersebar di wilayah kerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung dengan kondisi siap operasi, sehingga capaian kinerja IKU ini tahun 2020 adalah 100%. Sebaran Lokasi *Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat* lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, sebagai berikut:

Tabel 28. Sebaran Lokasi *Speedboat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat* lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020

No	Lokasi	<i>Speed Boat</i>	<i>RIB</i>	<i>Rubber Boat</i>	Keterangan
1	Pangkalan PSDKP Bitung	1	1	-	SP. Albacore 001 Sea Rider 06
2	Satwas SDKP Makassar	1	-	-	SP. Napoleon 030
3	Wilker PSDKP Pangkep	-	-	1	
4	Wilker PSDKP Bone	-	-	1	
5	Satwas PSDKP Takalar	-	-	1	
6	Wilker PSDKP Selayar	-	-	1	
7	Satwas SDKP Gorontalo	1	-	-	SP. Napoleon 031
8	Satwas SDKP Gorontalo Utara	1	-	-	SP. Dolphin 026
9	Satwas SDKP Mamuju	1	-	-	SP. Napoleon 056
10	Wilker PSDKP Mamuju Utara		-	1	
11	Satwas SDKP Kendari	1	-	1	SP. Dolphin 019
12	Wilker PSDKP Bangkeplut	1	-	-	SP. Dolphin 003
13	Wilker PSDKP Banggai	-	-	1	
14	Wilker PSDKP Wakatobi	-	-	1	
TOTAL		7	1	8	
		16			

Untuk memastikan kondisi *speedboat, rigid inflatable boat, dan rubber boat* selalu dalam kondisi siap operasi, perlu perawatan dan perbaikan secara rutin terhadap seluruh armada yang ada. Jenis perawatan dan perbaikan yang dilaksanakan pada tahun 2020, meliputi:

- Perawatan rutin
Perawatan rutin adalah perawatan konstruksi yang berada di atas permukaan air laut dan dilakukan setiap hari secara teratur. Perawatan ini bersifat rutin dan dapat dilakukan oleh awak *speedboat* pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Pekerjaan yang termasuk di dalam kegiatan perawatan rutin yaitu: 1) pembersihan dan pengecatan konstruksi yang berada di atas permukaan laut; 2) pendempulan dan laminasi aluminium/fiber yang rusak; 3) pencucian badan *speedboat* dari sekrap tiram, kotoran, dan binatang laut yang menempel; 4) perawatan alat navigasi, alat komunikasi, alat keselamatan, mesin dan kelengkapannya, kelistrikan.
- Perawatan darurat
Perbaikan yang dilakukan jika *rigid inflatable boat*, dan *rubber boat* mengalami kerusakan pada sistem permesinan, konstruksi, lambung dan alat navigasi lainnya sehingga membutuhkan komponen atau peralatan baru untuk menggantikan komponen atau peralatan lama yang rusak dan tidak bisa digunakan lagi.

Indikator Kinerja Jumlah *speedboat* pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung merupakan IKU baru yang ditambahkan pada tahun 2020 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp1.845.007.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp1.569.340.631 atau 85,06%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran kegiatan ini sebesar 99,66% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target.

Sasaran Strategis (SS9):

Terselenggaranya Operasi Kapal Pengawas

SS9 di dukung oleh dua indikator kinerja yaitu IK9 - Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas dan IK10 - Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU fishing dan merusak SDKP di WPP-NRI Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya SS9 adalah Rp7.663.693.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp7.462.315.070 atau 97,37%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SS9 sebesar 99,18% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SS9 tercapai sesuai target.

IK9 - Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas

Jumlah kapal perikanan yang diperiksa oleh kapal pengawas lingkup Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung tahun 2020 dari target 178 unit tercapai 197 unit dengan persentase capaian 110,67%. Rincian capaian kinerja IKU ini adalah sebagai berikut:

- KP. Hiu 02, dengan total capaian hari operasi 92 hari operasi, telah melakukan pemeriksaan terhadap 83 Kapal Ikan Indonesia (KII), 82 kapal memiliki dokumen

lengkap/sesuai dan dapat lanjut berlayar, 1 kapal di adhock ke Pangkalan PSDKP Bitung karena di duga melakukan pengeboman ikan.

- KP. Hiu 05, dengan total capaian hari operasi 108 hari operasi, telah melakukan pemeriksaan terhadap 114 Kapal Ikan Indonesia (KII), 113 kapal memiliki dokumen lengkap/sesuai dan dapat lanjut berlayar, 1 KII di adhock ke Pangkalan PSDKP Bitung karena di duga melakukan pengeboman ikan, dan 3 ponton di tarik ke Pangkalan PSDKP Bitung.

Indikator Kinerja jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas merupakan IKU baru yang ditambahkan pada tahun 2020 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp7.663.693.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp7.462.315.070 atau 97,37%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran kegiatan ini sebesar 99,12% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian kegiatan ini telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

IK10 - Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan IUU fishing dan merusak SDKP di WPP-NRI Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

Pelaksanaan kegiatan operasional pengawas perikanan dalam rangka pengawasan kegiatan *IUU Fishing* dan kegiatan yang merusak sumber daya kelautan dan perikanan di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, didukung dengan 2 (dua) unit Kapal Pengawas yaitu KP. Hiu 02 dan KP. Hiu 05. Rincian capaian hari operasi kapal pengawas tahun 2020 sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 29. Capaian Hari Operasi Kapal Pengawas

No	Nama Kapal	Target Hari Operasi	Capaian Hari Operasi	% Capaian
1	KP. Hiu 02	100 Hari Operasi	92 Hari Operasi	92%
2	KP. Hiu 05	100 Hari Operasi	108 Hari Operasi	108%
Rata-Rata Capaian Hari Operasi			100 Hari Operasi	100%

IKU Jumlah hari operasi kapal pengawas dalam rangka pengawasan kegiatan *IUU fishing* dan merusak SDKP di WPP-NRI Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung dari target 100 hari operasi tercapai 100 hari operasi dengan persentase capaian 100%. Capaian 100 hari operasi di tahun 2020 lebih tinggi dibandingkan dengan capaian 90 hari operasi di tahun 2019, walaupun secara kinerja, persentase capaian masih sama yaitu 100%. Kenaikan capaian kinerja disebabkan meningkatnya alokasi anggaran operasional Kapal Pengawas Pangkalan PSDKP Bitung di tahun 2020 sehingga target output ikut dinaikan juga.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp7.663.693.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp7.462.315.070 atau 97,37%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran kegiatan ini sebesar 99,03% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan

anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian kegiatan ini telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran

Sasaran Strategis (SS10):

Terselenggaranya Operasi speedboat Pengawas

SS10 di dukung dengan dua indikator kinerja yaitu IK11 - Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat pengawas dan IK - 2 Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya SS10 adalah Rp1.845.007.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp1.569.340.631 atau 85,06%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SS10 sebesar 99,36% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SS10 tercapai sesuai target.

IK11 - Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat pengawas

Jumlah kapal perikanan yang diperiksa oleh speedboat/RIB/rubber boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020 dari target 360 unit tercapai 759 unit dengan persentase capaian kinerja 120%.

Tabel 30. Jumlah Kapal Perikanan yang Diperiksa Menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020

No	Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	Jumlah KII yang Diperiksa	Keterangan
1.	SP. Albacore 01	72	dokumen lengkap
2.	SP. Dolphin 03	10	1 KII diberikan pembinaan
3.	SP. Dolphin 19	31	dokumen lengkap
4.	SP. Dolphin 26	86	dokumen lengkap
5.	SP. Napoleon 30	35	7 KII diberikan pembinaan
6.	SP. Napoleon 31	95	2 KII tidak mengaktifkan VMS, 1 KII kelebihan ABK
7.	SP. Napoleon 56	10	2 KII diberikan pembinaan
8.	Sea Rider 06	55	3 KII diberikan pembinaan
9.	Rubber Boat Bone	28	1 KII diberikan pembinaan
10.	Rubber Boat Kendari	2	dokumen lengkap
11.	Rubber Boat Luwuk Banggai	11	dokumen lengkap
12.	Rubber Boat Mamuju Utara	55	11 KII diberikan pembinaan
13.	Rubber Boat Pangkep	26	2 KII diduga melakukan kegiatan destructive fishing yaitu menggunakan potasium sianida (bius), kedua kapal tersebut di Ad Hoc ke Kantor Satwas SDKP

No	Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	Jumlah KII yang Diperiksa	Keterangan
			Makassar di PPN Untia untuk proses lebih lanjut
14.	Rubber Boat Selayar	63	dokumen lengkap
15.	Rubber Boat Takalar	62	44 KII diberikan pembinaan
16.	Rubber Boat Wakatobi	118	10 KII diberikan pembinaan

Indikator Kinerja jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan *speedboat* pengawas merupakan IKU baru yang ditambahkan pada tahun 2020 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp1.845.007.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp1.569.340.631 atau 85,06%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran kegiatan ini sebesar 99,60% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian kegiatan ini telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

IK12 - Jumlah Hari Operasi *Speedboat/RIB/Rubber Boat* di Pangkalan PSDKP Bitung

Pangkalan PSDKP Bitung dalam melaksanakan fungsi pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan dilengkapi dengan 7 unit *speedboat*, 1 unit *sea rider*, 8 unit *rubber boat* yang ditempatkan di 8 Wilker PSDKP yang ada di 3 Provinsi di Pulau Sulawesi yaitu: Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Jumlah hari operasi *speedboat/RIB/rubber boat* di Pangkalan PSDKP Bitung target 25 hari operasi tercapai 28 hari operasi dengan persentase capaian 112%. Rincian capaian IKU sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 31. Capaian Hari Operasi *Speedboat* Pengawas/RIB/Rubber Boat

No	Nama SP/RIB/RB	Lokasi	Target (hari operasi)	Capaian (hari operasi)	% capaian
1	SP. Albacore 001	Pangkalan PSDKP Bitung	25	52	120
2	SP. Napoleon 030	Satwas SDKP Makassar	25	35	120
3	SP. Napoleon 031	Satwas SDKP Gorontalo	25	30	120
4	SP. Napoleon 056	Satwas SDKP Mamuju	25	10	40
5	SP. Dolphin 019	Satwas SDKP Kendari	25	25	100
6	SP. Dolphin 026	Satwas SDKP Gorontalo Utara	25	25	100
7	SP. Dolphin 003	Wilker PSDKP Bangkeplut	25	10	40

No	Nama SP/RIB/RB	Lokasi	Target (hari operasi)	Capaian (hari operasi)	% capaian
8	Sea Rider 06	Pangkalan PSDKP Bitung	25	55	120
9	Rubber Boat Selayar	Wilker PSDKP Selayar	25	27	108
10	Rubber Boat Pangkep	Wilker PSDKP Pangkep	25	25	100
11	Rubber Boat Bone	Wilker PSDKP Bone	25	25	100
12	Rubber Boat Takalar	Satwas SDKP Takalar	25	25	100
13	Rubber Boat Kendari	Satwas SDKP Kendari	25	25	100
14	Rubber Boat Wakatobi	Wilker PSDKP Wakatobi	25	25	100
15	Rubber Boat Banggai	Wilker PSDKP Banggai	25	25	100
16	Rubber Boat Mamuju Utara	Wilker PSDKP Mamuju Utara	25	25	100
TOTAL			400	444	111
Rata-Rata Capaian Hari Operasi SP/RIB/Rubber Boat				28 Hari Operasi	

Capaian IKU ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019. Capaian di tahun 2019 adalah 37 hari operasi sedangkan tahun 2020 hanya 28 hari operasi. Turunnya capaian IKU ini disebabkan pengurangan alokasi anggaran dukungan operasional *speedboat*, *rigid inflatable boat*, dan *rubber boat* lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, dengan berkurangnya anggaran maka target output ikut diturunkan juga. Alokasi anggaran operasional *speedboat*, *rigid inflatable boat*, dan *rubber boat* lingkup Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2019 Rp2.174.905.000 dengan target 35 hari operasi sedangkan pada tahun 2020 turun menjadi Rp1.845.007.000 dengan target 25 hari operasi. Namun secara persentase capaian, kinerja IKU ini di tahun 2020 lebih tinggi sebesar 112% jika dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 105,71%.

Tabel 32. Perbandingan Capaian Hari Operasi 2019-2020

SP/RIB/RB	Capaian Hari Operasi 2019			Capaian Hari Operasi 2020		
	Target	Capaian	%	Target	Capaian	%
Speedboat	35	36	102	25	27	107
Sea Rider	35	55	157,14	25	55	220
Rubber Boat	35	35	100	25	25	100

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp1.845.007.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp1.569.340.631 atau 85,06%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran kegiatan ini sebesar 99,24% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan

untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian kegiatan ini telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

Sasaran Strategis (SS11):

Tersedianya awak kapal pengawas perikanan yang memenuhi kualifikasi kesehatan

SS11 di dukung dengan indikator kinerja yaitu IK13 – Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya SS11 adalah Rp56.700.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp56.400.000 atau 99,47%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SS8 sebesar 99,01% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SS11 tercapai sesuai target.

IK13 - Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

Selain kesiapan Sarana, Prasarana, dan logistik untuk mendukung operasi pengawasan yang dilakukan oleh Kapal Pengawas, kesiapan personil juga merupakan hal yang penting untuk disiapkan. Pemeriksaan kesehatan rutin adalah kegiatan setiap tahun yang dilakukan untuk mengetahui kesehatan setiap Awak Kapal Pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung agar tetap bugar dan sehat baik fisik maupun mental melalui pemeriksaan.

Pemeriksaan Kesehatan awak kapal pengawas melalui *medical check up* oleh rumah sakit Angkatan Laut atau rumah sakit lainnya yang ditunjuk. Hasil pemeriksaan harus menunjukkan bahwa awak kapal pengawas sehat sehingga memenuhi syarat untuk *on board* di Kapal Pengawas. *Medical check up* meliputi pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tensi, nadi, visus, buta warna, THT, jantung/paru, pencernaan, extremitas, dan golongan darah.

Jumlah awak kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung yang melakukan *medical check up* kesehatannya adalah 40 AKP, dengan rincian KP. Hiu 02 12 orang AKP, KP. Hiu 05 12 orang AKP, KP. Padaido 9 orang AKP, dan KP. Todak 01 7 orang AKP.

Sasaran Strategis (SS12):

Terselenggaranya Penyidikan TPKP

SS12 di dukung dengan satu indikator kinerja yaitu IK14 - Persentase Penyelesaian Administrasi Penyidikan, Pemanggilan, dan Pemeriksaan Tersangka Serta Saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Target SS12 pada tahun 2020 adalah 93%, realisasi sebesar 90,63% dengan persentase capaian sebesar 90,625%.

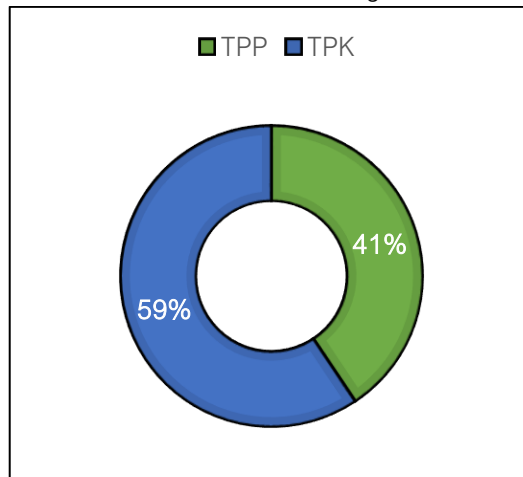
Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya SS12 adalah Rp255.056.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp252.718.700 atau 99,08%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SS8 sebesar 98,91% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal

ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SS12 tercapai sesuai target.

IK14 - Persentase Penyelesaian Administrasi Penyidikan, Pemanggilan, dan Pemeriksaan Tersangka Serta Saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

Pada tahun 2020, jumlah kasus TPKP yang ditangani oleh UPT Pangkalan PSDKP Bitung sebanyak 32 kasus. Kasus tersebut terdiri dari 13 kasus Tindak Pidana Perikanan (TPP) dan 19 kasus Tindak Pidanan Kelautan (TPK).

Gambar 7. Persentase Jenis Kasus TPKP di Pangkalan PSKP Bitung Tahun 2020



Sebanyak 29 kasus telah dinyatakan lengkap (P-21) dengan persentase penyelesaian TPKP 90,63% dengan target capaian sebesar 100%.

Jumlah kasus tindak pidana kelautan dan perikanan yang disidik dan selesai ditangani oleh Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020 sebanyak 32 kasus dengan rincian sebagai berikut:

- 1) KMN. Nur Alisa, kapal ikan berkebangsaan/bendera Indonesia dengan tersangka Gaging Bin Karim. Ditangkap di Perairan Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang pada koordinat 04° 51.221' LS - 118° 59.691' BT, melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya berupa potasium sianida, melanggar Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke I KUHP Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981. Berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan nomor: B-572/P.4.4/Eku.1/02/2020 Tanggal 12 Februari 2020.
- 2) KMN. Nur Alisa, kapal ikan berkebangsaan/bendera Indonesia dengan tersangka Habibi Bin Sainuddin. Ditangkap di Perairan Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang pada koordinat 04° 51.221' LS - 118° 59.691' BT, melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya berupa potasium sianida, melanggar Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke I KUHP Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981. Berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan nomor: B-571/P.4.4/Eku.1/02/2020 Tanggal 12 Februari 2020.

- 3) FBCA Sallin 02, kapal ikan berkebangsaan/bendera Philipina dengan tersangka Armando Mariscal. Ditangkap oleh KP. Orca 01 di Perairan ZEEI Laut Sulawesi pada koordinat 06° 10.836' LU -127° 50.435' BT karena melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen, melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) atau Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Bitung nomor: B-623/P.1.14/Eku.1/05/2020 Tanggal 26 Mei 2020.
- 4) FB. Berlian Jaya-A-02, kapal ikan berkebangsaan/bendera Philipina dengan tersangka Elmer Ambrocio. Ditangkap oleh KP. Orca 04 di Perairan ZEEI Laut Sulawesi pada koordinat 06° 12.547' LU -127° 59.919' BT karena melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen, melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) dan/atau Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Bitung nomor: B-622/P.1.14/Eku.1/05/2020 Tanggal 26 Mei 2020.
- 5) FB. Makmur 13, kapal ikan berkebangsaan/bendera Philipina dengan tersangka Edgar A. Yordan. Ditangkap oleh KP. Orca 04 di Perairan ZEEI Laut Sulawesi pada koordinat 06° 11.873' LU -127° 59.778' BT karena melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen, melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) dan/atau Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Bitung nomor: B-655/P.1.14/Eku/05/2020 Tanggal 12 Mei 2020.
- 6) Kapal Tanpa Nama, kapal ikan berkebangsaan/bendera Indonesia dengan tersangka Yusrin Bin Abdul Kadir. Ditangkap di Perairan Perairan Desa Bombana, Teluk Tomini Kabupaten Tojo Una-Una yang Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, melanggar Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke I KUHP Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981. Berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una nomor: B-454/ P2.18/Eku.1/05/2020 Tanggal 18 Mei 2020.
- 7) Kapal Sheng Teng Chun No. 66, kapal ikan berkebangsaan/bendera Taiwan dengan tersangka Lin Chin Fu. Ditangkap oleh KP. Orca 01 di Perairan ZEEI Laut Sulawesi pada koordinat 05° 59.840' LU -127° 39.937' BT karena melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen, melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) dan/atau Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45

Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang–Undang R I Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Bitung nomor: B-747/P.1.14/Eku.1/06/2020 Tanggal 15 Juni 2020.

- 8) FBca. Quadro Ocho 8888, kapal ikan berkebangsaan/bendera Philipina dengan tersangka Ralden Mongaya. Ditangkap oleh KP. Orca 01 di Perairan ZEEI Laut Sulawesi pada koordinat 06° 24.893' LU -127° 46.387' BT karena melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen, melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) dan/atau Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang–Undang R I Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Bitung nomor: B-621/P.1.14/Eku.1/05/2020 Tanggal 26 Mei 2020.
- 9) Kapal Tanpa Nama, kapal ikan berkebangsaan/bendera Indonesia dengan tersangka Asri Daeng. Ditangkap di Perairan Kotabunan pada koordinat 00° 48.352' LU -124° 41.200' BT, Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, melanggar Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke I KUHP Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981. Berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Bitung nomor: B-625/P.1.14/Eku.1/05/2020 Tanggal 26 Mei 2020.
- 10) Kapal Tanpa Nama, kapal ikan berkebangsaan/bendera Indonesia dengan tersangka Faisal Paparang. Ditangkap di Perairan Kotabunan pada koordinat 00° 48.352' LU -124° 41.200' BT, Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, melanggar Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke I KUHP Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981. Berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Bitung nomor: B-626/P.1.14/Eku.1/05/2020 Tanggal 26 Mei 2020.
- 11) Kapal Tanpa Nama, kapal ikan berkebangsaan/bendera Indonesia dengan tersangka Iswanto Tahumil. Ditangkap di Perairan Kotabunan pada koordinat 00° 48.352' LU -124° 41.200' BT, Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, melanggar Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke I KUHP Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981. Berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Bitung nomor: B-624/P.1.14/Eku.1/05/2020 Tanggal 26 Mei 2020.
- 12) Kapal Sheng Teng Chun No. 66, kapal ikan berkebangsaan/bendera Taiwan dengan tersangka Marcelo Vicente Cueto Jr. WNA Philipina. Ditangkap oleh KP. Orca 01 di Perairan ZEEI Laut Sulawesi pada koordinat 05° 59.840' LU -127° 39.937' BT karena melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen, melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) dan/atau Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang R I Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Bitung nomor: B-748/P.1.14/Eku.1/06/2020 Tanggal 15 Juni 2020.

- 13) FBca. Canter Jhon, kapal ikan berkebangsaan/bendera Philipina dengan tersangka Jacob S. Ulan-Ulan. Ditangkap oleh KP. Orca 01 di Perairan ZEEI Laut Sulawesi pada koordinat 06° 24.401' LU -127° 40.329' BT karena melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen, melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) dan/atau Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang R I Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Bitung nomor: B-746/P.1.14/Eku.1/06/2020 Tanggal 15 Juni 2020.
- 14) Kapal Tanpa Nama, kapal ikan berkebangsaan/bendera Indonesia dengan tersangka Sahrul Engeng. Ditangkap di Perairan Perairan Desa Bombana, Teluk Tomini Kabupaten Tojo Una-Una yang Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, melanggar Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke I KUHP Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981. Berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una nomor: B-281/P.2.18/Eku.1/06/2020 Tanggal 08 Juni 2020.
- 15) Kapal Tanpa Nama, kapal ikan berkebangsaan/bendera Indonesia dengan tersangka Timbul alias Hendrik. Ditangkap di erairan Desa Umbele, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali yang Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, melanggar Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke I KUHP Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981. Berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Morowali nomor: B-351/ B.2.19/Euh.1/08/ 2020 Tanggal 13 Agustus 2020.
- 16) Kapal Tanpa Nama, kapal ikan berkebangsaan/bendera Indonesia dengan tersangka Nyoman. Ditangkap di erairan Desa Umbele, Kecamatan Bungku Selatan, Kabupaten Morowali yang Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, melanggar Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke I KUHP Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981. Berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Morowali nomor: B-352/ B.2.19/Euh.1/08/ 2020 Tanggal 13 Agustus 2020.
- 17) FB. Louie – 17, kapal pengangkut ikan berkebangsaan/bendera Philipina dengan tersangka Joel catadman Viscayno. Ditangkap oleh KP. Orca 04 di Perairan ZEEI Laut Sulawesi pada koordinat 06° 00.281' LU - 129° 34.919' BT karena melakukan

penangkapan ikan tanpa dokumen, melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) dan/atau Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang R I Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Bitung nomor: B-957/P.1.14/Eku.1/07/2020 Tanggal 17 Juli 2020.

- 18) Fbca. Benten, kapal ikan berkebangsaan/bendera Philipina dengan tersangka Dodoy Visanr Gonzales. Ditangkap oleh KP. Orca 01 di Perairan ZEEI Laut Sulawesi pada koordinat 06° 21.672' LU - 127° 37.363' BT karena melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen, melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) dan/atau Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang R I Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Bitung nomor: B-956/P.1.14/Eku.1/07/2020 Tanggal 17 Juli 2020.
- 19) FB. Louie – 17, kapal pengangkut ikan berkebangsaan/bendera Philipina dengan tersangka Hermilito Catadman Labisto. Ditangkap oleh KP. Orca 04 di Perairan ZEEI Laut Sulawesi pada koordinat 06° 00.281' LU - 129° 34.919' BT karena melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen, melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) dan/atau Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang R I Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Bitung nomor: B-957/P.1.14/Eku.1/07/2020 Tanggal 17 Juli 2020.
- 20) Kapal Tanpa Nama, kapal ikan berkebangsaan/bendera Indonesia dengan tersangka Hasan Bin Dudding. Ditangkap oleh KP. Hiu Macan 03 di Perairan Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang pada koordinat 04° 46.344' LS - 119° 00.996' BT, melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya berupa potasium sianida, melanggar Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke I KUHP Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981. Berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan nomor: B-1288 /P.4.27/Euh.1/10/2020 Tanggal 20 Oktober 2020.
- 21) Kapal Tanpa Nama, kapal ikan berkebangsaan/bendera Indonesia dengan tersangka Alfajrin Bin Lukman. Ditangkap oleh KP. Hiu Macan 03 di Perairan Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang pada koordinat 04° 46.344' LS - 119° 00.996' BT, melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya berupa potasium sianida, melanggar Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke I KUHP Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981. Berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan nomor: B-1286 /P.4.27/Euh.1/10/2020 Tanggal 20 Oktober 2020.

- 22) Kapal Tanpa Nama, kapal ikan berkebangsaan/bendera Indonesia dengan tersangka Muh. Risal Bin Hasan. Ditangkap oleh KP. Hiu Macan 03 di Perairan Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang pada koordinat $04^{\circ} 46.344'$ LS - $119^{\circ} 00.996'$ BT, melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya berupa potasium sianida, melanggar Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke I KUHP Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981. Berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan nomor: B-1287 /P.4.27/Euh.1/10/2020 Tanggal 20 Oktober 2020.
- 23) KMN. Nur Aflah, kapal ikan berkebangsaan/bendera Indonesia dengan tersangka H. Abd. Wahid Bin Bibi Dg. Beta. Ditangkap oleh KP. Hiu Macan 03 di Perairan Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang pada koordinat $04^{\circ} 47.605'$ LS - $118^{\circ} 59.207'$ BT, melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya berupa potasium sianida, melanggar Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke I KUHP Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981. Berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan nomor: B-1320/P.4.27/Euh.1/10/2020 Tanggal 06 November 2020.
- 24) KMN. Nur Aflah, kapal ikan berkebangsaan/bendera Indonesia dengan tersangka Surianto Bin Udu Dg. Beta. Ditangkap oleh KP. Hiu Macan 03 di Perairan Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang pada koordinat $04^{\circ} 47.605'$ LS - $118^{\circ} 59.207'$ BT, melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya berupa potasium sianida, melanggar Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke I KUHP Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981. Berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan nomor: B-1321/P.4.27/Euh.1/10/2020 Tanggal 06 November 2020.
- 25) KMN. Nur Aflah, kapal ikan berkebangsaan/bendera Indonesia dengan tersangka Sila Bin Basso Dg. Talli. Ditangkap oleh KP. Hiu Macan 03 di Perairan Taman Wisata Perairan Kepulauan Kapoposang pada koordinat $04^{\circ} 47.605'$ LS - $118^{\circ} 59.207'$ BT, melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia berbahaya berupa potasium sianida, melanggar Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke I KUHP Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981. Berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Pangkajene Kepulauan nomor: B-1322/P.4.27/Euh.1/10/2020 Tanggal 06 November 2020.
- 26) FB. LB. Vient-21/FB. LD. Vient-19, kapal ikan berkebangsaan/bendera Philipina dengan tersangka Jonard Mahaling Manuso. Ditangkap oleh KP. Orca 04 di Perairan ZEEI Samudera Pasifik pada koordinat $03^{\circ} 17.081'$ LU - $133^{\circ} 53.236'$ BT karena melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen, melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) dan/atau Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang R I Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P-21)

berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Bitung nomor: B-1729/P.1.14/Eku.1/11/2020 Tanggal 13 November 2020.

- 27) FB. VMC-188/ FB.DT.3, kapal ikan berkebangsaan/bendera Philipina dengan tersangka Joel Labor Dela Pena. Ditangkap oleh KP. Orca 04 di Perairan ZEEI Samudera Pasifik pada koordinat 03° 18.327' LU - 133° 46.027' BT karena melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen, melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) dan/atau Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Bitung nomor: B-1747/P.1.14/Eku.1/11/2020 Tanggal 16 November 2020.
- 28) FB. VMC-188/ FB.DT.3, kapal ikan berkebangsaan/bendera Philipina dengan tersangka Danniell C. Alcaide. Ditangkap oleh KP. Orca 04 di Perairan ZEEI Samudera Pasifik pada koordinat 03° 18.327' LU - 133° 46.027' BT karena melakukan penangkapan ikan tanpa dokumen, melanggar Pasal 92 Jo Pasal 26 Ayat (1) dan/atau Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Bitung nomor: B-1728/P.1.14/Eku.1/11/2020 Tanggal 13 November 2020.
- 29) Kapal Tanpa Nama, kapal ikan berkebangsaan/bendera Indonesia dengan tersangka Soka. Ditangkap di Perairan Panimbawang Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali pada koordinat 03° 02' 27,3784" LS - 122° 31' 4,59401" BT. Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, melanggar Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke I KUHP Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981. Berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P-21) berdasarkan surat Kejaksaan Negeri Bitung nomor: B-1876/P.2.4/Eku.2/12/2020 Tanggal 03 Desember 2020.
- 30) Kapal Tanpa Nama, kapal ikan berkebangsaan/bendera Indonesia dengan tersangka Al Imran. Ditangkap oleh KP. HIU 05 di Perairan Teluk Tolo, Kabupaten Morowali pada koordinat 03° 27' 400" LS - 122° 55' 310" BT. Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, melanggar Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke I KUHP Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981. Masih dalam proses penyidikan oleh PPNS Pangkalan PSDKP Bitung.
- 31) Kapal Tanpa Nama, kapal ikan berkebangsaan/bendera Indonesia dengan tersangka Rikianto. Ditangkap oleh KP. HIU 05 di Perairan Teluk Tolo, Kabupaten Morowali pada koordinat 03° 27' 400" LS - 122° 55' 310" BT. Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, melanggar Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke I KUHP Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981. Masih dalam proses penyidikan oleh PPNS Pangkalan PSDKP Bitung.

- 32) Kapal Tanpa Nama, kapal ikan berkebangsaan/bendera Indonesia dengan tersangka Ardiansyah. Ditangkap oleh KP. HIU 05 di Perairan Teluk Tolo, Kabupaten Morowali pada koordinat 03° 27' 400" LS - 122° 55' 310" BT. Melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak/bom, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya, melanggar Pasal 84 Ayat (1) Jo Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke I KUHP Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981. Masih dalam proses penyidikan oleh PPNS Pangkalan PSDKP Bitung.

Capaian tahun 2020 sebanyak 32 kasus TPKP meningkat sekitar 88,23% dari capaian tahun 2019 sebanyak 17 kasus TPKP. Tahun 2020 terdapat 13 kasus yang menggunakan anggaran Direktorat Penanganan Pelanggaran dan 3 kasus yang belum P21 menggunakan anggaran tahun 2021.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp255.056.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp252.718.700 atau 99,08%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran sebesar 98,91% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SS8 tercapai sesuai target.

Sasaran Strategis (SS13):

Terselenggaranya Penanganan Barbuk dan Awak Kapal

SS13 di dukung dengan dua indikator kinerja yaitu IK15 – Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Bitung dan IKS.15.2 Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung. Persentase rata-rata terhadap capaian pada SS13 dari dua indikator kinerja sebesar 102,10%.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya SS13 adalah Rp233.434.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp216.201.000 atau 92,62%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SS8 sebesar 99,09% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SS13 tercapai sesuai target.

IK15 - Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

Selama tahun 2020 terdapat kasus TPKP sebanyak 32 kasus dengan jumlah barang bukti sebanyak 19 kapal. Sebanyak 28 kasus serta 18 barang bukti diantaranya telah dinyatakan lengkap (P-21) dengan jumlah dengan persentase penyelesaian barang bukti di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung sebesar 94,44% dengan persentase capaian 101,55%, target sebesar 93%.

Jumlah barang bukti yang ditangani oleh UPT Pangkalan PSDKP Bitung, sebanyak 19 Unit kapal, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 33. Data Barang Bukti Kapal Pelaku TPKP Tahun 2020

No	Nama Kapal	Ukuran	Lokasi Barbuk	Foto Kapal	Ket
1.	KMN. Nur Alisa	1	Makassar		Inkracht
2.	FBCA. Sallin 02	12.18 GT	Kolam labuh Pangkalan PSDKP Bitung		Inkracht
3.	FB. Berlian Jaya-A-02	39.57 GT	Kolam labuh Pangkalan PSDKP Bitung		Inkracht
4.	FB. Makmur 13	43.22 GT	Kolam labuh Pangkalan PSDKP Bitung		Inkracht
9.	Tanpa nama	1 GT	Tojo Una-una		Inkracht
5.	Tanpa nama	1 GT	Tojo Una-una		Inkracht
6.	Sheng Teng Chun No. 66	29.26 GT	Kolam labuh Pangkalan PSDKP Bitung		Inkracht
7.	FBca. Quadro Ocho 8888	29 GT	Kolam labuh Pangkalan PSDKP Bitung		Inkracht

No	Nama Kapal	Ukuran	Lokasi Barbuk	Foto Kapal	Ket
8.	Tanpa nama	-	Kolam labuh Pangkalan PSDKP Bitung		Inkracht
9.	FBca. Canter Jhon	3.5 GT	Kolam labuh Pangkalan PSDKP Bitung		Inkracht
10.	FB. Louie – 17	67.27 GT	Kolam labuh Pangkalan PSDKP Bitung		Inkracht
11.	Fbca. Bente	1 GT	Kolam labuh Pangkalan PSDKP Bitung		Inkracht
12.	Tanpa Nama		Morowali		Inkracht
13.	Tanpa Nama		Morowali		Inkracht
14.	Tanpa Nama	-	Makassar		Sidang

No	Nama Kapal	Ukuran	Lokasi Barbuk	Foto Kapal	Ket
15.	KMN. Nur Aflah	-	Makassar		Sidang
16.	FB. LB. VIENT-21 / FB. LD. VIENT 19	20,62	Kolam labuh Pangkalan PSDKP Bitung		Sidang
17.	FB. VMC - 188/ FB. DT. 3	105,90	Kolam labuh Pangkalan PSDKP Bitung		Sidang
18.	Tanpa Nama	1	TPI Morowali		Tahap II
19.	Tanpa Nama	2	Kolam labuh Pangkalan PSDKP Bitung		Penyidikan

Capaian penanganan barang bukti yang diamankan dari 32 kasus TPKP tahun 2020 sebanyak 19 barang bukti meningkat sekitar 58,33% dari capaian tahun 2019 sebanyak 13 kasus TPKP dengan barang bukti kapal yang diamankan sebanyak 12 unit Kapal Penangkap.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp57.970.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp 57.970.000 atau 100%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran sebesar 99,02% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target.

IK16 - Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

Selama tahun 2020, jumlah awak kapal pelaku TPKP yang ditangani oleh UPT Pangkalan PSDKP Bitung sebanyak 101 orang yang terdiri dari: 93 orang warga negara Philipina, 7

orang warga negara Indonesia, dan 1 orang warga negara Taiwan. Jumlah awak kapal yang selesai ditangani (dimulai dari penyerahan dari penangkap sampai dengan, untuk tersangka penyerahan tahap II, untuk non justisia dipulangkan ke daerah asal/diserahkan imigrasi) sebanyak 96 orang, sehingga masih tersisa 5 orang di Rumah Penampungan Sementara Pangkalan PSDKP Bitung. Hasil capaian kinerja sebesar 95,45% dengan persentase capaian 102,64% dari target sebesar 93%.

Tabel 34. Jumlah Awak Kapal yang Selesai Ditangani Tahun 2020

No	Keterangan	WNA	WNI
1.	Dipulangkan ke daerah/negara asal	79 Orang	1 Orang
2.	Penyerahan Tahap II	16 Orang	-
TOTAL		96 Orang	1 Orang

Jika dibandingkan dengan tahun 2019 jumlah awak kapal yang ditangani dari 13 kasus TPKP sebanyak 47 orang. Hal ini menunjukkan peningkatan jumlah awak kapal yang ditangani pada tahun 2020 sebanyak 32 kasus TPKP.

tercapainya kegiatan ini adalah Rp175.464.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp 158.231.000 atau 90,18%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran sebesar 99,12% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target.

Sasaran Strategis (SS14) :

Tata Kelola Pemerintahan yang Baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

Capaian SS14 Tata kelola pemerintahan yang baik di dukung dengan 9 (sembilan) indikator kinerja, yaitu: 1) Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan; 2) Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; 3) Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; 4) Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; 5) Nilai WBK Pangkalan PSDKP Bitung; 6) Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; 7) Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; 8) Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung; dan 9) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya SS14 adalah Rp20.760.978.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp19.735.594.954 atau 95,06%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran SS14 sebesar 99,07% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada SS14 tercapai namun terdapat satu indikator kinerja yang tidak mencapai target, yaitu IK24 - Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan

PSDKP Bitung. Namun hal tersebut menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian SS-8 telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

Capaian kinerja SS14 Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020, adalah sebagai berikut:

IK17 - Indeks Kepuasan Masyarakat Pengguna Layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. IKM bertujuan untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan secara berkala sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik selanjutnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menegaskan bahwa penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala.

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO di Pangkalan PSDKP Bitung dilaksanakan dua kali selama tahun 2020 yaitu pada Triwulan III sebesar 90,88 dan Triwulan IV sebesar 92,5. Berdasarkan pola akumulasi pada indikator kinerja ini adalah posisi akhir sehingga Indeks IKM layanan SLO yang digunakan sebagai capaian kinerja tahun 2020 sebesar 92,5 dengan persentase capaian kinerja 115,63% dari target capaian sebesar 80.

Tabel 35. Nilai Rata-rata (NRR) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pelayanan SLO Tahun 2020

No.	Unsur Pelayanan	NRR Per Unsur	NRR tertimbang per Unsur	IKM per Unsur
1	Persyaratan	3,593	0,399	89,815
2	Prosedur	3,611	0,401	94,444
3	Waktu Pelayanan	3,444	0,382	86,111
4	Biaya/Tarif	3,852	0,428	99,074
5	Produk Layanan	3,741	0,415	93,519
6	Kompetensi Pelaksana	3,778	0,419	94,444
7	Perilaku Pelaksana	3,778	0,419	94,444
8	Sarana dan Prasarana	3,772	0,413	90,741
9	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	3,815	0,423	95,370
	NILAI INDEKS (NI)		3,700	
	NILAI IKM setelah Dikonversi (NI x 25)		92,50	

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan hasil survey kepada masyarakat yang menjadi pelanggan pelayanan SLO di Pangkalan PSDKP Bitung dengan jumlah responden sebanyak 27 orang, diperoleh hasil skor **Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) : 3,700** dengan angka Indeks sebesar 92,50 maka kinerja unit pelayanan ini berada

dalam mutu pelayanan **A** dengan kategori **SANGAT MEMUASKAN**, karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat 81,26 – 100,00.

Capaian kinerja ini merupakan IKU baru yang ditambahkan di tahun 2020 sehingga tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019.

Alokasi anggaran untuk mendukung tercapainya kegiatan ini pada tahun 2020 adalah Rp43.980.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp32.265.750 atau 73,36%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran sebesar 99,37% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target.

IK18 - Persentase Pemenuhan Layanan Dukungan Manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

Layanan dukungan manajemen satker merupakan salah satu output dari Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP. Layanan dukungan manajemen lingkup Pangkalan PSDKP Bitung terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu:

- a. Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran;
- b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi;
- c. Pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
- d. Pengelolaan kepegawaian; dan
- e. Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga, dan perlengkapan.

Jumlah dokumen yang akan dihasilkan output layanan dukungan manajemen satker tahun 2020 sebanyak 30 dokumen, yang terdiri dari penyusunan rencana program dan anggaran 9 dokumen, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 14 dokumen, pengelolaan keuangan dan BMN 2 dokumen, pengelolaan kepegawaian 1 dokumen, pelayanan umum, rumah tangga dan perlengkapan 4 dokumen. Realisasi kinerja sebesar 100% dengan persentase capaian kinerja adalah 100%.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp188.591.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp136.099.157 atau 71,29%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran sebesar 99,29% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target.

IK19 - Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

Layanan sarana dan prasarana internal Pangkalan PSDKP Bitung terdiri dari 3 (lima) komponen, yaitu: Pengadaan kendaraan bermotor, Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi; dan Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran.

Capaian pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal UPT Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020 adalah 100%. Seluruh kegiatan telah diselesaikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Pengadaan kendaraan bermotor yang telah diselesaikan oleh penyedia PT. Hasjrat Abadi sebanyak 1 unit kendaraan operasional roda empat dan 1 unit kendaraan operasional roda dua (Juli 2020)
- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi serta pengadaan peralatan fasilitas perkantoran yang telah diselesaikan oleh penyedia PT. Solusi Media Rintis Tekonlogi (Juni 2020)
- Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi oleh penyedia CV. Gatita (Desember 2020)
- Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran diselesaikan oleh penyedia PT. Bahari Multi Usaha (Desember 2020)

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp1.339.300.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp1.292.780.719 atau 96,53%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran sebesar 99,03% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target.

IK20 - Persentase Pemenuhan Layanan Perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

Capaian persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup UPT Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020 adalah 100% dengan persentase capaian 100%. Kegiatan untuk mendukung IKU ini yaitu pembayaran gaji dan tunjangan pegawai dan operasional dan pemeliharaan kantor.

Terdapat sisa anggaran belanja pegawai (51) sebesar Rp292.649.109 pada tahun 2020, hal ini dikarenakan adanya mutasi pegawai Awak Kapal Pengawas di Pangkalan PSDKP Bitung sebanyak 18 orang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 78/MEN-SJ.2/KP.431/IX/2020 tanggal 24 September 2020 ke UPT Lingkup Ditjen PSDKP yang mana pembayaran gaji, uang makan dan tunjangan kinerja yang bersangkutan dibayarkan di Unit Kerja yang baru.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini adalah Rp18.506.511.000, realisasi tahun 2020 sebesar Rp17.686.759.969 atau 95,57%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran sebesar 99,04% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target.

IK21 - Nilai WBK Pangkalan PSDKP Bitung

WBK adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja. Secara teknis unit kerja tersebut memperoleh hasil penilaian indikator proses dan memenuhi syarat indikator hasil WBK ≥ 75 .

Hasil pelaksanaan penilaian WBK/WBBM pada Pangkalan PSDKP Bitung hasil penilaian mandiri dengan hasil penilaian Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM sebagai berikut: Manajemen Perubahan 7,52; Penataan Tata Laksana 4,08; Penataan Sistem Manajemen

SDM 6,99; Penguatan Akuntabilitas 10; Penguatan Pengawasan 9,36; Peningkatan Pelayanan Publik 3,60 dengan nilai komponen proses/pengungkit 41,82 dan nilai komponen hasil 40,00 dengan nilai total 80,41.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini Rp31.636.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp18.668.509 atau 59,01%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran sebesar 99,45% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian kegiatan telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

IK22 - Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

Indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung diukur berdasarkan kesesuaian Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin dari masing-masing Pegawai dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Nilai kualifikasi sendiri diperoleh dari tingkat pendidikan ASN sesuai SK Pangkat terakhir atau SK Pencantuman Gelar yang sudah di-update pada aplikasi SIMPEG Online KKP dengan bobot 25%). Nilai kompetensi diperoleh dari keikutsertaan ASN dalam Diklatpim (bagi Pejabat Eselon) serta Diklat Fungsional, Diklat 20 JP, atau Seminar (Bagi ASN Non Eselon) dengan bobot 40%. Nilai Kinerja dengan bobot 30% yaitu berkenaan dengan hasil penilaian prestasi kerja ASN melalui aplikasi Penilaian Perstasi Kerja Online KKP yang dikolaborasikan dengan database kepegawaian (SIMPEG Online KKP. Nilai Disiplin berkenaan dengan pernah atau tidaknya ASN dijatuhi hukuman disiplin dengan bobot 5%).

Nilai capaian tahun 2020 sebesar 75,4 dengan persentase capaian 104,72% dengan target sebesar 72. Capaian IKU ini diperoleh dari hasil perhitungan terhadap 103 jumlah pegawai di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung, dengan rincian capaian sebagai berikut:

Tabel 36. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020

Unit Kerja	Jumlah Pegawai yang Dihitung	Aspek penilaian								Nilai IP ASN	Ket.
		Kualifikasi (bobot 25)		Kompetensi (bobot 40)		Kinerja (bobot 30)		Disiplin (Bobot 5)			
		IP	%	IP	%	IP	%	IP	%		
Pangkalan PSDKP Bitung	103	12,5	50,08	33,2	83	24,67	82,23	5	100	75,4	SEDANG

Sumber: ropeg.kkp.go.id:4080/#/ip-asn/eselon, tanggal 11 Januari 2021

Perbandingan capaian indeks profesionalitas ASN Pangkalan PSDKP Bitung pada tahun 2020 menunjukkan kenaikan dibanding tahun 2019 dimana indeks IP ASN sebesar 62,38 naik 20,87% pada tahun 2020 sebesar 75,4. Meningkatnya indeks IP ASN Lingkup Pangkalan Bitung merupakan hasil dari beberapa kegiatan utama yang mendukung pencapaian IK ini antara lain:

- Diklat dan Bimtek peningkatan keterampilan pegawai di lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

- Webinar yang dapat diakses secara daring sehingga memudahkan pegawai ikut berpartisipasi.
- *Updating* data SDMA yang terdapat dalam aplikasi Simpeg meliputi data pendidikan, pelatihan dll yang telah dilakukan secara berkala.
- Monitoring dan evaluasi secara berkala tingkat kehadiran pegawai PSDKP melalui *finger print online*.
- Monitoring dan Evaluasi pengisian capaian kinerja Output individu pada Aplikasi E-SKP.
- Pembinaan pegawai lingkup Pangkalan PSDKP Bitung.

Alokasi anggaran tahun 2020 untuk mendukung tercapainya kegiatan ini Rp63.170.000, realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp17.981.600 atau 28,47%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran sebesar 99,73% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien, hal ini didasari bahwa semua kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja pada kegiatan ini tercapai sesuai target, yang sekaligus menunjukkan bahwa seluruh kegiatan utama yang diupayakan untuk pencapaian kegiatan telah terlaksana tanpa harus menggunakan seluruh alokasi anggaran.

IK23 - Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

Rekonsiliasi Kinerja merupakan (*Rapid Assesment*) yang dilakukan Biro Perencanaan KKP dengan tujuan meningkatkan aspek pelaporan kinerja pada SAKIP sehingga KKP memiliki gambaran kualitas implementasi SAKIP secara menyeluruh di seluruh Unit kerja. Indikator kinerja nilai Rekonsiliasi Kinerja merupakan IKU baru yang ditambahkan pada Triwulan III tahun 2020 yang merupakan implementasi dari Rekomendasi KemenPAN & RB terkait hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019 yakni “Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas agar lebih menggambarkan tingkat akuntabilitas unit kerja yang dievaluasi dan memastikan rekomendasi hasil evaluasi tersebut ditindaklanjuti dan dapat dimanfaatkan sebagai umpan balik (*feedback*) perbaikan perencanaan kinerja, penerapan manajemen kinerja, dan peningkatan capaian kinerja unit kerja secara berkelanjutan.

Perhitungan capaian IKU Nilai Rekonsiliasi Kinerja diperoleh dari akumulasi pada tiga aspek, yaitu:

- Aspek Kepatuhan
Dinilai dari kepatuhan penyiapan dan penyampaian dokumen oleh unit kerja (PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Rencana Aksi, LKJ/LCK Triwulan, dan Data dukung) dengan bobot 30% dari nilai total dokumen;
- Aspek Kesesuaian
Dinilai dari kesesuaian dengan kriteria yang telah ditetapkan (kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, realisasi, dan informasi data dengan bobot 30% dari rata-rata kesesuaian; dan
- Aspek Ketercapaian
Dinilai dari Pencapaian Kinerja unit kerja (NPSS pada aplikasi kinerjaku) dengan bobot 40% dari rata-rata nilai capaian kinerja.

Capaian nilai Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020 adalah 92,54 dengan persentase capaian 102,02% dari target nilai 90, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 37. Capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020

No	Aspek Penilaian	Bobot (%)	Skor per Aspek	Skor x Bobot	Total Skor
1.	Kepatuhan	30	100	30	92,54
2.	Kesesuaian	30	98,38	29.51	
3.	Ketercapaian	40	99,08	33.03	

Alokasi anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IK23 Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp113.970.000, telah terealisasi sebesar Rp109.297.000 atau 95,90%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran sebesar 99,07% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IK23 tercapai sesuai target.

IK24 - Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada sasaran strategis ini adalah Persentase Unit Kerja Yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar, yang didefinisikan sebagai aktivitas mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan utamanya kebijakan-kebijakan inovasi untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari untuk memberikan layanan kepada masyarakat pengguna, untuk menuju organisasi yang modern dan efisien.

Perhitungan capaian IKU Persentase Unit Kerja yang Menerapkan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar diperoleh dari akumulasi pada tiga komponen, yaitu:

- Dokumen (meliputi Perjanjian Kinerja, Manual IKU, Laporan Kinerja dan Interim) dengan bobot 20%;
- Keikutsertaan (Persentase pejabat dan staf yang tergabung dalam aplikasi Bitrix) dengan bobot 40%; dan
- Keaktifan (upload dokumentasi kegiatan/informasi dilengkapi dengan foto atau video (es II) atau notulensi hasil rapat yang bersifat boleh di publikasikan dan PPT rapat terkait kegiatan prioritas dengan kriteria mengandung informasi 5W1H) dengan bobot 40%.

Capaian nilai MP Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020 adalah 72,5% dengan persentase capaian 88,41% dari target 82%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 38. Penerapan MP Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020

No	Komponen	Bobot (%)	%	Keterangan
1.	Pemenuhan dokumen	20	20	dokumen PK dan LKj TW III
2.	Keikutsertaan	40	40	target keikutsertaan 10 orang, realisasi 8 orang (2 orang staf belum terdaftar)
3.	Keaktifan	40	20	4 pejabat yang terdaftar, aktif hanya 3 orang

Tabel 39. Nilai Penerapan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar di Pangkalan PSDK Bitung Tahun 2019 – 2020

Tahun	Capaian (%)
2019	93,06
2020	72,50

Berdasarkan tabel diatas, terjadi penurunan pencapaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 20,56% tersebut menunjukkan masih kurangnya partisipasi pejabat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung untuk menginformasikan kegiatan yang dilaksanakan melalui sistem pengetahuan yang telah ditetapkan. Metode perhitungan dengan menggunakan aplikasi bitrix 24, yang merupakan aplikasi untuk mengukur MP yang mudah diterapkan, yakni dengan prinsip melihat seberapa banyak unit kerja yang menerima informasi-informasi yang disampaikan.(level yg tidak diinput)

Alokasi anggaran Tahun 2020 untuk mendukung tercapainya IK24 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung sebesar Rp339.200.000, telah terealisasi sebesar Rp333.369.050 atau 98,28%. Berdasarkan analisis terhadap pencapaian indikator kinerja dan realisasi anggaran, tingkat efisiensi anggaran sebesar 98,89% atau dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran telah efisien. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan utama yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian IK24 tercapai sesuai target.

IK25 - Indeks Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat kinerja satker khususnya dalam pelaksanaan anggaran. pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang dilakukan dengan menggunakan variabel-variabel yang terkait dengan pelaksanaan anggaran sebagai indikatornya (13 indikator kinerja) yaitu: 1) revisi DIPA; 2) deviasi RPD (Halaman III DIPA); 3) Pagu Minus; 4) Data Kontrak; 5) Pengelolaan UP dan TU; 6) Rekon LPJ Bendahara; 7) Dispensasi SPM; 8) penyerapan anggaran; 9) Penyelesaian Tagihan; 10) Konfirmasi Capaian Output; 11) retur SP2D; 12) perencanaan kas; 13) kesalahan SPM. Namun untuk tahun 2020 terdapat catatan yaitu untuk mendukung akselerasi belanja Tahun 2020, Indikator Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA tidak diperhitungkan dalam nilai akhir IKPA.

Capaian nilai kinerja pelaksanaan anggaran Pangkalan PSDKP Bitung pada tahun 2020 berdasarkan aplikasi MonevPA Kementerian Keuangan adalah 94,33 dengan persentase capaian 107,19% dari target 88, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40. IKPA lingkup Pangkalan PSDKP Bitung Tahun 2020

No	Indikator Kinerja	Nilai	Bobot (%)	Nilai Akhir
1	Revisi DIPA	100	0	0
2	Deviasi Halaman III DIPA	73,86	0	0
3	Pagu Minus	100	5	5
4	Data Kontrak	90,91	15	13,64
5	Pengelolaan UP dan TUP	75	8	6

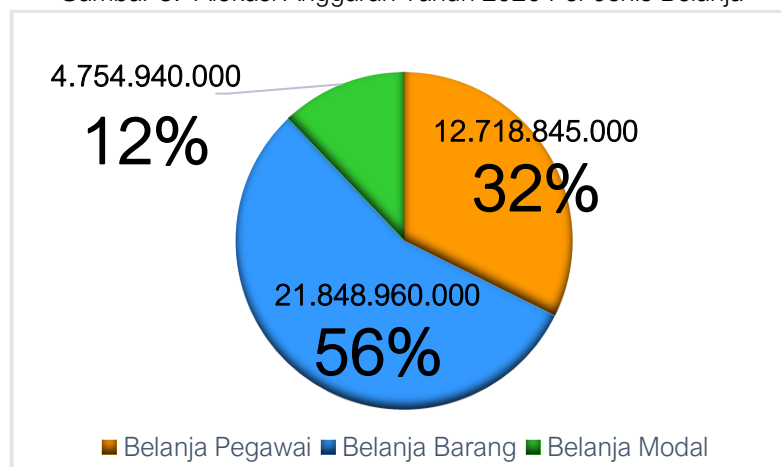
6	LPJ Bendahara	100	5	5
7	Dispensasi SPM	100	5	5
8	Penyerapan Anggaran	95,14	15	14,27
9	Penyelesaian Tagihan	100	12	12
10	Konfirmasi Capaian Output	97,73	10	9,77
11	Retur SP2D	100	5	5
12	Renkas	0	0	0
13	Kesalahan SPM	90	5	4,5
Nilai Total		80.18		
Konversi Bobot		85		
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)		94,33		

Sumber: <https://spanint.kemenkeu.go.id/314d2e4a-8578-4d53-b935-f82fde39e7bc> per tanggal 13 Januari 2020

3.3. Akuntabilitas Anggaran

Pagu anggaran Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020 semula sebesar Rp54.435.595.000 menjadi Rp39.322.745.000 atau terjadi pengurangan pagu anggaran sebesar Rp15.112.850.000. Pengurangan anggaran terjadi revisi penghematan anggaran terkait Covid-19.

Gambar 8. Alokasi Anggaran Tahun 2020 Per Jenis Belanja



Dari pagu anggaran Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020 sebesar Rp39.322.745.000 terealisasi Rp37.518.818.294 atau dengan persentase penyerapan sebesar 95,41% yang terdiri dari realisasi anggaran Belanja Pegawai (51) dari pagu anggaran sebesar Rp12.718.845.000 terealisasi Rp12.426.195.891 atau 97,70%, realisasi anggaran Belanja Barang (52) dari pagu anggaran sebesar Rp21.848.960.000 terealisasi Rp20.458.220.439 atau 93,63%, dan realisasi anggaran Belanja Modal (53) dari pagu anggaran sebesar Rp4.754.940.000 terealisasi Rp4.634.401.964 atau 97,46%.

Tabel 41. Realisasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2020

No	Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pemantauan dan Operasi Armada (2350)	16.842.348.000	16.107.879.240	95,64%
2	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan (2351)	488.490.000	468.919.700	95,99%
3	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan (2352)	585.840.000	565.238.400	96,48%
4	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (2353)	745.089.000	719.833.200	96,61%
5	Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP (2355)	20.660.978.000	19.656.947.754	95,14%
TOTAL		39.322.745.000	37.518.818.294	95,41%

Dari data realisasi di atas, berdasarkan jenis belanja realisasi anggaran tertinggi ada pada belanja pegawai dengan persentase penyerapan 97,70% dan realisasi anggaran terendah pada belanja barang dengan penyerapan 93,63%. Berdasarkan jenis kegiatan, realisasi anggaran tertinggi ada pada kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan (2353) dengan persentase penyerapan 96,61% dan realisasi anggaran terendah pada kegiatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP (2355) dengan persentase penyerapan 95,14%. Rendahnya realisasi anggaran kegiatan Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP (2355) disebabkan tidak terserapnya anggaran belanja pegawai, anggaran belanja bahan (administrasi mutasi pegawai, biaya konsumsi rapat, dan belanja jasa profesi), dan belanja honor output operasional satuan kerja.

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pangkalan PSDKP Bitung berlandaskan kepada tujuan, sasaran dan program kerja yang telah ditetapkan di dalam Renstra KKP, Renstra Ditjen. PSDKP, dan kontrak kinerja antara Direktorat Jenderal PSDKP (sebagai pemberi amanah) dengan Kepala Pangkalan PSDKP Bitung (sebagai penerima amanah) sebagai acuan dalam pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan.

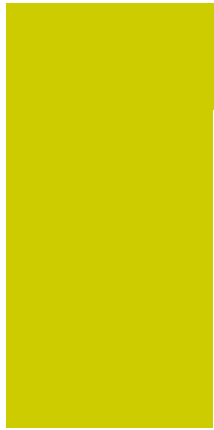
Hasil pengukuran terhadap capaian kinerja 14 Sasaran Strategis (SS) dan 25 Indikator Kinerja Pangkalan PSDKP Bitung di tahun 2020, nilai capaian kinerja IKU adalah 107,15 sedangkan nilai total capaian Indikator Kinerja (IKU + IK) adalah 106,90. Pencapaian kinerja tahun 2020 akan menjadi masukan dalam penyusunan perencanaan dan penetapan kegiatan Pangkalan PSDKP Bitung di tahun 2021.

Satu indikator kinerja Pangkalan PSDKP Bitung tahun 2020 yang tidak tercapai yaitu IK24 Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung” dari target 82% hanya tercapai 72,5% dengan persentase capaian 88,41%. Tidak tercapainya target ini disebabkan oleh rendahnya tingkat keaktifan level 3 Pangkalan PSDKP Bitung pada aplikasi Bitrix KKP. Dalam rangka perbaikan capaian Indikator Kinerja ini, diharapkan pada tahun 2021 dilakukan pemantauan secara berkala terhadap tingkat keaktifan setiap level yang ada di Pangkalan PSDKP Bitung.

4.2. Rekomendasi

Berdasarkan informasi hasil capaian dan permasalahan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja ini, diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan capaian kinerja Pangkalan PSDKP Bitung tahun berikutnya, antara lain:

Saran	Rencana Tindakanjutt
Dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran perlu disusun dengan baik karena akan menjadi pedoman pelaksanaan di tahun 2021	Penyusunan <i>time table</i> pelaksanaan kegiatan berdasarkan distribusi target dan alokasi anggaran yang ada sebagai bagian monitoring dan evaluasi pencapaian target kinerja tahun 2021
Monitoring dan evaluasi dalam rangka pengendalian terhadap permasalahan yang mungkin ada pada saat pelaksanaan kegiatan	Menyusun pengendalian terhadap risiko yang mungkin muncul dalam pelaksanaan kegiatan dalam rangka pencapaian target kinerja
Peningkatan dukungan dan peran aktif pegawai mulai dari tingkat pimpinan, pejabat eselon IV, dan staf terhadap pencapaian indikator kinerja tahun 2021	Monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja secara periodik (Triwulan) dalam rangka verifikasi dan validasi capaian kinerja terhadap pelaporan dari Wilker, Satwas sampai ke UPT, dan dari UPT ke pusat



LAMPIRAN

RENCANA KINERJA PANGKALAN PSDKP BITUNG TAHUN 2020 – 2024

NO	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Terselenggaranya sistem pengawasan berbasis masyarakat					
	Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	70	72	75	78	80
2	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan					
	Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (pelaku usaha)	55	58	60	62	65
3	Terselenggaranya pengawasan pengelolaan sumber daya perikanan					
	Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100	100	100	100	100
4	Terselenggaranya Pemantauan SDKP					
	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	0,75	0,78	0,80	0,82	0,85
	Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	0,204	0,206	0,208	0,210	0,212
	Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)	70	72	75	78	80
5	Terselenggaranya pembangunan serta perawatan sarana dan prasarana Pengawasan SDKP					
	Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (unit)	2	2	3	3	4
	Jumlah speedboat yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (unit)	16	16	16	16	17
6	Terselenggaranya Operasi Armada Pengawasan SDKP					
	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	178	180	200	210	250

NO	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan speedboat (unit)</i>	360	360	360	360	360
	<i>Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (hari operasi)</i>	150	180	180	180	180
	<i>Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (hari operasi)</i>	50	50	50	50	50
	<i>Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (orang)</i>	40	40	40	40	40
7	<i>Terselenggaranya Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan</i>					
	<i>Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	100	100	100	100	100
	<i>Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	93	93	93	93	93
	<i>Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	93	93	93	93	93
8	<i>Tata kelola pemerintahan yang baik</i>					
	<i>Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Indeks)</i>	72	73	74	75	76
	<i>Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	82	82	82	82	82
	<i>Persentase Pemenuhan dokumen RB lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	100	100	100	100	100
	<i>Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	100	100	100	100	100

NO	SASARAN/ INDIKATOR KINERJA	2020	2021	2022	2023	2024
	<i>Persentase pemenuhan layanan sarana dan prasarana internal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	100	100	100	100	100
	<i>Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	100	100	100	100	100
	<i>Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK (unit kerja)</i>	1	1	1	1	1
	<i>Persentase Pemenuhan dokumen SPIP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	100	100	100	100	100
	<i>Persentase Pemenuhan dokumen AKIP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	100	100	100	100	100
	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan (Indeks)</i>	80	80	80	80	80
	<i>Nilai kinerja pelaksanaan anggaran lingkup Pangkalan PSDKP Bitung</i>	88	88	88	88	88
	<i>Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK Pangkalan PSDKP Bitung dibandingkan Realisasi Anggaran Pangkalan PSDKP Bitung (%)</i>	1	1	1	1	1

Bitung, April 2020

Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber
Daya Kelautan dan Perikanan Bitung



Donny Muhamad Faisal



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Medan Merdeka Timur No. 16 Gedung Mina Bahari IV Lantai 11 Bitung 10110
Kotak Pos 4130 JKP 10041 Telepon : (021) 3514728 (Hunting), Faksimile : (021) 3515484
Website : www.djpsdkp.kkp.go.id E-mail : ditjenpsdkp@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Donny Muhamad Faisal**

Jabatan : Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bitung, 2 November 2020

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Bitung

Donny Muhamad Faisal

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PANGKALAN PENGAWASAN SDKP BITUNG

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terselenggaranya tindak lanjut atas laporan pengaduan Pokmaswas	1. Persentase tindak lanjut informasi Pokmaswas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	70
2.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan kelautan	2. Jumlah Pelaku Usaha Kelautan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung [pelaku usaha]	55
3.	Terselenggaranya pengawasan kepatuhan pemangku kepentingan perikanan	3. Persentase Pelaku Usaha Perikanan yang diperiksa kepatuhannya lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
4.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan kapal pengawas	4. Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau menggunakan kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	1,06
5.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP menggunakan Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat	5. Persentase cakupan WPP NRI yang dipantau dari kegiatan Illegal Fishing melalui operasional Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	0,204
6.	Terselenggaranya Pemantauan SDKP melalui Sistem Pemantauan Kapal Perikanan (SPKP)	6. Persentase kesiapan sistem pemantauan SDKP (%)	70
7.	Terselenggaranya perawatan kapal pengawas	7. Jumlah kapal pengawas yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (unit)	2
8.	Terselenggaranya perawatan speedboat pengawas	8. Jumlah <i>speedboat</i> yang siap operasi lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (unit)	16
9.	Terselenggaranya Operasi Kapal Pengawas	9. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan kapal pengawas (unit)	178
		10. Jumlah hari operasi kapal pengawas lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (hari operasi)	100
10.	Terselenggaranya Operasi speedboat Pengawas	11. Jumlah kapal perikanan yang diperiksa di laut menggunakan <i>speedboat</i> (unit)	360
		12. Jumlah hari operasi Speed Boat/Rigid Inflatable Boat/Rubber Boat lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (hari operasi)	25
11.	Tersedianya awak kapal pengawas perikanan yang memenuhi kualifikasi kesehatan	13. Jumlah Awak Kapal Pengawas Perikanan yang memperoleh pemeriksaan kesehatan rutin tahunan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (orang)	40

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
12.	Terselenggaranya Penyidikan TPKP	14. Persentase Penyelesaian administrasi penyidikan, pemanggilan dan pemeriksaan tersangka serta saksi TPKP lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
13.	Terselenggaranya Penanganan Barbuk dan Awak Kapal	15. Persentase Penyelesaian Penanganan Barbuk lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93
		16. Persentase Penyelesaian Penanganan Awak Kapal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	93
14.	Tata kelola pemerintahan yang baik lingkup Pangkalan PSDKP Bitung	17. Indeks Kepuasan Masyarakat pengguna layanan SLO (Surat Laik Operasi) Kapal Perikanan lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Indeks)	80
		18. Persentase pemenuhan layanan dukungan manajemen Satker lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
		19. Persentase pemenuhan layanan Sarana dan Prasarana Internal lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
		20. Persentase pemenuhan layanan perkantoran lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (%)	100
		21. Nilai WBK Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	75
		22. Indeks Profesionalitas ASN lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Indeks)	72
		23. Nilai Rekonsiliasi Kinerja lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (nilai)	90
		24. Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar lingkup (%)	82
		25. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) lingkup Pangkalan PSDKP Bitung (Indeks)	88

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1.	Pemantauan dan Operasi Armada	17.484.904.000
2.	Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan	488.490.000
3.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan	585.840.000
4.	Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan	745.089.000
5.	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Direktorat Jenderal PSDKP	20.180.422.000
Total Anggaran Pangkalan Pengawasan SDKP Bitung		39.322.745.000

Bitung, 2 November 2020

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Pengawasan
Sumber Daya Kelautan dan Perikanan



Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya
Kelautan dan Perikanan Bitung



Donny Muhamad Faisal